



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN AGAM

LPPD 2023

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH





KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 adalah bentuk kewajiban sebagaimana telah diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Kepala Daerah Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Melalui LPPD ini diharapkan Masyarakat Kabupaten Agam mendapatkan informasi sekaligus bahan evaluasi terkait kinerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023. Dokumen ini juga menjadi informasi bagi berbagai pihak untuk melihat dan mengukur kinerja Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah menyadari akan segala keterbatasan kemampuan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kritik dan saran serta rekomendasi atas LPPD ini, sangat kami harapkan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah pada tahun-tahun yang akan datang.

Akhirul kalam, semoga Allah SWT tetap melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, aamiin.

Lubuk Basung, 31 Maret 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.1.1 Penjelasan Umum	I-2
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	I-2
b. Data Geografis Wilayah.....	I-2
c. Jumlah Penduduk.....	I-4
d. Jumlah Kecamatan dan Nagari	I-4
e. Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai	I-7
f. Realisasi APBD	I-9
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I-22
a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah.....	I-22
b. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I-32
c. Program Pembangunan Daerah	I-44
d. Kegiatan Pembangunan Daerah.....	I-44
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	I-44
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	II-1
2.1 Capaian Kinerja Makro	II-1
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	II-1
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	II-2
BAB III TUGAS PEMBANTUAN.....	III-1
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	III-1
3.1.1 Urusan Pilihan Bidang Pertanian	III-1
3.1.2 Urusan Pilihan Bidang Perdagangan.....	III-9
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL... 	IV-1
4.1 Bidang Urusan Pendidikan	IV-1
4.2 Bidang Urusan Kesehatan.....	IV-11
4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum	IV-25
4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat	IV-30
4.5 Bidang Urusan Sosial	IV-36
4.6 Bidang Urusan Trantibum Linmas	IV-49

BAB V PENUTUP	V-1
----------------------------	------------

LAMPIRAN

LAMPIRAN I.1 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

LAMPIRAN I.2 KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAMPIRAN II CAPAIAN KINERJA IKK OUTCOME URUSAN PEMERINTAHAN

LAMPIRAN III LAIN - LAIN

DAFTAR TABEL

Tabel		
1.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Agam Tahun 2023	I-4
1.2	Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Agam.....	I-4
1.3	Perangkat Daerah dan PNS Kabupaten Agam.....	I-7
1.4	Realisasi Pendapatan Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2022-2023.....	I-10
1.5	Laporan Keuangan Kabupaten Agam Tahun 2023.....	I-10
1.6	Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian PAD Kabupaten Agam.....	I-11
1.7	Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian Pendapatan Transfer Kabupaten Agam Tahun 2023.....	I-13
1.8	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023	I-18
1.9	Capaian Realisasi dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 dan 2023	I-18
1.10	Pengalokasian Belanja Mandatory Tahun 2022 dan 2023.....	I-19
1.11	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kab. Agam Tahun 2023	I-21
1.12	Isu Strategis dan Prioritas serta Sasaran Tahun 2023	I-23
1.13	Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pecapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021-2026	I-47
1.14	Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pecapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021-2026	I-48
1.15	Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pecapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026	I-49
1.16	Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pecapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021-2026	I-49
1.17	Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pecapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2021-2026	I-50
1.18	Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pecapaian SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas Tahun 2021-2026	I-52
2.1	Capaian Indikator Makro Kab. Agam Tahun 2022 dan 2023	II-1
2.2	Predikat Kinerja.....	II-4
2.3	Target dan Perjanjian Kinerja Pemkab Agam Tahun 2023	II-5
2.4	Realisasi Kinerja Pemkab Agam Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja....	II-9
2.5	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi I Tahun 2023	II-14
2.6	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi.....	II-16
2.7	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023	II-31
2.8	Nilai SAKIP Kabupaten Agam Tahun 2023	II-32
2.9	Matrik Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 202.....	II-33
2.10	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023	II-39

2.11	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Terselenggaranya BIKRASI yang Bersih dan Akuntabel Tahun 2022 dan 2023	II-42
2.12	Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Agam Beberapa Tahun Terakhir	II-43
2.13	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Terselenggaranya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026	II-44
2.14	Program dan Anggaran yang Mendukung Realisasi Sasaran Terselenggaranya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Tahun 2023	II-45
2.15	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Terselenggaranya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Tahun 2023	II-46
2.16	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Terlaksananya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	II-47
2.17	Realisasi Indikator Sasaran Terselenggaranya Birokrasi yang Kapabel	II-49
2.18	Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Agam Tahun 2023	II-52
2.19	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Yang Kapabel Tahun 2022 dan 2023	II-57
2.20	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Yang Kapabel dengan Target Periode Akhir RPJMD 2021-2026	II-58
2.21	Program dan Anggaran yang Mendukung Realisasi Sasaran Terselenggaranya Birokrasi yang Kapabel Tahun 2023	II-59
2.22	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Terselenggaranya Birokrasi yang Kapabel Tahun 2023	II-60
2.23	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Terlaksananya Birokrasi yang Kapabel	II-61
2.24	Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Tahun 2023	II-62
2.25	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan 2022	II-65
2.26	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dengan Target Periode Akhir RPJMD 2021-2026	II-65
2.27	Program dan Anggaran yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	II-66
2.28	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	II-66
2.29	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	II-67
2.30	Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Nagari Tahun 2023	II-68

2.31	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Nagari Tahun 2022 dan 2023	II-69
2.32	Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintah Nagari Pembangunan Jangka Menengah.....	II-69
2.33	Program dan Anggaran yang Mendukung Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Nagari Tahun 2023	II-70
2.34	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	II-70
2.35	Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Program Sasaran Meningkatnya Kinerha Pengelolaan Pemerintahan Nagari	II-71
2.36	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi II Tahun 2023 Meningkatnya Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat.....	II-72
2.37	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian dan Usaha Mikro.....	II-73
2.38	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian dan Usaha Mikro Tahun 2022 dan 2023	II-75
2.39	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian dan Usaha Mikro dengan RPJMD Tahun 2021-2026	II-76
2.40	Program dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya Produksi Usaha Pertanian dan Industri Pengolahan Tahun 2023.....	II-77
2.41	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian dan Usaha Mikro Tahun 2023	II-79
2.42	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian dan Usaha Mikro Tahun 2023	II-80
2.43	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah.....	II-82
2.44	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan 2022.....	II-84
2.45	Program dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah Tahun 2023	II-86
2.46	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Meningkatnya Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah Tahun 2023.....	II-87
2.47	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatnya Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah Tahun 2023	II-88
2.48	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan Kawasan.....	II-89
2.49	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan Kawasan Tahun 2022 dan 2023	II-90

2.50	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Konektivitas Wiayah dan Kawasan dengan RPJMD Tahun 2021-2026	II-91
2.51	Program dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan Kawasan Tahun 2023	II-92
2.52	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan Kawasan Tahun 2023	II-93
2.53	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan Kawasan	II-94
2.54	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	II-95
2.55	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Tahun 2022 dan 2023	II-96
2.56	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026	II-96
2.57	Program dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Tahun 2023	II-97
2.58	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Tahun 2023	II-98
2.59	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	II-98
2.60	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi III Tahun 2023	II-100
2.61	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 Berkurangnya Pengrusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	II-100
2.62	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Berkurangnya Pengrusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Tahun 2021 dan 2023	II-103
2.63	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Berkurangnya Pengrusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026	II-104
2.64	Program dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Berkurangnya Pengrusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Tahun 2023	II-105
2.65	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023	II-106
2.66	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Berkurangnya Pengrusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Tahun 2023	II-107

2.67	Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2023 Meningkatnya Ketaatan Terhadap Tata Ruang	II-110
2.68	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketaatan Terhadap Tata Ruang Tahun 2023 dengan Tahun 2022.....	II-111
2.69	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketaatan Terhadap Tata Ruang dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026	II-112
2.70	Program dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya Ketaatan Terhadap Tata Ruang Tahun 2023	II-112
2.71	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatkan Ketaatan Terhadap Tata Ruang Tahun 2023	II-113
2.72	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatkan Ketaatan Terhadap Tata Ruang Tahun 2023	II-113
2.73	Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2023 Berkurangnya Resiko Bencana Terhadap Manusia dan Lingkungan	II-115
2.74	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Berkurangnya Resiko Bencana Terhadap Manusia dan Lingkungan Tahun 2023 dengan 2022...	II-116
2.75	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Berkurangnya Pengrusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026.....	II-117
2.76	Program dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Berkurangnya Resiko Bencana Terhadap Manusia dan Lingkungan Tahun 2023.....	II-117
2.77	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Berkurangnya Resiko Bencana Terhadap Manusia dan Lingkungan Tahun 2023	II-118
2.78	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Berkurangnya Resiko Bencana Terhadap Manusia dan Lingkungan.....	II-119
2.79	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi IV Tahun 2023 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berkarakter	II-120
2.80	Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Berkarakter	II-122
2.81	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Berkarakter Tahun 2023 dengan Tahun 2022	II-124
2.82	Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatkan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkarakter dalam Pembangunan Jangka Menengah.....	II-125
2.83	Program dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatkan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkarakter Tahun 2023	II-126
2.84	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatkan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkarakter Tahun 2023	II-126

2.85	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Capaian Program dan Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Berkarakter	II-127
2.86	Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2023 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas	II-129
2.87	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Tahun 2023 dengan Tahun 2022	II-130
2.88	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 – 2026.....	II-131
2.89	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Tahun 2023.....	II-132
2.90	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Tahun 2023	II-133
2.91	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas.....	II-134
2.92	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi IV Tahun 2023 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Mandiri Dan Berdaya Saing	II-135
2.93	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat.....	II-136
2.94	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Tahun 2023 dengan Tahun 2022.....	II-137
2.95	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 – 2026.....	II-138
2.96	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Tahun 2023	II-139
2.97	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Tahun 2023	II-139
2.98	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Tahun 2022	II-140
2.99	Realisasi Indikator Sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda Tahun 2023.....	II-141
2.100	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda Tahun 2022 dengan Tahun 2023	II-143
2.101	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatkan Daya Saing Pemuda dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026.....	II-143
2.102	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda Tahun 2023.....	II-144

2.103	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda Tahun 2023.....	II-145
2.104	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran Sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda Tahun 2023.....	II-146
2.105	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah.....	II-147
2.106	Cut Off Point Indeks Ketahanan Pangan Daerah.....	II-148
2.107	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2023 dengan Tahun 2022.....	II-149
2.108	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026.....	II-150
2.109	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2023.....	II-151
2.110	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2023	II-151
2.111	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2023.....	II-152
2.112	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi IV Tahun 2023 Terwujudnya Perlindungan Dan Kesejahteraan Sosial.....	II-153
2.113	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.....	II-153
2.114	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 dengan Tahun 2022	II-158
2.115	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026.....	II-159
2.116	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023.....	II-160
2.117	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023.....	II-162
2.118	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.....	II-163
2.119	Realisasi Indikator Sasaran Terkendalanya Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang Tahun 2023	II-165
2.120	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Terkendalanya Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang Tahun 2023 dengan Tahun 2022.....	II-166

2.121	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang dalam Pembangunan Jangka Menengah dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026.....	II-167
2.122	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang Tahun 2023.....	II-167
2.123	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang Tahun 2023.....	II-168
2.124	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang Tahun 2023.....	II-169
2.125	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi V Tahun 2023 Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya.....	II-170
2.126	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 Berkurangnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.....	II-172
2.127	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Berkurangnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Tahun 2023 Dengan Tahun 2022.....	II-175
2.128	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Berkurangnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026 ..	II-176
2.129	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Berkurangnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Tahun 2023	II-177
2.130	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Berkurangnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Tahun 2023	II-179
2.131	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Berkurangnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	II-180
2.132	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib Berlandaskan Nilai- Nilai Agama, Adat Dan Budaya Tahun 2023.....	II-182
2.133	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya Tahun 2023 dengan Tahun 2022	II-185
2.134	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026.....	II-186
2.135	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya Tahun 2023	II-188

2.136	Perbandingan Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya Tahun 2023.....	II-189
2.137	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya.....	II-190
3.1	Tugas Pembantuan Urusan Pilihan Bidang Pertanian	III-6
3.2	Pekerjaan Fisik Revitalisasi Pasar Tiku	III-12
3.3	Laporan Realisasi Anggaran dan Tugas Pembantuan Tahun 2023.....	III-13
3.4	Tugas Pembantuan Urusan Pilihan Bidang Perdagangan	III-14
4.1	Target, Realisasi dan Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan	IV-1
4.2	Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2023.....	IV-4
4.3	Dukungan Personil Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2023	IV-7
4.4	Permasalahan dan Solusi Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2023	IV-8
4.5	Target, Realisasi dan Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan	IV-14
4.6	Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023	IV-19
4.7	Dukungan Personil Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023.....	IV-20
4.8	Permasalahan dan Solusi Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023	IV-21
4.9	Target, Realisasi dan Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum	IV-26
4.10	Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023	IV-27
4.11	Dukungan Personil Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023	IV-28
4.12	Permasalahan dan Solusi Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023.....	IV-28
4.13	Target, Realisasi dan Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat ...	IV-31
4.14	Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023.....	IV-32
4.15	Dukungan Personil Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023.....	IV-34
4.16	Permasalahan dan Solusi Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023.....	IV-34

4.17	Target, Realisasi dan Capaian SPM Bidang Urusan Sosial.....	IV-36
4.18	Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2023.....	IV-43
4.19	Dukungan Personil Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2023.....	IV-46
4.20	Permasalahan dan Solusi Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2023	IV-47
4.21	Target, Realisasi dan Capaian SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas	IV-50
4.22	Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas Tahun 2023.....	IV-53
4.23	Dukungan Personil Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas Tahun 2023.....	IV-57
4.24	Permasalahan dan Solusi Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas Tahun 2023.....	IV-58

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.1	Peta Administrasi Kabupaten Agam	I-3
1.2	Penjabaran Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026	I-34
1.3	Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi I	I-36
1.4	Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi II	I-38
1.5	Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi III	I-39
1.6	Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi IV	I-41
1.7	Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi V	I-44
3.1	Pembangunan Pasar Serikat Tiku	III-9
3.2	Pembangunan Pasar Serikat Tiku.....	III-11

DAFTAR GRAFIK

Grafik

1.1	Gambaran tren SILPA dari Tahun 2019-2023.....	I-21
2.1	Nilai dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023.....	II-122
2.2	Perbandingan Angka Harapan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 – 2023.....	II-130
2.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Agam dan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2022.....	II-137

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian Indikator Makro Kabupaten Agam pada tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Indikator Makro Kabupaten Agam
Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023	Perubahan
1.	Indeks Pembangunan Manusia	73,29	73,98	0,69
2.	Angka Kemiskinan	6,22	6,6	0,38
3.	Angka Pengangguran	4,93	4,96	0,03
4.	Pertumbuhan ekonomi	4,21	4,52	0,31
5.	Pendapatan per kapita	43.936.800	47.405.310	3.468.510
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,298	0,255	0,043

Sumber : Data BPS Kabupaten Agam Tahun 2023

Berdasarkan data capaian kinerja Indikator Makro daerah di atas dapat dijelaskan sebagai :

1) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks ini mengukur capaian pembangunan manusia berbasis komponen yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak. Meningkatnya capaian IPM mengindikasikan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Agam semakin membaik. Namun dari sisi pertumbuhan, angka peningkatan IPM dari Tahun 2022 ke 2023 sangat kecil. Fakta ini perlu menjadi kajian untuk masa mendatang, dalam

rangka mengungkit peningkatan yang lebih signifikan, sehingga pertumbuhan IPM mengalami percepatan.

2) Angka Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin meningkat di Tahun 2023. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah korelasi dari meningkatnya garis kemiskinan pada Rp. 485.222 menjadi Rp. 530.290. Kondisi ini perlu dicermati dalam pengambilan kebijakan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah sehingga program-program yang dilaksanakan berdampak signifikan menekan angka kemiskinan.

3) Angka Pengangguran

Data ini menunjukkan bahwa terdapat 4.96 % penduduk yang aktif di pasar kerja yang belum terserap lapangan kerja yang ada. Kondisi ini perlu menjadi kajian pemerintah dalam mendorong pasar kerja dan dunia usaha, sehingga mampu menampung tenaga kerja di Kabupaten Agam.

4) Pertumbuhan ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi dipengaruhi tumbuhnya kontribusi dari kelompok lapangan usaha yang dominan di Agam seperti sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan, sektor Konstruksi dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Dengan berjalannya program-program recovery dan penguatan ekonomi daerah, memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara lingkup makro.

5) Pendapatan Per Kapita

Pertumbuhan PDRB perkapita meningkat seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi di tahun 2023 di angka 4,52. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Penduduk sebulan juga terus meningkat, seiring dengan meningkatnya pendapatan.

6) Ketimpangan Pendapatan

Pada tahun 2023 ketimpangan pendapatan masyarakat kabupaten Agam turun dibanding kondisi tahun sebelumnya. Data ini menginformasikan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat Agam berada pada tingkat ketimpangan rendah. Hal ini dilatarbelakangi oleh pendapatan penduduk pada golongan 20% penduduk berpendapatan tinggi turun di Tahun 2023. Sementara pendapatan penduduk pada golongan 40% penduduk berpendapatan rendah mengalami peningkatan.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/ informasi kinerja setiap urusan

pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan wajib dan pilihan serta urusan penunjang. Capaian kinerja urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kabupaten Agam pada Tahun 2023 secara rinci termuat dalam lampiran II tentang Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) outcome/hasil dan output/ keluaran Urusan Pemerintahan Konkrue serta IKK urusan penunjang.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam bentuk pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidak berhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian kinerja. Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2023, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pada bagian ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya disajikan secara rinci dan jelas. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran persasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

2.3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan mengukur capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2023. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{(2 \times \text{target}) - \text{Realisasi Target}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Agam serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut akan dikelompokkan berdasarkan kriteria peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Predikat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Predikat Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51% ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber :Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017

2.3.2 Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2023, dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja pembangunan daerah, serta untuk penguatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Agam, telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2023. Dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja dimaksud Pemerintah Kabupaten Agam mengacu pada RPJMD tahun 2021–2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun

20233 dan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Agam tahun 2023 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam Tahun 2023. Perjanjian Kinerja 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Target dan Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Misi 1 Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani			
Tujuan Terwujudnya Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Nagari yang Efektif, Efesien dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (61)
Sasaran 1 Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Nilai SAKIP	Nilai	BB (73)
	2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	Baik (78)
	3. Nilai EPPD	Nilai	31,400
Sasaran 2 Terselenggaranya birokrasi yang kapabel	1. Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Tingkat	tinggi (42)
	2. Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	58
	3. Indeks SPBE	Indeks	baik (2,9)
Sasaran 3 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks	84
	Persentase nagari dengan kategori cepat berkembang	Persen	48,9
Sasaran 4 Meningkatkan kinerja Pemerintahan Nagari	Indeks Pengelolaan Pemerintahan Nagari.	Indeks	453
Misi 2 Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui sumber daya optimalisasi sumber daya daerah dan pengembangan pariwisata			
Tujuan 2.1 Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat	Laju pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	Angka	2,95
	Laju pertumbuhan Ekonomi	Angka	4,25

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Sasaran 2.1.1 Meningkatnya nilai PDRB sektor pertanian dan usaha mikro	1. Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian (ADHK)	Angka	2,24
	2. Laju pertumbuhan pelaku usaha skala mikro	Angka	2
	3. Laju pertumbuhan nilai tambah usaha mikro (%)	Angka	2
Sasaran 2.1.2 Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata terhadap perekonomian daerah	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha akomodasi dan makan minum (ADHK)	Angka	4,39
	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah	799.000
Sasaran 2.1.3 Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kawasan	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha transportasi (ADHK)	Angka	4,57
	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	%	82
Sasaran 2.1.4 Meningkatnya nilai realisasi investasi	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	%	15
Misi 3 Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana			
Tujuan 3.1 Mewujudkan pembangunan dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, tata ruang dan mitigasi bencana	Tingkat kapasitas ketahanan daerah	Angka	Sedang
Sasaran 3.1.1 Berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam	1. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	70,39
Sasaran 3.1.2 Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang	1. Indeks kualitas terhadap tata ruang	Indeks	98,65
Sasaran 3.1.3 Berkurangnya resiko bencana terhadap manusia dan lingkungan	1. Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi	Indeks	79
Misi 4 Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter			
Tujuan 4.1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,84

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Sasaran 4.1.1 Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	1. Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	14,53
	2. Rata-rata lama sekolah	Angka	9,3
Sasaran 4.1.2 Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas	1. Angka Harapan Hidup	Angka	72,92
Tujuan 4.2 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang mandiri dan berdaya saing	Nilai produktivitas total daerah	Indeks	60
Sasaran 4.2.1 Meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat	1. Tingkat pengangguran terbuka	Angka	4,15
Sasaran 4.2.2 Meningkatkan daya saing pemuda	1. Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Angka	92
	2. Jumlah cabang olahraga berprestasi yang dibina	angka	38
Sasaran 4.2.3 Meningkatkan ketahanan pangan daerah	1. Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Indeks	90
Tujuan 4.3 Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan sosial	Indeks Kesejahteraan rakyat	Indeks	75,47
Sasaran 4.3.1 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1. Jumlah nagari dengan status IDM:		
	Mandiri	Jumlah	20
	Maju	Jumlah	59
	Berkembang	Jumlah	13
	2. Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	Angka	88,68
	3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)		97,10
Sasaran 4.3.2 Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang	4. Indeks perlindungan anak		63
	1. Total Fertility Rate	Angka	2,43
Misi 5 Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS - SBK			
Tujuan 5.1 Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan	Indeks Keamanan Masyarakat	Indeks	90,04

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya			
Sasaran 5.1.1 Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1. Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	Angka	5,02
	2. Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan	%	100
	3. Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran	%	100
	Persentase Nagari Madani pada Level V	%	17,07
Sasaran 5.1.2 Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya	1. Jumlah nagari Madani pada level:		
	Level V	Jumlah	14
	Level IV	Jumlah	23
	Level III	Jumlah	39
	Level II	Jumlah	6
	2. Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	%	75
	3. Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan	%	55

Sumber : Perjanjian Kinerja Bupati Agam Tahun 2023

2.3.3 Hasil Pengukuran Target Kinerja

Penilaian terhadap kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi/instansi selanjutnya. Hasil pengukuran capaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Agam berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Berdasarkan Target
Perjanjian Kinerja

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kriteria
Misi 1 Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani					
Tujuan 1.1 Terwujudnya Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Nagari yang Efektif, Efesien dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	B(61)	69,98	114,72	Sangat tinggi
Sasaran 1.1.1 Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Nilai SAKIP	BB(73)	B (66,91)	91,66	Sangat tinggi
	2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik (78)	Perlu perbaikan (70,32)	90,15	Tinggi
	3. Nilai EPPD	3,1400	3,4916	111,20	Sangat tinggi
Sasaran 1.1.2 Terselenggaranya birokrasi yang kapabel	1. Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Tinggi (42)	38,82	92,43	Sangat tinggi
	2. Indeks Profesionalitas ASN	58	65,48	112,90	Sangat tinggi
	3. Indeks SPBE	Baik (2,9)	Cukup (2,55)	87,93	Tinggi
Sasaran 1.1.3 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	84	84,53	100,63	Sangat tinggi
	Persentase Nagari dengan Kategori Cepat Berkembang	48,9	60,87	124,48	Sangat tinggi
Sasaran 1.2.1 Meningkatkan kinerja Pemerintahan Nagari	Indeks Pengelolaan Pemerintahan Nagari	453	454	100,22	Sangat tinggi
Misi 2 Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui sumber daya optimalisasi sumber daya daerah dan pengembangan pariwisata					
Tujuan 2.1 Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat	Laju pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	2,95	3,12	105,76	Sangat tinggi

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kriteria
	Laju pertumbuhan Ekonomi	4,25	4,52	106,35	Sangat tinggi
Sasaran 2.1.1 Meningkatnya nilai PDRB sektor pertanian dan usaha mikro	1. Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian (ADHK)	2,24	3,12	139,29	Sangat tinggi
	2. Laju pertumbuhan pelaku usaha skala mikro	2	2,65	132,5	Sangat tinggi
	3. Laju pertumbuhan nilai tambah usaha mikro (%)	2	2	100%	Tinggi
Sasaran 2.1.2 Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata terhadap perekonomian daerah	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha akomodasi dan makan minum (ADHK)	4,39	8,26	188,15	Sangat tinggi
	Jumlah kunjungan wisatawan	799.000	892.145	111,65	Sangat tinggi
Sasaran 2.1.3 Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kawasan	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha transportasi (ADHK)	4,57	5,74	125,60	Sangat tinggi
	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	82	74,27	90,57	Sangat tinggi
Sasaran 2.1.4 Meningkatnya nilai realisasi investasi	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	15	37,22	248,13	Sangat tinggi

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kriteria
Misi 3 Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana					
Tujuan 3.1 Mewujudkan pembangunan dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, tata ruang dan mitigasi bencana	Tingkat kapasitas ketahanan daerah	76,16 %	100%	131,30	Sangat Tinggi
Sasaran 3.1.1 Berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam	1. Indeks kualitas lingkungan hidup	70,39	72,61	103,15	Sangat tinggi
Sasaran 3.1.2 Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang	1. Indeks ketaatan terhadap tata ruang	98,65	99,98	101,35	Sangat tinggi
Sasaran 3.1.3 Berkurangnya resiko bencana terhadap manusia dan lingkungan	1. Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi	79	79	100	Sangat Tinggi
Misi 4 Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter					
Tujuan 4.1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	73,84	73,98	100,19	Sangat Tinggi
Sasaran 4.1.1 Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	1. Angka Harapan Lama Sekolah	14,53	13,89*	95,60	Sangat tinggi
	2. Rata-rata lama sekolah	9,3	9,22*	99,14	Sangat tinggi
Sasaran 4.1.2 Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas	1. Angka Harapan Hidup	72,92	73,23	100,43	Sangat tinggi
Tujuan 4.2 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang mandiri dan berdaya saing	Nilai produktivitas total daerah	60	88,52 juta	147,53	Sangat tinggi
Sasaran 4.2.1	1. Tingkat pengangguran terbuka	4,15	4,96	80,48	Tinggi

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kriteria
Meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat					
Sasaran 4.2.2 Meningkatkan daya saing pemuda	1. Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	92	91	98,91	Sangat tinggi
	2. Jumlah cabang olahraga berprestasi yang dibina	38	46	121,05	Sangat tinggi
Sasaran 4.2.3 Meningkatkan ketahanan pangan daerah	1. Indeks Ketahanan Pangan Daerah	90	86,40	96	Sangat tinggi
Tujuan 4.3 Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan daerah	Indeks Kesejahteraan rakyat	75,47	76,68	101,60	Sangat tinggi
Sasaran 4.3.1 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1. Jumlah nagari dengan status IDM:				
	Mandiri	20	30	150	Sangat tinggi
	Maju	59	47	79,66	Tinggi
	Berkembang	13	15	115,38	Sangat tinggi
	2. Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	88,68	90,25	101,77	Sangat tinggi
	3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,10	97%	99,90%	Tinggi
Sasaran 4.3.2 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang	4. Indeks perlindungan anak	63	70,70	112,22	Sangat tinggi
	1. Total Fertility Rate	2,43	2,55	95,06	Sangat tinggi
Misi 5 Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS – SBK					
Tujuan 5.1 Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan	Indeks Keamanan Masyarakat	90,04	91,3	101,40	Sangat tinggi

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kriteria
nilai-nilai agama, adat dan budaya					
Sasaran 5.1.1 Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1. Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	5,02	3,20	136,25	Sangat tinggi
	2. Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan	100	86	86	tinggi
	3. Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran	100	85	85	tinggi
	Persentase Nagari Madani pada Level V	17,07	10,87	63,68	Sedang
Sasaran 5.1.2 Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya	1. Jumlah nagari Madani pada level:				
	Level V	14	10	71,43	Sedang
	Level IV	23	49	213,04	Sangat tinggi
	Level III	39	28	128,20	Sangat tinggi
	Level II	6	4	133,33	Sangat tinggi
	2. Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	75	100	133,33	Sangat tinggi
	3. Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan	55	100	181,82	Sangat tinggi

Sumber : Hasil Evaluasi Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas terlihat bahwa dari 46 indikator kinerja tujuan dan sasaran pada RPJMD yang menjadi Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat 41 indikator kinerja dengan kriteria kinerja sangat tinggi, 4 indikator kinerja dengan kriteria kinerja tinggi, 1 indikator kinerja dengan kriteria sedang. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja instansi pemerintah berada pada kriteria sangat tinggi. Untuk analisa lebih dalam, dapat dijelaskan melalui analisis pengukuran kinerja per sasaran yang di kelompokkan berdasarkan Misi yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Agam periode 2021 – 2026 berikut ini.

2.3.3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Pada Misi I (Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Akuntabel dan Melayani)

Misi I pada RPJMD Tahun 2021 – 2026 memiliki tujuan “ Terwujudnya Pemerintah yang Efektif, Efesien dan Melayani”. Tujuan ini memiliki 2 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi I Tahun 2023
Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Efesien dan Melayani

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B (61)	B (69,98)	114,72
2.	Persentase Nagari dengan kategori cepat berkembang	persen	48,90	60,87	124,48

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKJIP Tahun 2023

Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Peraturan Menteri dimaksud merupakan pedoman evaluasi RB yang baru, karena dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, terjadi perubahan serta penajaman tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi secara nasional. Dengan begitu, Pemerintah Daerah termasuk Kabupaten Agam juga melakukan penyesuaian dan penajaman terhadap roadmap yang ada, dimana fokus pelaksanaan RB adalah terhadap RB General dan RB tematik.

RB General berfokus kepada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pada tingkat Pemerintah Kabupaten, pelaksanaan RB General berada pada level mikro yang merupakan implementasi kebijakan/ program yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso. Pelaksanaan RB General pada level mikro harus didasari pada

dua dimensi yaitu :

1. Dimensi prioritas nasional, yang sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang ditetapkan pada level makro dan meso yang bersifat *mandatory*.
2. Dimensi prioritas instansional, merupakan kegiatan utama inisiatif yang mengakomodir pemecahan masalah tata kelola internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang masih ditemui dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

Dan untuk mendukung pelaksanaan 2 dimensi tersebut, terdapat 21 kegiatan utama yang menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti.

Sedangkan RB tematik merupakan upaya untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif. Terdapat 5 tematik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2023, sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi saat ini. Walaupun secara umum, instansi pemerintah diberi keleluasaan untuk memilih satu atau lebih tema dari lima tema yang diangkat sebagai fokus RB tematik, namun Pemerintah Kabupaten Agam menetapkan seluruh tema tersebut untuk ditetapkan dalam RB Tematik Kabupaten Agam. Hal ini disebabkan karena seluruh tema tersebut relevan dengan persoalan dan isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Adapun 5 tema dimaksud adalah :

1. Penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan nilai investasi
3. Digitalisasi pemerintahan fokus penanganan stunting
4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
5. Pengendalian laju inflasi

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluator Nasional, Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 adalah 69,98 dengan kategori B. Capaian realisasi tahun ini telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 61 (B) dengan tingkat capaian sebesar 114,72%. Capaian Kabupaten Agam tahun ini juga telah melebihi rata – rata capaian indeks RB Kabupaten/ Kota Se- Indonesia yang mencapai 59,32. Berikut disampaikan hasil evaluasi Tim Evaluator Pusat terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Agam sesuai dengan LKE sebagai berikut :

Tabel 2.6
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023
Berdasarkan LKE KEMENPANRB

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Persentase capaian (%)	Catatan	Rekomendasi
	RG GENERAL					
1.	Rencana Aksi pembangunan RB general	3	1,5	50	1. Penetapan target atas kegiatan utama belum sepenuhnya didasarkan pada kondisi capaian tahun-tahun sebelumnya; 2. Belum terdapat keabsahan atas rencana aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; 3. Indikator Output atas rencana aksi sudah relevan, namun belum cukup menggambarkan sasaran yang ingin diwujudkan; 4. Penetapan target atas output belum sepenuhnya didasarkan pada target sasaran kegiatan utama; 5. Rencana aksi belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai.	1. Menetapkan target atas kegiatan utama berdasarkan kondisi capaian tahun-tahun sebelumnya; 2. Menetapkan keabsahan atas rencana aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; 3. Memastikan seluruh indikator output atas rencana aksi cukup menggambarkan sasaran; 4. Melakukan reuiu agar target atas Output didasarkan pada target sasaran kegiatan utama; 5. Melakukan reuiu agar rencana aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi.
2.	Tingkat implementasi rencana aksi pembangunan RB General	7	3,34	47,71		
3.	Persentase penyederhanaan struktur organisasi	2	2	100	Sangat Baik dengan Capaian 100,71%	Agar segera ditetapkan Perkada tentang SOTK pasca penyederhanaan struktur organisasi agar dapat ditindaklanjuti ke tahap penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.
4.	Tingkat capaian sistem kerja	2	0,8	40	segera ditetapkan menjadi peraturan	segera ditetapkan menjadi

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Persentase capaian (%)	Catatan	Rekomendasi
	untuk penyederhanaan birokrasi					peraturan
5.	Tingkat maturitas SPIP	4	2,48	62	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat sasaran strategis Perangkat Daerah yang belum berorientasi hasil 2. Masih terdapat indikator yang belum memenuhi kriteria spesifik, relevan dan cukup dalam mengukur pencapaian sasaran strategis 3. Masih terdapat target kinerja yang indikator kinerja nya tidak SMART 4. SDM belum memahami identifikasi risiko dan perumusan pengendalian yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan. 5. SDM belum memahami pengelolaan risiko yang memadai sehingga risiko yang dirumuskan belum sepenuhnya digunakan dalam menyusun perencanaan. Baru sebatas inspektorat yang menggunakan identifikasi risiko dalam perencanaan kegiatannya. 6. Masih rendahnya pemahaman sumber daya manusia di seluruh OPD terkait pengelolaan risiko kecurangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong perbaikan kualitas perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome dan memenuhi kriteria SMART 2. Agar Bappeda dan Inspektorat mengintensifkan pembinaan dalam rangka pelaksanaan Manajemen Risiko yang memadai dan substantif dalam merumuskan risiko, pengendalian, hingga monitoring pelaksanaan pengendalian. 3. Agar Bappeda dan Inspektorat mengintensifkan pembinaan dalam rangka pelaksanaan Manajemen Risiko yang memadai dan substantif dalam merumuskan risiko, pengendalian, hingga monitoring pelaksanaan pengendalian sehingga dapat digunakan dalam menyusun dan mempertimbangkan perencanaan. 4. Mengalokasikan sumberdaya (utamanya anggaran) yang memadai untuk pembinaan dan

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Persentase capaian (%)	Catatan	Rekomendasi
						<p>peningkatan kompetensi SDM terkait pengelolaan risiko (termasuk risiko kecurangan) pada pemerintah daerah.</p> <p>5. Berkoordinasi dengan BPKP untuk pembinaan pengelolaan risiko kecurangan pada pemerintah daerah.</p>
6.	Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	3,5	0,5	14,29	<p>Tingkat keberhasilan pembangunan ZI sebesar 0% (Cukup) dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2021 Jumlah unit yang diusulkan: 4 unit kerja Jumlah unit yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM: 0 unit kerja Tahun 2022 Jumlah unit yang diusulkan: 0 unit kerja Jumlah unit yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM: 0 unit kerja Tahun 2023 Jumlah unit yang diusulkan: 2 unit kerja Jumlah unit yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM: 0 unit kerja</p>	<p>Agar mengusulkan hasil pembangunan unit kerja Zona Integritas kepada TPN</p>
7.	Nilai SAKIP	4	2,68	67	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cascading/ penjenjangan kinerja yang disusun di level Pemerintah Daerah maupun PD belum mempertimbangkan logical framework dan critical success factor dalam proses penyusunannya; 2. Belum memiliki pedoman pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang lengkap termasuk mekanisme pemanfaatan aplikasi pengukuran kinerja; 3. Laporan kinerja Pemerintah Daerah belum sepenuhnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mereviu kembali dokumen penjenjangan kinerja (cascade down) dengan mengacu pada Permenpan RB No.89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Mengoptimalkan aplikasi e-sakip sebagai alat untuk pemantauan pencapaian kinerja Bupati dan setiap PD sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Persentase capaian (%)	Catatan	Rekomendasi
					<p>mengungkapkan seluruh informasi tentang proses pencapaian kinerja, sehingga analisis keberhasilan dan kegagalan dari kinerja belum sepenuhnya tergambar;</p> <p>4. Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja belum dilakukan secara berkala, sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja PD dan Pemkab;</p> <p>5. Informasi hasil evaluasi lebih rinci dapat dilihat pada LHE SAKIP 2023 Intansi Pemerintah.</p>	<p>lainnya;</p> <p>3. Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan kinerja;</p> <p>4. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan PD;</p> <p>5. Informasi hasil evaluasi lebih rinci dapat dilihat pada LHE SAKIP 2023 Intansi Pemerintah.</p>
8.	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE	2,5	0	0	Belum menyusun Arsitektur SPBE dalam SIA	Perlu menyusun Arsitektur SPBE as-is dalam SIA
9.	Tingkat Digitalisasi Arsip	2.5	49.88	1.25	Penjelasan terkait hasil tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	
10.	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2.5	4	2		Perlu Melaksanakan Sosialisasi
11.	Indeks Kualitas Kebijakan	2.5		0	Nilai "nol" dan membutuhkan perhatian	
12.	Indeks Reformasi Hukum	2.5		0	Belum melaksanakan penilaian Indeks Reformasi Hukum.	Dalam Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum perlu diberi pendampingan dan pemahaman.
13.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik	2.5	2	1	Penyelenggaraan statistik sektoral di Pemerintah Kabupaten Agam masih	Pemerintah Kabupaten Agam perlu menyusun suatu

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Persentase capaian (%)	Catatan	Rekomendasi
	Sektoral				berada pada predikat Cukup. - Penerapan Aspek Standar Data Statistik, Metadata Statistik, Kode Referensi dan/atau Data Induk, sudah dilakukan oleh seluruh produsen data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, namun menggunakan standar/pedoman yang berbedabeda di setiap Produsen Data.	kebijakan/kaidah baku tentang penerapan Aspek Standar Data Statistik, Metadata Statistik, Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi dan/atau Data Induk berupa dokumen kebijakan bagi seluruh unit produsen data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
14.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2.5	77.89	1.95	Baik	Selamat atas prestasi yang diraih. Tingkatkan pencapaian khususnya untuk keterisian Formasi Jabfung Pengelola PBJ
15.	Indeks Sistem Merit	4	278	2.71		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi, menyempurnakan, dan mengakselerasi penetapan SKJ untuk semua jenis dan level jabatan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; 2. Melakukan assessment terhadap seluruh pegawai, dengan Standar Kompetensi Jabatan yang sudah ditetapkan dan mengakselerasi penyusunan profil pegawai untuk pemetaan pegawai berdasarkan kompetensi/talenta secara berkala; 3. Membangun talent pool dan menyusun rencana suksesi secara komprehensif untuk

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Persentase capaian (%)	Catatan	Rekomendasi
						<p>seluruh pegawai dan jabatan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020;</p> <p>4. Menyempurnakan serta menyusun program dan strategi pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai yang berbasis pada kesenjangan kompetensi dan kinerja, baik dalam bentuk klasikal maupun non klasikal, yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018;</p> <p>5. Melaksanakan pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas secara terbuka dan kompetitif dengan metode assessment dan/atau berpedoman kepada peraturan internal terkait manajemen talenta;</p> <p>6. Mengimplementasikan strategi untuk mengatasi permasalahan kinerja sebagai tindak lanjut dari hasil analisis kinerja.</p>
16.	Indeks Pelayanan Publik	1.5	4.22	1.27		
17.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1.5	92.58	1.39		
18.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	2.55	4.59		Rekomendasi dapat dilihat pada Laporan Hasil Evaluasi

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Persentase capaian (%)	Catatan	Rekomendasi
						yang dapat diakses melalui aplikasi tauval.spbe.go.id
19.	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	100	2		
20.	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8	48.94	2.62		
21.	Opini BPK	5	5	5		
22.	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	84.9	3.4		
23.	Indeks BerAkhlak	4	62.9	2.52	Cukup Sehat	
24.	Survei Penilaian Integritas	10	77.19	7.72	waspada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki mendasar terhadap proses promosi dan mutasi pegawai dengan internalisasi aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan; 2. Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, hingga tidak ada lagi pegawai yang menerima suap/gratifikasi dari pengguna layanan di instansi.; 3. Perbaiki mendasar dan menyeluruh terhadap pengawasan internal agar lebih proaktif, seperti audit berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran dalam bentuk penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Persentase capaian (%)	Catatan	Rekomendasi
						<p>kegiatan.;</p> <p>4. Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan serta memastikan hal-hal berikut:</p> <p>(1) Implementasi proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Internalisasi terkait dengan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. (3) Penguatan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa. (4) Mengintensifkan penggunaan vendor management system. (5) Pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan. (6) Penyesuaian proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.;</p>

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Persentase capaian (%)	Catatan	Rekomendasi
						<p>5. Perbaikan mendasar dan menyeluruh dalam proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi.;</p> <p>6. Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan dengan memastikan hal-hal berikut:</p> <p>(1) Menegakkan sanksi/hukuman terkait pelaksanaan tugas berdasarkan kode etik dan/atau regulasi internal lainnya secara adil dan konsisten. (2) Internalisasi larangan intervensi yang tidak sesuai aturan dalam pelaksanaan tugas terhadap seluruh pegawai/ pimpinan di instansi disertai contoh dari pimpinan. (3) Implementasi kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi. (4) Mengintensifkan upaya peningkatan integritas bagi calon pimpinan/pejabat di instansi dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki</p>

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Persentase capaian (%)	Catatan	Rekomendasi
						<p>sebelum menjabat dan secara tahunan. (5)</p> <p>Penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi intervensi dan benturan kepentingan sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.;</p> <p>7. Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN, meskipun sebagian besar responden menganggap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi.;</p> <p>8. Mempertahankan penyediaan kemudahan akses bagi pihak eksternal untuk mendapatkan informasi terkait tugas/layanan dan untuk mengurus tugas/layanan, meskipun sebagian besar responden menganggap penyediaan akses layanan sudah baik.;</p> <p>9. Perbaiki mendasar terhadap upaya peningkatan prosedur layanan yang sudah dilakukan dengan memastikan berbagai hal berikut: (1) Proses bisnis yang sederhana dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. (2) Optimalisasi</p>

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Persentase capaian (%)	Catatan	Rekomendasi
						penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan layanan yang diberikan. (3) Evaluasi dan memotret sudut pandang pengguna layanan terkait dengan prosedur dan kejelasan layanan."
25.	Survei Kepuasan Masyarakat	8	84.53	6.76		Tetap melaksanakan SKM dan melakukan evaluasi hasil SKM secara konsisten
26.	Koefisien	10				
27.	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0.4	0.18	0.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema terkait; 2. Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah belum mampu menjawab sasaran yang ditentukan; 3. Perumusan indikator belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup; 4. Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi; 5. Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait; 2. Memastikan Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah mampu menjawab sasaran yang ditentukan; 3. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup; 4. Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi; 5. Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain.

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Persentase capaian (%)	Catatan	Rekomendasi
28.	Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0.4	0.2	0.2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema terkait; 2. Perumusan indikator belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup; 3. Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi; 4. Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait; 2. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup; 3. Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi; 4. Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain.
29.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0.4	0.18	0.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema terkait; 2. Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah belum mampu menjawab sasaran yang ditentukan; 3. Perumusan indikator belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup; 4. Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait; 2. Memastikan Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah mampu menjawab sasaran yang ditentukan; 3. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup; 4. Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan &

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Persentase capaian (%)	Catatan	Rekomendasi
					informasi, dan inovasi; 5. Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan.	penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi; 5. Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain.
30.	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0.4	0.4	0.4		
31.	Pengendalian Infasi (Rencana Aksi)	0.4	0.17	0.17	1. Penetapan sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema terkait; 2. Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah belum mampu menjawab sasaran yang ditentukan; 3. Perumusan indikator belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup; 4. Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi; 5. Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan.	1. Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait; 2. Memastikan Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah mampu menjawab sasaran yang ditentukan; 3. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup; 4. Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi; 5. Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain.
32.	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0.6	95.83	0.26		

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Persentase capaian (%)	Catatan	Rekomendasi
33.	Realisasi Investasi (Capaian Output)	0.6	100	0.3		
34.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	0.6	100	0.27		
35.	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0.6	100	0.6		
36.	Pengendalian Infasi (Capaian Output)	0.6	100	0.26		
37.	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1.5	1.5		
38.	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1.64	1.64		
39.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	0.56	0.56		
40.	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2.9	2.9		
41.	Pengendalian Infasi (Capaian Dampak)	3	1.08	1.08		

Sumber : Hasil Evaluasi RB Pemerintah Daerah Kab. Agam Tahun 2023

Indikator tujuan kedua pada Misi I adalah Persentase Nagari dengan Kategori Cepat Berkembang, diukur berdasarkan hasil evaluasi perkembangan nagari. Nagari dengan kategori cepat berkembang menunjukkan bahwa nagari/desa tersebut memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur memadai serta pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan yang sangat baik. Evaluasi perkembangan desa/nagari merupakan upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrument evaluasi perkembangan desa/ nagari. Adapun bidang urusan yang dievaluasi adalah :

- Bidang pemerintahan (pemerintahan, kinerja, inisiatif dan kreatifitas dalam pemberdayaan masyarakat, desa berbasis teknologi informasi serta pelestarian adat dan budaya).
- Bidang kewilayahan (identitas, batas, inovasi, tanggap dan siaga bencana, pengaturan investasi).
- Bidang kemasyarakatan (partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, keamanan dan ketertiban, pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kapasitas masyarakat).

Tingkat perkembangan nagari terdiri atas 3 tingkatan, yaitu :

- Kategori kurang berkembang dengan skor ≤ 300 .
- Berkembang dengan skor 301 – 450.
- Kategori cepat berkembang dengan skor ≥ 451 .

Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023, tidak ada lagi nagari di Kabupaten Agam yang masuk dalam kategori kurang berkembang, nagari kategori berkembang sebanyak 36 nagari (39,13%) sedangkan nagari dengan kategori cepat berkembang sebanyak 56 nagari (60,87%). Capaian tahun ini telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 48,9% atau 45 nagari. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi perkembangan nagari adalah tingginya partisipasi masyarakat, kinerja pemerintahan, inovasi, pemanfaatan teknologi serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah. Walaupun capaian Tahun 2023 telah melebihi target, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala, antara lain :

- Beberapa nagari masih belum sepenuhnya melakukan peningkatan kapasitas aparatur
- Masih ada beberapa nagari yang belum memahami konsep evaluasi tingkat perkembangan desa/nagari, sehingga penginputan data nagari sering terlambat.
- Pergantian penanggung jawab aplikasi

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Nagari selaku Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan nagari selalu melakukan pendampingan dalam pemenuhan indikator – indikator penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Adapun bentuk pendampingan antara lain bimbingan teknis, workshop serta monitoring dan evaluasi.

Adapun pencapaian tujuan pada misi I ini, didukung melalui 4 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan per sasaran sebagai berikut :

A. Pengukuran Kinerja Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel

Kinerja sasaran strategis “ terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel “ tergambar pada capaian 3 indikator kinerja utama, sebagai berikut :

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023
Terselenggaranya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target PK	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Nilai SAKIP	Nilai	BB (73)	B (66,91)	91,66
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	Baik (78)	Perlu Perbaikan (70,32)	90,15
3.	Nilai EPPD	Nilai	3,1400	3,4916	111,20

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

1) Nilai SAKIP

Nilai SAKIP merupakan salah satu indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Nilai SAKIP daerah didapatkan berdasarkan hasil evaluasi Tim evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap implementasi SAKIP pada lembaga/instansi yang ada. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/191/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, Nilai SAKIP Kabupaten Agam tahun 2023 adalah 66,91 dengan predikat “B”, sedikit lebih baik dibandingkan tahun 2022 dengan nilai 66,43. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “baik”, artinya implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Adapun rincian komponen penilaian SAKIP Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Nilai SAKIP Kabupaten Agam Tahun 2023

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
A	Perencanaan Kinerja	30	21,77
B	Pengukuran Kinerja	30	18,62
C	Pelaporan Kinerja	15	10,61
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,91
	Nilai hasil evaluasi	100	66,91
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP Kab.Agam Tahun 2023

Beberapa upaya perbaikan yang telah dilakukan sebagai upaya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi SAKIP Pemda Kab. Agam tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Matrik Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No	Hasil Evaluasi	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian
1	Perencanaan Kinerja						
	Pedoman perencanaan yang secara komprehensif dapat digunakan sebagai panduan dalam penyusunan perencanaan daerah belum disusun	Menyusun pedoman SAKIP Agam dengan memastikan minimal aspek perencanaan, pengumpulan dan pengukuran data kinerja, penyusunan laporan kinerja serta evaluasi internal	1. Menyusun draft pedoman perencanaan secara komprehensif	1 dokumen	Juni-Juli 2023	Bappeda	Sudah selesai
			2. Pembahasan draft	1 dokumen			
			3. Penetapan keputusan bupati	1 dokumen			
	Penjenjangan kinerja belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya berdasarkan <i>logical framework dan critical success factor</i> (CSF) atas pencapaian kinerja, sehingga belum menggambarkan hubungan sebab akibat dan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi	Menyusun perjenjangan kinerja sesuai dengan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 untuk seluruh level organisasi, dan dijadikan dasar untuk menyempurnakan rumusan sasaran strategis berserta indikatornya dari level Pemda sampai level Perangkat Daerah	Pendampingan berupa bimtek penyusunan penjenjangan kinerja untuk seluruh OPD dan TIM SAKIP	Perangkat daerah mampu menyusun Penjenjangan kinerja sesuai dengan Permenpano 89 tahun 2021	Minggu ke- 4 Juni 2023	Bappeda, Bagian Organisasi	Sudah selesai
	Terdapat sasaran yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum SMART pada Perjanjian Kinerja (PK) Bupati dan Perangkat Daerah tahun 2022		1. Melanjutkan asistensi keselarasan indikator kinerja perangkat daerah dengan kepala daerah yang belum SMART-C	Indikator kinerja yang SMART-C	Juli-Agustus 2023	Bappeda, Bagian Organisasi	Sudah selesai

No	Hasil Evaluasi	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian
			2. Menindaklanjuti hasil asistensi ke dalam dokumen perencanaan	Revisi dokumen perencanaan OPD	disesuaikan dengan jadwal penyusunan dokumen perencanaan	Bappeda	
	Beberapa perangkat daerah yang belum menyampaikan PK 2022 dan belum memiliki rencana aksi yang mendukung pencapaian kinerja pada PK	Memastikan seluruh Perangkat daerah menyusun Perjanjian Kinerja dan rencana aksi	1. Inventarisasi OPD yang belum menyampaikan PK dan rencana aksi	PK dan rencana aksi OPD secara berjenjang	Februari-Maret 2023	Bagian Organisasi	Sudah selesai
			2. Melakukan movev	Seluruh OPD	per tri wulan	Bagian Organisasi	Dilaksanakan secara berkala
2.	Pengukuran Kinerja						
	Belum terdapat pedoman mengenai pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang lengkap termasuk mekanisme pemanfaatan aplikasi pengukuran kinerja		Menyusun pedoman pengumpulan dan pengukuran data kinerja (terintegrasi dengan pedoman perencanaan)	1 dokumen	Juni-Juli 2023	Bappeda	Sudah selesai
	Aplikasi e-sakip tidak dapat beroperasi sehingga belum bisa dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas AKIP khususnya terkait dengan proses monitoring dan evaluasi kinerja berkala	Memaksimalkan aplikasi E SAKIP untuk memonitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan menggunakan hasil monitoring dan evaluasi dijadikan dasar penyesuaian kondisi dan strategi untuk mencapai kinerja maksimal	Mengembangkan aplikasi E-SAKIP	1 aplikasi	Maret - Desember 2023	Dinas Kominfo, Bagian Organisasi	Sedang tahap uji coba dan pengembangan aplikasi
	Pengukuran kinerja organisasi belum diikuti dengan proses pembaruan target dan strategi dalam upaya memastikan pencapaian kinerja maksimal di akhir periode	Memastikan target kinerja memperhitungkan capaian periode sebelumnya	Mempedomani hasil evaluasi capaian tahun lalu untuk penetapan target kinerja tahun berikutnya	Penyesuaian target kinerja dengan hasil evaluasi	Juli-Agustus 2023	Bappeda dan Bagian Organisasi	Sudah dilaksanakan

No	Hasil Evaluasi	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian
	Beberapa indikator belum dilengkapi dengan definisi operasional yang jelas dan lengkap		Menyempurnakan definisi operasional indikator kinerja	Semua indikator kinerja memiliki definisi operasional yang terukur	Juli-Agustus 2023	Bappeda dan Bagian Organisasi	Sudah dilaksanakan
3.	pelaporan kinerja						
	Laporan kinerja perangkat daerah belum seluruhnya dipublikasikan untuk bisa diakses oleh masyarakat	Meningkatkan kualitas Laporan kinerja Perangkat daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, dan memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan kinerja	mengintruksikan kepada seluruh OPD untuk mengupload dan mengupdate dokumen laporan kinerja pada aplikasi PPID	Surat edaran Bupati	Minggu ke 4 Juni 2023	Kominfo	Sudah dilaksanakan
	Inspektorat belum melakukan reviu secara komprehensif dan mengeluarkan pernyataan reviu untuk seluruh laporan kinerja PD	Mendorong inspektorat melakukan reviu terhadap seluruh laporan kinerja PD sebelum dipublikasi untuk memastikan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan kinerja tersebut	1. Menyusun jadwal reviu 2. Melaksanakan reviu		September 2023 Januari-Februari 2024	Inspektorat daerah Inspektorat daerah	Sudah dilaksanakan Sudah dilaksanakan
	laporan kinerja pada pemda dan sebagian besar PD belum memberikan analisis yang memadai atas faktor pendorong maupun penghambat keberhasilan capaian kinerja, perbandingan data kinerja antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, serta strategi perbaikan untuk tahun kedepannya		1. Melakukan bimbingan teknis penyusunan dokumen LKjIP 2. Desk penyusunan Laporan kinerja 3. Rapat / ekspose evaluasi capaian kinerja perangkat	Dokumen LKjIP Seluruh Kepala OPD menyampaikan	Desember 2023 Januari-Februari 2024 Januari - Februari 2024		Tidak jadi dilaksanakan karena keterbatasan anggaran Sudah selesai Belum terlaksana

No	Hasil Evaluasi	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian
			daerah (penilaian kinerja OPD)	capaian kinerja sesuai PK di hadapan pimpinan			
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal						
	Belum memiliki pedoman evaluasi SAKIP yang digunakan untuk menilai tingkat implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas evaluasi internal atas implementasi SAKIP Perangkat daerah agar mampu memberikan penilaian dan rekomendasi yang berkualitas sebagai upaya perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja	1.Mengevaluasi perbup nomor 20 tahun 2019	Evaluasi perbup	Maret 2023	Inspektorat daerah	Sudah dilaksanakan
			2. Menyusun pedoman evaluasi SAKIP sesuai dengan Permenpan No 88 tahun 2022	Perbup pedoman evaluasi SAKIP	Juli 2023	Inspektorat daerah	Sudah dilaksanakan
	Pelaksanaan evaluasi yang telah dilaksanakan belum didukung dengan Quality Assurance yang memadai	Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi internal yang diberikan untuk perbaikan berkelanjutan kepada seluruh Perangkat Daerah	Monitoring penyampaian tindak lanjut rekomendasi APIP oleh Perangkat daerah	Matriks tindak lanjut	sesuai ketentuan kegiatan	Inspektorat daerah	Sudah dilaksanakan
	Laporan hasil evaluasi internal belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang cukup dan mendalam untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap Perangkat daerah		1.Meningkatkan kapasitas APIP	untuk seluruh APIP	Jadwal menyesuaikan	Inspektorat daerah	Sudah dilaksanakan
			2.Meningkatkan kapasitas evaluator internal OPD	Seluruh perangkat daerah	Jadwal menyesuaikan	Inspektorat daerah	Sudah dilaksanakan

Sumber : Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Kab.Agam Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut beberapa kelemahan yang masih ditemui dalam penerapan SAKIP di Kabupaten Agam dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur/ measurable, relevan dan cukup.;
2. *Cascading* / penjenjangan kinerja yang disusun di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah belum mempertimbangkan logical framework dan critical succes factor dalam pproses penyusunannya;;
3. Dalam melakukan pengukuran kinerja belum memiliki pedoman pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang lengkap termasuk mekanisme pemanfaatan aplikasi pengukuran kinerja;
4. Pengukuran kinerja organisasi belum diikuti dengan proses pembaruan target dan strategi dalam upaya memastikan pencapaian kinerja maksimal di akhir periode;
5. Terdapat penetapan target PK level Bupati maupun Perrangkat Daerah yang berada di bawah capaian tahun 2022;
6. Pelaporan kinerja telah disusun dan telah diublikasikan, namun informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya;
7. Laporan kinerja Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mengungkapkan seluruh informasi tentang proses pencapaian kinerja, sehingga analisis keberhasilan dan kegagalan dari kinerja belum sepenuhnya tergambar;
8. Laporan kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah belum seluruhnya diunggah/ dipublikasikan dalam website kabupaten;
9. Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja belum dilakukan secara berkala, sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja perrangkat daerah dan pemerintah kabupaten;
10. Hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja sevara signifikan serta belum dimanfaatkan sebagai alat dalam memberikan reward dan punishment kepada Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, beberapa rekomendasi yang disarankan dilakukan adalah :

1. Melakukan review dan perbaian dokumen perencanaan setiap perangkat daerah dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap Perangkat Daerah telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*) dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART (*spesific, measurable, achievable, relevant dan time-bound*);
2. Mereview kembali dokumen penjenjangan kinerja (*cascade down*) dengan mengacu pada

Permenpan RB No 89 Tahun 2021 tentang Penenjangkan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Mengoptimalkan aplikasi e-sakip sebagai alat untuk pemantauan pencapaian kinerja Bupati dan setiap perangkat daerah sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya;
4. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemantauan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN;
5. Melakukan review kembali terhadap penetapan target yang diperanankan tiap tahunnya yang selaras dengan hasil capaian sehingga mampu menggambarkan target kinerja yang seharusnya dicapai;
6. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja dengan mengacu kepada Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dan memanfaatkan laporan tersebut untuk perbaikan perencanaan kinerja;
7. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP unit kerja secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
8. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga mampu memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
9. Menyusun kebijakan reward and punishment dengan memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga dapat menjadi penyemangat setiap perangkat daerah untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP.

2) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja pengelolaan keuangan di daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdapat 6 dimensi yang dinilai yaitu : kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah serta Opini BPK terhadap laporan keuangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-387 Tahun 2023 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2022, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 yang dinilai berdasarkan data tahun 2022 adalah sebesar 70,32 dengan kategori perlu perbaikan. Capaian ini lebih rendah dari target yang

ditetapkan sebesar 78 (baik). Adapun hasil penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023

No	Dimensi	Bobot (%)	Indeks (%)	Tingkat Capaian (%)
1.	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (D1)	15	11,197	74,65
2.	Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (D2)	20	19,828	99,14
3.	Transparansi pengelolaan keuangan (D3)	15	7,241	48,27
4.	Penyerapan anggaran (D4)	20	15	75
5.	Kondisi keuangan daerah (D5)	15	2,054	13,69
6.	Opini BPK (D6)	15	15,000	100
TOTAL			70,32	
Nilai			B	

Sumber : SK Mendagri Nomor 900.1.15.3-387 Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terdapat 2 dimensi penilaian IPKD yang memiliki nilai rendah yaitu transparansi pengelolaan keuangan dan kondisi keuangan daerah, sedangkan nilai tertinggi adalah dimensi Opini BPK terhadap laporan keuangan yang mencapai 100%. Adapun beberapa permasalahan dan masih perlu perbaikan sebagai berikut :

1. Dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah menunjukkan ketepatan waktu menyampaikan dan keteraksesan data dan informasi pengelolaan keuangan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 bahwa setiap dokumen keuangan wajib disampaikan kepada masyarakat dalam masa penyajian informasi dokumen paling lama 30 hari kalender setelah ditetapkan. Disamping itu, data tersebut harus dapat diakses secara umum dan terbuka untuk publik melalui situs jaringan resmi pemerintah atau melalui SIPD. Penanggung jawab transparansi pengelolaan keuangan daerah ini adalah Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) yang ada di seluruh Perangkat Daerah. Rendahnya capaian dimensi ini lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran / kelalaian PPID setiap Perangkat Daerah untuk mengunggah dokumen tepat waktu, sehingga menimbulkan keterlambatan dalam menyampaikan data dan informasi (maksimal 30 hari tidak terpenuhi). Di samping itu, tidak semua PPID yang taat untuk mengunggah semua dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan melalui situs jaringan resmi pemerintah.
2. Dimensi Kondisi Keuangan Daerah adalah kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini ditunjukkan salah satunya melalui kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam

membiayai sendiri kegiatan pemerintah di daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Nilai kemandirian keuangan daerah dapat diketahui dari rasio antara total PAD dengan total pendapatan. Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Agam tahun 2023 sebesar 10,6%, artinya besar total PAD hanya 10,6% dari total pendapatan.. Adapun beberapa hal yang menyebabkan masih rendahnya kemandirian keuangan daerah antara lain :

- Masih rendahnya kepatuhan dan kesadaran objek pajak dalam membayar pajak dan retribusi.
 - Belum tergalinya potensi pajak dan sumber pendapatan lainnya
 - Pemutakiran data objek pajak PBB belum dilakukan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Agam
 - Keterbatasan SDM dan rentang kendali yang cukup jauh bagi Perangkat Daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Agam
3. Masih ditemukan beberapa program yang ada di dokumen RPJMD tetapi tidak ditemukan pada dokumen APBD, di samping itu besaran pagu anggaran juga tidak sesuai antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mampu membiayai seluruh program yang ada, sehingga program yang dibiayai adalah yang mendukung prioritas daerah tahun 2022. Sedangkan terkait ketidaksesuaian besaran pagu antara dokumen perencanaan dan penganggaran karena pagu anggaran pada dokumen perencanaan bersifat indikatif, sedangkan pada dokumen anggaran sudah pada tahap pelaksanaan kegiatan dan telah melewati mekanisme pembahasan bersama TAPD.
4. Masih terdapat beberapa rekening anggaran yang serapannya masih rendah (di bawah 80%). Banyak faktor yang mempengaruhi serapan anggaran, antara lain ketepatan perencanaan, kesesuaian rekening serta ketersediaan waktu pelaksanaan anggaran. Di samping itu penetapan standar harga satuan yang tinggi juga menjadi pemicu banyaknya SiLPA atau selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran, karena sisa anggaran tersebut tidak dapat dibelanjakan. Untuk itu kedepan, perencanaan penganggaran perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga serapan anggaran meningkat.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, beberapa saran tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain :

1. Mendorong Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pembinaan PPID untuk melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan seluruh PPID terkait kewajiban mengunggah data dan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah di situs resmi pemerintah paling lama 30 hari sejak dokumen tersebut ditetapkan.
2. Mensosialisasikan kepada publik bahwa data dan informasi pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten dapat diakses secara umum dan terbuka oleh publik melalui situs resmi pemerintah.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
4. Melakukan sosialisasi serta menerapkan punish dan reward terhadap masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak dan retribusi
5. Melakukan kajian terkait potensi ajak dan retribusi serta melakukan updating potensi PBB
6. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam pemungutan pajak dan retribusi
7. Mengawal keselarasan program dan kegiatan serta penganggaran mulai dari dokumen perencanaan sampai dengan penganggaran
8. Memaksimalkan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan

3) Nilai EPPD

Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) merupakan salah satu indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah baik secara keseluruhan (makro) maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Nilai EPPD ini dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang disampaikan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 yang disampaikan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota Tahun 2022, nilai EPPD Kabupaten Agam adalah 3,4916 (tinggi).

Capaian ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 3,1400 (tinggi) dengan tingkat capaian sebesar 111,20%. Jika dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten lain di Indonesia, capaian Nilai EPPD Kabupaten Agam cukup membanggakan karena berada pada peringkat 21 nasional. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Agam telah melakukan upaya yang keras dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Kondisi ini dapat dicapai karena adanya peningkatan kinerja OPD serta keseriusan OPD dalam melengkapi data dukung.

Di samping itu, capaian tahun 2023 juga didukung oleh capaian kinerja indikator makro yang sudah berada pada kategori baik. Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.11
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel Tahun 2022 Dengan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Nilai SAKIP	BB (71)	B (66,43)	93,56	BB (73)	B (66,91)	91,66
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72 (perlu Perbaikan)	71,58 (perlu Perbaikan)	99,42	Baik (78)	70,32 (perlu perbaikan)	90,15
3.	Nilai EPPD	3,1350	2,9670	94,64%	3,1400	3,4916	111,20

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2022 dengan tahun 2023. Realisasi kinerja Nilai SAKIP tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 walaupun tidak signifikan sebanyak (0,48) poin. Namun tingkat capaian kinerja mengalami penurunan, dimana 93,56% pada tahun 2022 dan 91,66% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena peningkatani target setiap tahun tidak sebanding dengan peningkatan nilai realisasi. Nilai SAKIP B sudah dicapai sejak tahun 2016, walaupun ada peningkatan nilai setiap tahunnya, namun tetap berada pada kategori B. Berikut disampaikan data capaian nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Agam sejak Tahun 2016 :

Tabel 2.12
Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Agam Beberapa Tahun Terakhir

TAHUN	KATEGORI	NILAI	PENINGKATAN
2016	Baik	61,80	-
2017	Baik	62,04	0,24
2018	Baik	63,82	1,78
2019	Baik	64,38	0,56
2020	Baik	65,65	1,27
2021	Baik	65,92	0,27
2022	Baik	66,43	0,51
2023	Baik	66,91	0,48

Sumber : Hasil Evaluasi Kementerian PANRB

Indikator kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) pada tahun 2023 terlihat mengalami penurunan capaian jika dibanding dengan tahun 2022 sebesar 1,26 poin. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, tingkat capaian juga mengalami penurunan, pada tahun 2022 tingkat capaian sebesar 99,42 sedangkan pada tahun 2023 tingkat capaian sebesar 90,15%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kinerja pengelolaan keuangan daerah terutama pada dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah dan kondisi keuangan daerah. Sedangkan dimensi yang menunjukkan perbaikan kinerja dalam IPKD adalah dimensi 2 (pengalokasian anggaran belanja dalam APBD).

Sedangkan indikator kinerja Nilai EPPD mengalami peningkatan kinerja yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2022, yaitu meningkat sebesar 0,3566. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tingkat capaian juga meningkat, pada tahun 2022 tingkat capaian kinerja adalah 94,64% (kategori sangat tinggi) sedangkan tahun 2023 tingkat capaian mencapai 111,20%. Peningkatan kinerja yang signifikan ini dipengaruhi oleh peningkatan kinerja OPD serta keseriusan OPD dalam menyiapkan data dukung. Di samping itu hal ini juga dipengaruhi oleh capaian kinerja indikator makro daerah yang tahun 2023 relatif lebih baik.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu disandingkan dengan target pada akhir periode RPMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terselenggaranya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		2022	2023		
1.	Nilai SAKIP	B (66,43)	B (66,91)	BB (80)	83,64%
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	71,58 (perlu Perbaikan)	70,32 (perlu perbaikan)	85 (baik)	82,73%
3.	Nilai EPPD	2,9670	3,4916	3,1550	110,68%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi kinerja indikator Nilai SAKIP tahun 2023 baru memenuhi 83,64% target akhir periode RPJMD Tahun 2021 – 2026. Masih terdapat 13,09 poin lagi yang harus diupayakan sehingga target akhir periode RPJM dapat tercapai. Dengan waktu yang tersisa 3 tahun lagi, maka setiap tahun minimal harus ada peningkatan nilai sebesar 4,36 agar target pada akhir periode di Tahun 2026 dapat dicapai. Kalau dibandingkan dengan tren peningkatan nilai setiap tahunnya yang tidak pernah mencapai lebih dari 1 poin, hal ini menunjukkan bahwa diperlukan komitmen yang kuat, kerjasama serta upaya yang keras dalam mewujudkannya.

Sedangkan untuk indikator kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah realisasi kinerja tahun 2023 baru memenuhi target akhir periode RPJMD sebesar 82,73%. Masih terdapat 14,68 poin lagi yang harus diupayakan sehingga target akhir periode RPJMD dapat dipenuhi. Dengan waktu yang tersisa 3 tahun lagi, maka setiap tahun minimal harus ada peningkatan sebesar 4,89 poin agar target akhir periode dapat dipenuhi. Kalau dilihat realisasi tahun ini yang justru mengalami penurunan sebesar 1,26 poin, maka perlu upaya keras dan pengawalan yang ketat dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga target dapat dicapai.

Sedangkan realisasi indikator kinerja Nilai EPPD tahun 2023 telah melebihi target akhir periode RPJMD tahun 2026, dengan tingkat capaian 110,68%. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2023. Walaupun kualitas penyelenggaraan pemerintahan telah menunjukkan kualitas tinggi di tahun 2023, namun hal ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga masyarakat puas karena mendapatkan pelayanan yang prima dari pemerintah

kabupaten.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel pada tahun 2022 :

Tabel 2.14
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Terselenggaranya
birokrasi yang bersih dan akuntabel Tahun 2023

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Nilai SAKIP				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	838.418.940.529	791.012.421.430	94,35
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.106.345.500	666.957.994	60,28
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	297.997.600	253.532.205	85,08
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	25.099.226.690	24.655.246.547	98,23
5.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.151.725.985	1.041.613.487	90,44
6.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	153.945.000	83.638.920	54,33
7.	Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	28.895.860.869	26.157.868.771	90,52
	Jumlah	895.124.042.173	843.871.279.354	94,27
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah				
8.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	185.797.781.885	174.277.495.111	93,80
9.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	872.413.900	845.505.240	96,92
10.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.010.816.175	6.788.475.151	84,74
	Jumlah	194.681.011.960	181.911.475.502	93,44
Nilai EPPD				
11.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	19.425.842.010	17.923.535.186	92,27
12.	Program Pengelolaan Arsip	238.978.650	190.892.800	79,88
	Jumlah	19.664.820.660	18.114.427.986	92,12
TOTAL		1.109.467.874.793	1.043.897.182.842	94,09

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab.Agam Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 7 program yang mendukung capaian kinerja indikator nilai SAKIP dengan total anggaran Rp. 895.124.042.173,- realisasi Rp. 843.871.279.354,- dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 94,27%. Indikator kinerja Nilai IPKD didukung oleh 3 program dengan total anggaran Rp. 194.681.011.950,- realisasi Rp. 181.911.475.502,- dengan tingkat capaian realisasi 93,44%. Sedangkan untuk nilai EPPD didukung oleh 2 program dengan total anggaran Rp. 19.664.820.660,- realisasi Rp. 18.114.427.986,- dengan tingkat capaian realisasi sebesar 92,12%.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.15
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Terselenggaranya
Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel Tahun 2023

Indikator kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
Nilai SAKIP	BB (71)	B (66,91)	91,66	895.124.042.173	843.871.279.354	94,27	97,23
IPKD	72 (perlu Perbaikan)	70,32 (perlu perbaikan)	90,15	194.681.011.960	181.911.475.502	93,44	96,47
Nilai EPPD	31350	3,4916	111,20	19.664.820.660	18.114.427.986	92,12	120,71

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga, pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian kinerja sasaran dengan capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian

indikator kinerja Nilai SAKIP adalah sebesar 97,23%, untuk indikator kinerja IPKD tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 96,47% dan untuk indikator kinerja Nilai EPPD tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 120,71%. Dari 3 indikator kinerja sasaran di atas, tingkat efisien penggunaan anggaran yang paling besar adalah indikator kinerja Nilai EPPD dimana capaian realisasi kinerja lebih besar dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran yang disediakan.

Di samping menganalisa tingkat efisiensi penggunaan anggaran, sumber daya lainnya yang perlu dianalisa adalah kinerja program yang mendukung capaian indikator kinerja sasaran. Hal ini berguna untuk mengetahui sejauh mana program yang dilaksanakan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran.

Tabel berikut memberikan gambaran efisiensi kinerja program terhadap capaian indikator kinerja sasaran :

Tabel 2.16
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program
Sasaran Terlaksananya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Tingkat Efektifitas
Nilai SAKIP			91,66	
1.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	100	91,66
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100	91,66
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan OPD dengan dokumen Perencanaan daerah (Renstra, Rencana) (%)	100	91,66
4.	Program penelitian dan pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja (%)	83,33	110,00
5.	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan (jumlah temuan yang dilanjutkan / total temuan)	106	86,47

6.	Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	Tingkat kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (%)	99	92,59
7.	Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100	91,66
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			90,15	
1.	Program pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap pengelolaan Keuangan daerah (LKPD)	100	90,15
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan daerah dengan pengelolaan BMD baik	100	90,15
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah	99,12	90,95
Nilai EPPD			111,20	
1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan di bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi kewilayahan dan otonomi dan Kerjasama yang terlaksana	100	111,20
2.	Program pengelolaan Arsip	Jumlah Pengguna pelayanan Arsip Berbagai memori kolektif dan jati diri bangsa (orang)		

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD-P Kab.Agam Tahun 2023

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Berdasarkan skala yang ditetapkan oleh Litbang Depdagri, tingkat efektifitas program, dapat dikelompokkan menjadi :

Skala Capaian Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40 – 59.99	Tidak Efektif
60 – 79.99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh program yang mendukung capaian indikator sasaran Nilai SAKIP dan Indeks Pengelolaan Keuangan

Daerah berada pada skala lebih dari 80%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja program-program tersebut sangat efektif dalam mendukung capaian indikator kinerja sasaran.

Sedangkan untuk kinerja Nilai EPPD, terdapat 1 program yang kinerjanya sangat efektif mendukung capaian IPKD yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sedangkan 1 program belum dapat diukur capaian kinerjanya yaitu Program Pengelolaan Arsip. Hal ini disebabkan karena JIKN sebagai sarana pencapaian sasaran sedang dalam perbaikan sehingga penghitungan capaian kinerja belum bisa dilakukan.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Yang Kapabel

Kinerja sasaran strategis “ terselenggaranya birokrasi yang kapabel “ tergambar pada capaian 3 indikator kinerja utama, sebagai berikut :

Tabel 2.17
Realisasi Indikator Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Yang Kapabel

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target PK	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Tingkat	tinggi (42)	Tinggi (38,82)	92,43
2.	Indeks Profesional ASN	Indeks	58	65,48	112,90
3.	Indeks SPBE	Indeks	baik (2,9)	2,55 (cukup)	87,93

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

1) Tingkat Kematangan Perangkat Daerah

Gambaran kematangan perangkat daerah didapatkan dari hasil penilaian terhadap struktur organisasi, budaya kerja dan inovasi organisasi. Kematangan perangkat daerah diukur berdasarkan pencapaian yang dilakukan oleh daerah pada setiap variable indikator. Penilaian tingkat kematangan perangkat daerah dan instansi pemerintah daerah menggunakan instrument pengukuran dengan 11 variabel indikator yang merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi pada 4 area perubahan yaitu area akuntabilitas (perencanaan pembangunan daerah, monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penjaminan mutu layanan dan analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas perangkat daerah), area penatalaksanaan (SOP pelayanan), area penataan sumberdaya manusia (pendidikan dan pelatihan aparatur, manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur) dan area manajemen perubahan (manajemen resiko pelaksanaan tugas

aparatur, pengukuran inerja perangkat daerah dan aparatur) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah. Ada 5 kriteria kematangan perangkat daerah yaitu :

- a. Tingkat kematangan sangat rendah dengan skor 10 – 19
- b. Tingkat kematangan rendah dengan skor 19,1 – 28
- c. Tingkat kematangan sedang dengan skor 28,1 – 37
- d. Tingkat kematangan tinggi dengan skor 37,1 – 46
- e. Tingkat kematangan sangat tinggi dengan skor 46,1 - 55

Berdasarkan hasil penilaian, kematangan perangkat daerah Tahun 2023 adalah sebesar 38,82 atau 92,43 % dari target yang ditetapkan. Walaupun capaian ini lebih rendah daripada target namun kematangan perangkat daerah tetap berada pada kategori tinggi. Beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam penilaian kematangan perangkat daerah, antara lain :

1. Teknologi informasi belum sepenuhnya digunakan sebagai unsur supporting dalam melaksanakan tugas dan kewenangan perangkat daerah.
2. Budaya organisasi perangkat daerah masih berada pada tataran slogan, belum dalam bentuk dokumen budaya organisasi, sehingga internalisasi budaya organisasi tidak berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi.
3. Setiap perangkat daerah sudah memiliki inovasi, namun pengembangan dan keberlanjutannya belum terkelola dengan baik.
4. Rencana pengembangan pegawai sudah tersedia namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mengacu kepada dokumen perencanaan.
5. Perangkat daerah sudah memiliki prosedur pengelolaan resiko namun belum dievaluasi secara berkala.

2) Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan : kualifikasi pendidikan (25%), kompetensi (40%), kinerja (30%), dan kedisiplinan pegawai ASN (5%) dalam melakukan tugas jabatannya.

Terdapat 5 kriteria Indeks Profesionalitas ASN :

- Sangat tinggi dengan nilai 91 – 100
- Tinggi dengan nilai 81 – 90
- Sedang dengan nilai 71 – 80
- Rendah dengan nilai 61 – 70

- Sangat rendah dengan nilai kurang dari 60

Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 adalah sebesar 65,48 (rendah). Capaian ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 58 (sangat rendah), dengan persentase capaian mencapai 112,90%. Capaian indikator ini dipengaruhi oleh pendidikan formal PNS, pengembangan kompetensi yang diikuti PNS, penilaian prestasi kerja serta hukuman disiplin yang pernah diterima oleh PNS. Walaupun realisasi tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan, masih ditemukan beberapa kendala dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN ini, antara lain :

1. Belum meratanya akses pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN.
2. Masih rendahnya kesadaran ASN yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi untuk melaporkan kegiatannya.
3. Assesment belum dapat dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh ASN karena keterbatasan anggaran sehingga menyulitkan dalam melakukan penataan ASN

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa upaya yang dilakukan antara lain :

1. Secara bertahap berupaya meningkatkan ketersediaan anggaran pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Menghimbau kepada ASN untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui bimbingan – bimbingan teknis yang dilakukan oleh kementerian / kelembagaan yang dilakukan secara daring dan tidak dipungut biaya.
3. Menghimbau kepada seluruh perangkat daerah untuk menyampaikan laporan pengembangan kompetensi yang dilakukan secara mandiri.
4. Menyusun prioritas pelaksanaan assesment untuk jabatan tertentu

3) Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi SPBE yang hasilnya ditetapkan dalam bentuk Indeks SPBE. Indeks SPBE merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik, terdapat 5 predikat Indeks SPBE, yaitu:

- Memuaskan dengan nilai indeks 4,2 – 5,0
- Sangat baik dengan nilai indeks 3,5 - < 4,2

- Baik dengan nilai indeks 2,6 - < 3,5
- Cukup dengan nilai indeks 1,8 - < 2,6
- Kurang dengan nilai indeks < 1,8

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2023, Indeks SPBE Kabupaten Agam adalah 2,55 (cukup), dengan rincian hasil evaluasi berdasarkan domain dan aspek penilaian sebagai berikut :

Tabel 2.18
Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Agam Tahun 2023

No	Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Nilai
1	Domain Kebijakn SPBE	13	1,90
	1. Kebijakan internal Tata Kelola SPBE	13	1,90
2	Domain Tata Kelola SPBE	25	1,60
	2. Perencanaan Strategis	10	1,00
	3. Teknologi informasi dan komunikasi	10	1,75
	4. Penyelenggaraan SPBE	5	2,50
3	Manajemen SPBE	16,5	1,00
	5. Penerapan Manajemen SPBE	12	1,00
	6. Audit TIK	4,5	1,00
4	Layanan SPBE	45,5	3,82
	7. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	27,5	3,70
	8. Layanan publik	18	4,00
	Indeks SPBE		2,55

Sumber : Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023

Realisasi kinerja tahun 2023 lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 2,9 dengan predikat baik. Angka 2,55 ini juga sedikit di bawah rata – rata Indeks SPBE Kabupaten secara nasional yang mencapai 2,59 walau masih dalam predikat yang sama (cukup). Adapun beberapa beberapa hal yang menjadi catatan kekuatan dan kelemahan Pemerintah Kabupaten Agam berdasarkan aspek penilaian antara lain :

1. Kebijakan internal terkait tata kelola SPBE

Secara keseluruhan Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Agam adalah dengan adanya Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, dan Kebijakan

Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini belum terlihat adanya kebijakan yang menjadi kekuatan (yang memiliki tingkat kematangan 4 atau lebih tinggi) dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Agam.

- Kelemahan

Selain itu, Pemerintah Kab. Agam belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, dan Kebijakan Internal Audit TIK, dimana tidak ditemukan adanya kebijakan internal yang mengatur secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan. Peraturan Bupati Agam Nomor 69 tahun 2019 tentang Rencana Induk E-Government Kabupaten Agam Tahun 2019-2023 belum mengandung muatan-muatan yang diperlukan untuk mengatur kebijakan-kebijakan internal di atas.

2. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE belum dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Agam.

- Kekuatan

Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini belum terlihat adanya perencanaan yang menjadi kekuatan (yang memiliki tingkat kematangan 4 atau lebih tinggi) dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Agam.

- Kelemahan

Selain itu, Pemerintah Kab. Agam masih belum memiliki perencanaan yang memuat Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE, dan Inovasi Proses Bisnis SPBE, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang secara komprehensif membahas hal-hal di atas. Peraturan Bupati Agam Nomor 69 tahun 2019 tentang Rencana Induk E-Government Kabupaten Agam Tahun 2019-2023 belum mencakup referensi dan arsitektur-arsitektur SPBE yang ditetapkan melalui Perpres 132/2022. Untuk indikator Rencana dan Anggaran SPBE diperlukan data dukung yang menunjukkan bahwa anggaran tersebut mengacu pada Peta Rencana SPBE. Sedangkan pada indikator Inovasi Proses Bisnis SPBE, Peraturan Bupati Agam nomor 60 tahun 2020 hanya berisi pedoman penyusunan peta proses bisnis, dan belum memuat arsitektur proses bisnis yang

dibutuhkan.

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Agam adalah dengan adanya Penggunaan Sistem Penghubung Layanan.

- Kekuatan

Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini belum terlihat adanya implementasi TIK yang menjadi kekuatan (yang memiliki tingkat kematangan 4 atau lebih tinggi) dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Agam.

- Kelemahan

Di sisi lain, Pemerintah Kab. Agam masih belum memiliki implementasi TIK yang memadai terkait Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, dimana tidak ditemukan adanya kebijakan internal yang mengatur secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan. Pada indikator Pembangunan Aplikasi SPBE, bukti dukung belum menunjukkan siklus pembangunan dari aplikasi-aplikasi yang sedang/telah selesai dibuat. Sedangkan untuk indikator Layanan Pusat Data, data dukung belum menunjukkan dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Pusat Data pada sebagian/seluruh unit kerja/perangkat daerah. Untuk indikator Layanan Jaringan Intra Instansi, dokumentasi belum menunjukkan pemanfaatan/utilisasi jaringan tersebut oleh sebagian atau seluruh unit kerja/perangkat daerah terkait. Pada indikator Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, belum terlihat dokumentasi yang menunjukkan bahwa seluruh unit kerja/perangkat daerah telah memanfaatkan API tersebut.

4. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Agam adalah dengan adanya Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan Kolaborasi Penerapan SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini belum terlihat adanya implementasi yang menjadi kekuatan (yang memiliki tingkat kematangan 4 atau lebih tinggi) dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Agam.

- Kelemahan

Di sisi lain, Pemerintah Kab. Agam masih belum memiliki implementasi yang memadai terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dimana

tidak ditemukan adanya bukti dukung yang mendukung. Pada implementasi Tim Koordinasi SPBE, bukti dukung belum menunjukkan upaya koordinasi/konsultasi yang diikuti oleh seluruh dinas dan badan di ruang lingkup Kab. Agam.

5. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan Aspek Penerapan Manajemen SPBE belum dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Agam. Kekuatan Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini belum terlihat adanya penerapan manajemen yang menjadi kekuatan (yang memiliki tingkat kematangan 4 atau lebih tinggi) dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Agam. Di sisi lain, Pemerintah Kab. Agam masih belum memiliki penerapan manajemen SPBE yang memadai terkait Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang sesuai. Belum terlihat adanya kesesuaian dengan Peta Rencana SPBE untuk Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Perubahan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE. Hal ini juga disebabkan belum adanya Peta Rencana SPBE yang telah disahkan pemakaiannya dan lengkap.

6. Audit TIK

Secara keseluruhan Aspek Audit TIK belum dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Agam.

- Kekuatan

Pada Aspek Audit TIK ini belum terlihat adanya penerapan audit yang menjadi kekuatan (yang memiliki tingkat kematangan 4 atau lebih tinggi) dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Agam.

- Kelemahan

Di sisi lain, Pemerintah Kab. Agam masih belum memiliki implementasi audit terkait Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi, dan Pelaksanaan Audit Keamanan, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang disampaikan

7. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Agam adalah adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan,

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Kinerja Pegawai, Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Layanan Kepegawaian menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Agam. Penggunaan aplikasi umum dan berbagi pakai yang dimiliki Pemerintah Pusat dapat mendorong pencapaian tingkat kematangan yang baik dan juga mendorong kolaborasi antar IPPD.

- Kelemahan

Selain itu, Pemerintah Kab. Agam tidak memiliki layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan di bawah tiga. Sehingga secara umum tidak terlihat adanya kelemahan yang signifikan yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. Agam terkait Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

8. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Agam adalah adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, dan Layanan Publik Sektor 3.

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Publik Sektor 2, Layanan Publik Sektor 1, Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Agam. Penggunaan aplikasi umum dan berbagi pakai yang dimiliki Pemerintah Pusat dapat mendorong pencapaian tingkat kematangan yang baik dan juga mendorong kolaborasi antar IPPD.

- Kelemahan

Selain itu, Pemerintah Kab. Agam tidak memiliki layanan administrasi publik berbasis elektronik dengan tingkat kematangan di bawah tiga. Sehingga secara

umum tidak terlihat adanya kelemahan yang signifikan yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. Agam terkait Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran terselenggaranya birokrasi yang kapabel pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.19
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Terselenggaranya
Birokrasi Yang Kapabel Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	40 (tinggi)	38,74 (tinggi)	96,85	42 (tinggi)	38,82	92,43
2.	Indek Profesional ASN	55	51,80	94,18	58	65,48	112,90
3.	Indeks SPBE	2,7 (Baik)	2,38 (cukup)	88,15	baik (2,9)	2,55 (cukup)	87,93

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat walaupun ada peningkatan nilai tingkat kematangan perangkat daerah tahun 2023, namun persentase capaian kinerja mengalami penurunan. Persentase capaian kinerja indikator tingkat kematangan perangkat daerah tahun ini sebesar 92,43 turun sebesar 4,42 poin dibanding tahun lalu. Untuk indeks profesionalitas ASN terlihat adanya peningkatan realisasi yang cukup tinggi dibandingkan tahun lalu. Jika tahun lalu tingkat capaian dibanding target adalah 94,18% namun tahun ini mencapai 112,90%. Hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dan melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan capaian Indeks SPBE pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,17 poin jika dibandingkan realisasi tahun 2022. Namun persentasenya menurun dari 88,15% menjadi 87,93%. Hal ini disebabkan karena peningkatan target yang ditetapkan tidak sebanding dengan peningkatan kinerja.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD

tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran terselenggaranya birokrasi yang kapabel dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.20
Perbandingan Realisasi Kinerja Terselenggaranya Birokrasi Yang Kapabel dengan Target Periode Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		2022	2023		
1.	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	38,74 (tinggi)	38,82	48 (sangat Tinggi)	80,87
2.	Indeks Profesionalitas ASN	51,80	65,48	70	93,54
3.	Indeks SPBE	2,38 (cukup)	2,55 (cukup)	3,3 (baik)	77,27

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPJMD Tahun 2021 – 2026, tingkat kematangan perangkat daerah baru mencapai 80,87%. Masih terdapat 9,18 poin lagi yang harus dicapai agar target di akhir periode RPJMD terpenuhi. Dengan sisa waktu 3 tahun lagi, maka paling tidak setiap tahun tingkat kematangan perangkat daerah harus meningkat sebesar 3,06. Kalau dibandingkan dengan pertambahan kemajuan setiap tahunnya yang tidak sampai 1 poin, dapat dipastikan seluruh Perangkat Daerah harus berupaya lebih keras agar kematangan perangkat daerah dapat ditingkatkan.

Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun ini telah memenuhi 93,54% dari target akhir RPJMD yang ditetapkan. Masih ada 4,52 poin lagi yang harus dicapai menjelang akhir tahun 2026 atau sekitar 1,5 poin setiap tahun. Agar hal ini dapat tercapai perangkat daerah yang bertanggung jawab pada capaian indikator Indeks Profesionalitaas ASN (BKPSDM) harus selalu mengingatkan OPD lain agar dapat melaksanakan program peningkatan kompetensi ASN sehingga kebutuhan peningkatan kapasitas ASN minimal 20 jam pelajaran / tahun dapat terpenuhi, baik melalui penambahan anggaran peningkatan kapasitas maupun melalui bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh lembaga/kementerian terkait secara daring.

Sedangkan realisasi Indeks SPBE tahun ini baru memenuhi 77,27% dari target akhir periode RPJMD di tahun 2026. Masih terdapat 0,75 poin lagi yang harus dicapai untuk memenuhi target akhir periode RPJMD. Dengan sisa waktu pelaksanaan 3 tahun lagi, maka peningkatan kinerja minimal yang harus dicapai setiap tahunnya adalah 0,25 poin. Jika dibandingkan dengan peningkatan kinerja

tahun ini yang hanya mencapai 0,17, maka diperlukan keseriusan seluruh stakeholder dalam memenuhi persyaratan agar indeks SPBE Kabupaten Agam pada tahun 2026 tercapai sesuai target.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel pada tahun 2023 :

Tabel 2.21
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran
Terselenggaranya birokrasi yang Kapabel Tahun 2023

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Tingkat Kematangan Perangkat Daerah				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	838.418.940.529	791.012.421.430	94,35
	Jumlah	838.418.940.529	791.012.421.430	94,35
Indeks Profesionalitas ASN				
2.	Program Kepegawaian	2.544.203.053	1.760.780.255	69,21
	Jumlah	2.544.203.053	1.760.780.255	69,21
Indeks SPBE				
3.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.221.588.552	1.180.590.035	96,64
4.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.023.677.908	1.834.736.854	90,66
5.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	102.451.000	92.033.400	89,83
6.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	35.042.500	31.741.000	90,59
	Jumlah	3.382.759.960	3.139.101.289	92,80
TOTAL		844.345.903.542	795.912.302.974	94,26

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 1 program yang mendukung capaian kinerja indikator tingkat kematangan perangkat daerah dengan total anggaran Rp. 838.418.940.529,- realisasi sebesar Rp 791.012.421.430,- dengan persentase capaian realisasi sebesar 94,35%. Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN didukung oleh 1 program dengan total anggaran Rp. 2.544.203.053,- realisasi Rp. 1.760.780.255,- dengan persentase capaian realisasi 69,21%. Rendahnya realisasi anggaran pada Program Kepegawaian disebabkan karena sisa anggaran pada kegiatan pengadaan ASN serta pelaksanaan promosi dan Mutasi ASN. Sedangkan untuk Indeks SPBE

didukung oleh 4 program dengan total anggaran sebesar Rp. 3.382.759.960,- , realisasi Rp. 3.139.101.289,- dan persentase capaian realisasi sebesar 92,80%.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran terselenggaranya birokrasi yang kapabel. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.22
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Terselenggaranya
Birokrasi Yang kapabel Tahun 2023

Indikator kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Pagu	Realisasi	Tingkat capaian	
Tingkat kematangan PD	42 (tinggi)	38,82	92,43	838.418.940.529	791.012.421.430	94,35	97,96
IP ASN	58	65,48	112,90	2.544.203.053	1.760.780.255	69,21	163,13
Indeks SPBE	2,9 (baik)	2,55 (cukup)	87,93	3.382.759.960	3.139.101.289	92,80	94,75

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga, pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator Tingkat kematangan perangkat daerah adalah sebesar 97,96%, untuk indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN efisiensi penggunaan anggaran melebihi 100% yaitu sebesar 163,13% dan untuk indikator kinerja Indeks SPBE efisiensi penggunaan anggaran sebesar 94,75. Dari 3 indikator kinerja sasaran di atas, tingkat efisien penggunaan anggaran yang paling besar adalah indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN dimana capaian realisasi kinerja lebih besar dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran yang disediakan.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program / kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.23
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran
Terselenggaranya Birokrasi Yang Kapabel

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian	Tingkat Efektifitas
Tingkat Kematangan Perangkat Daerah			92,43	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kebijakan dibidang kelembagaan dan analisa jabatan serta kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana	100	92,43
Indeks Profesionalitas ASN			112,90	
1.	Program Kepegawaian	Indeks Profesionalitas ASN	112,90	100
Indeks SPBE			88,15	
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan proram priolitas pemerintahan daerah	100	88,15
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100	88,15
3.	Program Penyelenggaraan statistik Sektoral	Persentase kebijakan pelayanan publik dan tata laksana yang terlaksana	100	88,15
4.	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamatan informasi	Indeks Keamanan Informasi	100	88,15

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab. Agam Tahun 2023

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Berdasarkan skala yang ditetapkan oleh Litbang Depdagri, tingkat

efektifitas program, dapat dikelompokkan menjadi :

Skala Capaian Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40 – 59.99	Tidak Efektif
60 – 79.99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh program yang mendukung capaian Program Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Yang Kapabel memiliki skala lebih dari 80%. Hal ini berarti bahwa kinerja seluruh program sangat efektif dalam mendukung capaian indikator kinerja sasaran.

C. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Kinerja sasaran strategis “meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik” dapat terlihat pada capaian indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24
Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik	Indeks	84	84,53	100,63%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator yang lazim digunakan oleh lembaga penyedia barang / jasa termasuk Pemerintah Daerah dalam mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana UU Nomor 25 Tahun 2009, seluruh institusi pemerintah wajib mengukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan melalui survey kepuasan masyarakat. Adapun pelaksanaan survey tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap layanan yang diberikan oleh seluruh perangkat daerah, indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 adalah 84,53 dengan kinerja baik. Realisasi ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 84 dengan tingkat capaian 100,63%. Hal ini menunjukkan secara umum masyarakat puas dengan layanan yang telah diberikan. Walaupun begitu masih ditemukan beberapa kelemahan yang ditemui dalam memberikan layanan, antara lain :

- a. Semua Perangkat Daerah telah menyusun Standar Pelayanan, namun belum secara rutin direviw setiap tahun serta ditinjau ulang setelah tiga tahun;
- b. Masih kurangnya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2017 dimana masyarakat harus dilibatkan dalam penetapan dan peninjauan ulang standar pelayanan dalam bentuk forum konsultasi publik dan survey kepuasan masyarakat;
- c. Belum optimalnya pengembangan dan peningkatan kompetensi dan pemberian penghargaan kepada pegawai atau petugas pelayanan pada OPD;
- d. Belum semua Perangkat Daerah / Unit Penyelenggara Pelayanan Publik memiliki kelengkapan sarana prasarana pendukung termasuk untuk sarana prasarana bagi kelompok rentan yang memadai;
- e. Belum optimalnya penyediaan layanan informasi secara online maupun offline dan penyebaran informasi layanan serta pemutakhiran informasi secara rutin disetiap media informasi;
- f. Belum terkelolanya konsultasi dan pengaduan dengan baik, belum tersosialisasi kanal pengaduan SP4N-LAPOR secara luas serta penggunaan data konsultasi dan pengaduan untuk *Evidence-based policy* di lingkup instansi;
- g. Belum meratanya pengembangan inovasi pelayanan publik untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik

Adapun rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan di atas adalah :

1. Perlunya menyempurnakan persyaratan pelayanan yang mudah, menciptakan prosedur dan mekanisme kerja sederhana dan singkat serta mensosialisasikan kepada masyarakat.
2. Memperhatikan jangka waktu penyelesaian layanan, mengingat ketepatan waktu penyelesaian adalah salah satu hal yang menjadi sorotan penilaian bagi pengguna layanan;
3. Meningkatkan aspek pendukung unsur pelayanan seperti sarana dan prasarana. Perlunya perbaikan dan pemenuhan variable/komponen sarana prasarana

sesuai Undang-Undang 25 Tahun 2009 seperti ruang tunggu beserta fasilitasnya, front office, meja layanan, wc/toilet (terpisah laki-laki dan perempuan), mushalla, ruang laktasi, ruang pengaduan, ruang tempat bermain anak, bak sampah, parkir, cctv dan lain lain serta Mendorong percepatan penyediaan sarana prasarana yang ramah bagi kelompok rentan sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 66 Tahun 2020 seperti kursi roda, pintu mudah diakses, jalan landai, selasar penghubung, toilet khusus, loket khusus, ruang khusus, guiding block, parkir khusus dan area bermain anak;

4. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara mandiri serta masukan dari pengguna layanan atau pihak terkait.
5. Diperlukan peningkatan partisipasi dan kolaborasi antara penyelenggara pelayanan dengan elemen masyarakat pengguna layanan yang diwadahi dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.
6. Mengaplikasikan perkembangan teknologi informasi ke dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan, sehingga memudahkan dalam mensosialisasikan serta menginformasikan jenis dan prosedur pelayanan yang diberikan serta kepastian mendapatkan pelayan.
7. Menciptakan inovasi secara konsisten sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengatasi masalah yang mengganggu kelancaran jalannya pelayanan.
8. Meningkatkan kegiatan sosialisasi terkait pelayanan publik secara efektif dan konsisten kepada masyarakat, agar masyarakat mendapatkan informasi terkait perkembangan pelayanan publik.
9. Mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat melalui sarana elektronik maupun non elektronik seperti di papan pengumuman, media massa, website, media sosial dan atau sarana informasi lainnya

Di samping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran terselenggaranya birokrasi yang kapabel pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.25
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5	83,95	100,5%	84	84,53	100,63%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat setiap tahun selalu meningkat dengan kinerja sangat tinggi. Pada tahun 2022 persentase capaian realisasi adalah 100,5% sedangkan tahun 2023 meningkat menjadi 100,63%. Walau tidak terlalu signifikan peningkatannya namun hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan publik.

Untuk mengetahui persentase capaian target akhir RPJMD Periode 2021 – 2026, dapat diketahui dengan menyandingkan capaian tahun ini dengan target akhir periode RPJMD tahun 2026. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.26
Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan Target Periode Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Capaian		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		2022	2023		
1.	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	83,5	84,53	85,5	98,86

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD-P Kab.Agam Tahun 2022

Realisasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 telah memenuhi 98,86 % dari target akhir RPJMD periode 2021 – 2026. Dengan target sebesar 85,5 pada tahun 2026, maka masih ada minimal 0,97 poin lagi yang akan menjadi target kinerja selama 3 tahun tersisa.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang

disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel pada tahun 2022 :

Tabel 2.27
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya
Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Seluruh program yang ada pada APBD Kabupaten Agam Tahun 2022	1.564.914.780.113	1.416.022.089.703	90,49%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Indes kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik merupakan agregat indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah. Dengan begitu seluruh program dan anggaran yang tersedia dalam APBD Tahun 2022 mendukung kepada capaian indikator ini.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran terselenggaranya birokrasi yang kapabel. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.28
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Indikator kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Pagu	Realisasi	Tingkat capaian	
Indeks Kepuasan Masyarakat	84	84,53	100,63%	1.564.914.780.113	1.416.022.089.703	90,49%	111,21

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD-P Kab.Agam Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga, pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 111,21%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang belanjakan sangat efisien mendukung pencapaian target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program/ kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.29
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian	Tingkat Efektifitas
Indeks Kepuasan Masyarakat			100,63%	
1.	Seluruh program dalam APBD Tahun 2023		>90%	> 80

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD-P Kab.Agam Tahun 2023

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Berdasarkan skala yang ditetapkan oleh Litbang Depdagri, tingkat efektifitas program, dapat dikelompokkan menjadi :

Skala Capaian Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40 – 59.99	Tidak Efektif
60 – 79.99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh program yang mendukung capaian Program Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat memiliki skala lebih dari 80%. Hal ini berarti bahwa kinerja seluruh program sangat efektif dalam mendukung capaian indikator kinerja sasaran.

D. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Nagari

Hasil Pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Nagari, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian

kinerja indikator tersebut sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Realisasi Indikator Sasaran
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Nagari Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Pengelolaan Pemerintahan Nagari	Indeks	453	454	100,22

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Indeks pengelolaan pemerintahan nagari menunjukkan sejauh mana Pemerintahan Nagari telah melakukan pengelolaan pemerintahan nagari dengan baik. Indeks ini diukur berdasarkan hasil evaluasi perkembangan nagari. Evaluasi perkembangan nagari sendiri merupakan upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan berdasarkan instrument evaluasi yang telah disusun. Evaluasi ini mencakup bidang pemerintahan, bidang kewilayahan dan bidang kemasyarakatan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat diketahui perkembangan nagari, pengelompokan nagari berdasarkan perkembangannya serta indeks pengelolaan pemerintahan nagari. Indeks pengelolaan pemerintahan nagari ini diperoleh dari jumlah rata-rata nilai pada seluruh nagari yang ada di Kabupaten Agam.

Berdasarkan hasil perhitungan Tahun 2023 Indeks Pengelolaan Pemerintah Nagari adalah 454, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 433 dengan tingkat capaian 100,22%. Nilai tertinggi adalah Nagari Sungai Pua (536) kategori cepat berkembang, sedangkan yang terendah adalah Nagari Salareh Aia Utara (346) kategori berkembang. Secara umum terlihat adanya perbaikan kinerja pengelolaan pemerintahan nagari. Hal ini tidak lepas dari upaya pendampingan dan pembinaan kepada nagari terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran terselenggaranya birokrasi yang kapabel pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.31
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan
Pemerintahan Nagari Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Indeks Pengelolaan Pemerintahan Nagari	434	453	104,38	453	454	100,22

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi indeks pengelolaan pemerintah nagari meningkat dari tahun 2022 namun mengalami penurunan tingkat capaian kinerja dari 104,38% pada tahun 2022 menjadi 100,22% pada tahun 2023.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.32
Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Meningkatnya Kinerja
Pengelolaan Pemerintahan Nagari Pembangunan Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Capaian		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		2022	2023		
1.	Indeks Pengelolaan Pemerintahan Nagari	453	454	474	95,78%

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD-P Kab.Agam Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa untuk mencapai target akhir periode RPJMD Tahun 2026 sebesar 474, ada selisih 20 poin lagi dibanding capaian 2023. Hal ini berarti harus ada peningkatan minimal 7 poin pertahun agar target akhir periode RPJMD dapat terpenuhi.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel pada tahun 2023 :

Tabel 2.33
Program dan Anggaran Yang Mendukung Sasaran Meningkatnya Kinerja
Pengelolaan Pemerintahan Nagari Tahun 2023

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	Program Penataan Desa	184.860.000	169.770.935	91,84
2.	Program Administrasi Pemerintah Desa	2.835.987.991	2.794.079.819	98,52
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan MAsyarakat Hukum Adat	1.746.774.302	1.587.877.556	90,90
4.	Program peningkatan kerjasama desa	136.790.750	134.988.839	98,68
Jumlah		4.904.413.043	4.686.717.149	95,56

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terdapat 4 program yang mendukung capaian kinerja indikator Indeks Pengelolaan Pemerintahan nagari dengan total anggaran Rp. 4.904.413.043, realisasi sebesar Rp 4.686.717.149, dengan persentase capaian realisasi sebesar 95,56 %.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran terselenggaranya birokrasi yang kapabel. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.34
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% capaian	
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintah Nagari	453	454	100,22	4.904.413.043	4.686.717.149	95,56	104,88

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Pada APBD Tahun 2023, total anggaran untuk mendukung capaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan pemerintah nagari sebesar Rp. 4.904.413.043,- , realisasi Rp. 4.686.717.149,- dengan persentase capaian realisasi sebesar 95,56%. Jika dibandingkan dengan realisasi tingkat capaian indikator kinerja terlihat adanya efisiensi penggunaan anggaran untuk output kinerja dimana persentase capaian kinerja lebih besar daripada persentase capaian realisasi anggaran.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program / kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.35
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Nagari

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian	Tingkat Efektifitas
Indeks Pengelolaan Pemerintah Nagari			100.22	
1.	Program Penataan Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam penataan sesuai standar	43,48	230,50
2.	Program Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintah nagari yang terbina	100	100,22
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kesyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Komponen pada Kelembagaan Nagari yang ditata sesuai standar	116,47	86,05
4.	Program peningkatan kerja sama desa	Jumlah jenis kerjasama antar nagari	100	100,22

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Berdasarkan skala yang ditetapkan oleh Litbang Depdagri, tingkat efektifitas program, dapat dikelompokkan menjadi :

Skala Capaian Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40 – 59.99	Tidak Efektif
60 – 79.99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh program yang mendukung capaian Program Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Nagari memiliki

skala efektifitas lebih dari 80%. Hal ini berarti bahwa kinerja seluruh program sangat efektif dalam mendukung capaian indikator kinerja sasaran.

Walaupun dapat dikatakan sangat efektif, namun terdapat 1 program dengan capaian realisasi target kinerja di bawah 50%, yaitu Program Penataan Desa capaian realisasinya hanya 43,48%. Hal ini disebabkan karena dari 23 nagari persiapan yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi nagari defenitif, baru 10 nagari yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan sebagai nagari defenitif, sedangkan sisanya masih menunggu proses penetapan. Nilai efektifitas yang sangat tinggi (230,50%) juga dapat diasumsikan bahwa nilai itu menggambarkan bahwa kinerja program kurang berkorelasi dengan capaian kinerja program, karena walaupun capaian program rendah namun kinerja sasaran tercapai lebih dari 100%.

2.3.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Pada Misi II (Membangun Perekonomian Masyarakat Yang Kokoh Melalui Optimalisasi Sumber Daya Daerah Dan Pengembangan Pariwisata)

Misi II pada RPJMD Tahun 2021 – 2026 memiliki dengan tujuan “meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat”. Tujuan ini memiliki 2 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.36
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi II Tahun 2023 Meningkatnya Pendapatan Dan Daya Beli Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	Angka	2,95	3,12	105,76
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Angka	4,25	4,52	106,35

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB perkapita (ADHK) tahun 2023 dihitung berdasarkan selisih nilai PDRB perkapita tahun 2023 dengan nilai PDRB perkapita tahun 2022 berdasarkan harga konstan tahun 2018 dibagi dengan nilai PDRB perkapita tahun 2023. Laju pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK) tahun 2023 adalah sebesar 3,12, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 2,95, tingkat capaian realisasi sebesar 105,76%.

Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Agam yang mencapai 41,42% dan pertumbuhan ekonomi yang juga membaik.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja ekonomi di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diukur berdasarkan lapangan usaha atau sector produksi serta berdasarkan Atas Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Harga Konstan (ADHK). Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mencapai 4,52%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 4,25%, tingkat realisasi tahun ini mencapai 106,35 % dengan kategori tingkat capaian sangat tinggi. Capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam 2 tahun terakhir berada pada kondisi baik karena telah melebihi angka 4%. Pencapaian ini didukung adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang memprioritaskan pembangunan di sektor pertanian, usaha mikro dan pariwisata yang merupakan sektor basis perekonomian Kabupaten Agam.

Pencapaian tujuan pada Misi II didukung melalui 4 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan per sasaran sebagai berikut :

A. Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian Dan Usaha Mikro

Kinerja sasaran strategis “meningkatnya nilai PDRB sektor pertanian dan usaha mikro”, dapat terlihat pada capaian 3 indikator utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian Dan Usaha Mikro

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target PK	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK)	Persen	2,24	3,12	139,29
2.	Laju Pertumbuhan Pelaku Usaha Skala Mikro	Persen	2	2,5	125
3.	Laju Pertumbuhan Nilai Tambah Produk Usaha Mikro	Persen	2	74,16	3.709,5%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan Kabupaten Agam Dalam Angka Tahun 2022, nilai PDRB perkapita lapangan usaha pertanian (ADHK) tahun 2023 adalah sebesar 4.737,96 (milyar), sedangkan tahun 2022 adalah 4.595,70 (milyar), dengan begitu laju pertumbuhan PDRB Lapangan usaha pertanian (ADHK) tahun 2023 adalah 3,12. Jika

dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 2,24 maka tingkat capaian realisasi adalah sebesar 139,29 %. Sektor pertanian merupakan sektor dengan kontribusi terbesar dalam PDRB perkapita Kabupaten Agam. Hal – hal yang mempengaruhi tingkat capaian tersebut antara lain adanya kebijakan pembangunan daerah yang memprioritaskan sektor pertanian karena sektor pertanian merupakan sektor basis ekonomi di Kabupaten Agam.

Laju pertumbuhan pelaku usaha mikro dapat diketahui dengan menghitung selisih jumlah pelaku usaha mikro pada tahun 2023 dengan jumlah pelaku usaha mikro tahun 2022. Pada tahun 2023 jumlah pelaku usaha mikro yang terdaftar pada Dinas Perindagkop UKM adalah 17.449, sedangkan pada tahun 2022 jumlah pelaku usaha mikro adalah sebanyak 17.023. Dengan begitu laju pertumbuhan pelaku usaha mikro adalah sebesar 2,5%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 2%, maka tingkat capaian realisasi adalah sebesar 125% dengan kategori capaian sangat tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa usaha mikro yang ada berkembang sangat baik setelah melandainya kasus covid-19 di Kabupaten Agam. Hal ini juga menunjukkan bahwa berbagai program stimulasi yang diberikan oleh pemerintah mampu memacu perkembangan pelaku usaha mikro serta faktor lain yang mendukung seperti perencanaan usaha yang matang, adanya peluang laba yang menjanjikan dan trend yang menarik bagi konsumen.

Dalam meningkatkan capaian dari Laju pertumbuhan pelaku usaha mikro dilaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan pasca pelatihan terhadap UMKM sebanyak 100 orang pelaku Usaha Mikro dan dilakukan perekrutan tenaga pendamping kecamatan sebanyak 16 orang guna pendampingan pelaku usaha dan pendataan pertumbuhan wirausaha baru berskala mikro se kecamatan.

Laju pertumbuhan nilai tambah produk usaha mikro dapat dilihat dari nilai omset pelaku usaha mikro. Berdasarkan data Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Mikro, rata – rata nilai omset pelaku usaha mikro pada tahun 2023 sekitar Rp. 43.540.000,-. Data ini diambil dari data nilai omset pelaku usaha mikro yang dilatih dan dibina tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2022 rata-rata nilai omset pelaku usaha mikro adalah sekitar Rp. 25.000.000,-. Dengan begitu laju pertumbuhan nilai tambah produk usaha mikro berdasarkan nilai omset adalah 74,16%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 2%, maka tingkat capaian laju pertumbuhan nilai tambah produk usaha mikro berdasarkan nilai asset adalah 3.709,5%. Tingkat capaian yang sangat signifikan ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

1. Kondisi pandemi covid yang sudah tidak ada lagi di tahun 2023 sehingga nilai

omset usaha mikro meningkat tajam.

2. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha mikro dalam mengurus legalitas usaha, sehingga memudahkan produk masuk ke dalam pasar yang lebih besar seperti supermarket dan pasar – pasar modern.
3. Perkembangan digital marketing yang sangat pesat, memudahkan pelaku usaha mikro untuk memasarkan usahanya tanpa batas.
4. Meningkatnya kolaborasi berbagai sektor dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya nilai PDRB sektor pertanian dan usaha mikro pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel. 2.38
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai PDRB
Sektor Pertanian dan Usaha Mikro Tahun 2022 Dengan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK)	3.35	2,28	68,06%	2,24	3,12	139,29 %
2.	Laju Pertumbuhan Pelaku Usaha Skala Mikro	2	2,35	117,5%	2	2,5	125%
3.	Laju Pertumbuhan nilai tambah Produk Usaha Mikro	2	10	500%	2	74,16	3.709,5 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2022 dengan tahun 2023 untuk indikator kinerja laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian (ADHK), laju pertumbuhan pelaku usaha mikro, dan laju pertumbuhan nilai tambah produk usaha mikro. Jika dibandingkan capaian tahun 2023 dengan tahun 2022, indikator Laju Pertumbuhan PDRB lapangan usaha (ADHK) mengalami kenaikan kinerja, dimana tingkat capaian kinerja sebesar 68,06% pada tahun 2022 naik menjadi

139,29%. Hal ini didukung karena Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang memprioritaskan pembangunan di sektor pertanian. Disamping itu capaian ini juga didukung oleh pelaksanaan program – program pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19 dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Laju pertumbuhan pelaku usaha skala mikro pada tahun 2023 mencapai 2,5 dengan tingkat capaian 125%. Realisasi tersebut melebihi target tahun 2022 yakni 2,35 dengan tingkat capaian tahun 2022 sebesar 117,5%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 terjadi lonjakan jumlah pelaku usaha mikro yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat yang memberi kemudahan pembiayaan bagi pelaku – pelaku usaha mikro serta kegiatan pembinaan dan pendataan yang dilakukan.

Laju pertumbuhan nilai tambah produk usaha mikro pada tahun 2022 mencapai 10 dengan tingkat capaian 500%. Sedangkan tahun 2023, laju pertumbuhan nilai tambah produk usaha mikro sebesar 74,16% dengan tingkat capaian sebesar 3.709,5%.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran meningkatnya nilai PDRB sektor pertanian dan usaha mikro dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.39
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian dan Usaha Mikro Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Tingkat Capaian
		2022	2023		
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK)	2,28	3,12	1,38	226,09 %
2.	Laju Pertumbuhan Pelaku Usaha Skala Mikro	2,35	2,65	2	125 %
3.	Laju Pertumbuhan nilai tambah Produk Usaha Mikro	10	74,16	2	3.709,5%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat kemajuan kinerja indikator Laju

Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK), Laju Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro, dan Laju Pertumbuhan nilai tambah Produk Usaha Mikro tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 telah melebihi target akhir periode RPJMD, sementara masih tersisa waktu 3 tahun untuk menuntaskan target RPJMD. Untuk itu diperlukan evaluasi terhadap penetapan target kinerja per tahun pada masa RPJMD yang tersisa, sehingga kinerja pembangunan pada sasaran ini dapat lebih baik.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya nilai PDRB sektor Pertanian.

Tabel 2.40
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya
Produksi Usaha Pertanian dan Industri Pengolahan Tahun 2023

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK)				
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Pertanian	2.863.747.473	2.398.336.697	84%
2.	Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian	12.757.101.050	10.722.274.706	84%
3.	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	878.575.068	736.427.110	84%
4.	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	75.124.500	50.756.150	68%
5.	Program penyuluhan pertanian	1.675.811.739	1.585.920.660	95%
6.	Program pengelolaan perikanan tangkap	359.060.150	348.921.770	97%
7.	Program pengelolaan perikanan budidaya	736.290.000	677.873.840	92%
8.	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	525.598.735	462.624.136	88%
9.	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	4.802.000.002	4.551.990.370	95%
	Jumlah	24.673.308.717	21.535.125.439	87%
Laju Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro				
10.	Program perencanaan dan pembangunan kawasan industri	907.752.050	826.078.510	91%

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
11.	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	12.770.152	12.318.200	96%
	Jumlah	920.522.202	838.396.710	91,08%
Laju Pertumbuhan nilai tambah Produk Usaha Mikro				
13.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	243.084.381	140.500.000	58%
14.	Program hubungan industrial	70.769.925	66.882.610	95%
15.	Program pengembangan UMKM	534.143.800	405.669.300	76%
16.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.159.750.000	1.088.695.736	94%
17.	Program pengembangan ekspor	63.581.250	52.521.500	83%
18.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	78.799.390	75.422.600	96%
19.	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	942.675.157	785.789.900	83%
	Jumlah	3.092.803.903	2.615.481.646	84,57%
	Total	28,686,634,822	24,989,003,795	87.11%

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 9 program yang mendukung capaian kinerja indikator Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK) dengan total anggaran Rp. 24.673.308.717,- realisasi Rp. 21.535.125.439,- dengan tingkat capaian realisasi 87%. Indikator kinerja Laju Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro didukung oleh 3 program dengan total anggaran Rp. 920.522.202,- realisasi Rp. 838.396.710,- dengan tingkat capaian realisasi 91,08%. Sedangkan untuk Laju Pertumbuhan nilai tambah Produk Usaha Mikro didukung oleh 7 program dengan total anggaran Rp. 3.092.803.903,- realisasi Rp 2.615.481.646,- dengan tingkat capaian realisasi sebesar 84.57%.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran meningkatnya nilai PDRB sektor pertanian dan usaha mikro. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.41
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Meningkatnya Nilai PDRB
Sektor Pertanian Dan Usaha Mikro Tahun 2023

Indikator kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK)	2,24	3,1	138,3 9%	24.673.308.7 17	21.535.125.439	87%	158,96
Laju Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro	2	2,5	125%	920.522.202	838.396.710	93.50%	133,69
Laju Pertumbuhan nilai tambah Produk Usaha Mikro	2	2	100%	3.092.803.90 3	2.615.481.646	83.57%	119,66

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga, pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian kinerja sasaran dengan capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK) adalah sebesar 158,96%, untuk indikator kinerja Laju Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 133,69% dan untuk indikator kinerja Laju Pertumbuhan nilai tambah Produk Usaha Mikro tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 119,66%. Dari 3 indikator kinerja sasaran di atas, tingkat efisien penggunaan anggaran yang paling besar adalah indikator kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK) dimana capaian realisasi kinerja sasaran lebih besar dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran yang disediakan.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.42
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran
Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian Dan Usaha Mikro

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Tingkat Efektifitas
Laju Pertumbuh an PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK)			138,39 %	
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Pertanian	Peningkatan produksi pertanian (Ton)	101.17%	136,79
	Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian	Peningkatan luas area pertanian yang terfasilitasi pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian (ha)	100%	138,39
	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan Masyarakat veteriner	Persentase hewan yang terfasilitasi pelayanan medic	92,49%	149,63
	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase kasus serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang terfasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT	68,97%	200,65
	Program penyuluhan pertanian	Persentase peningkatan SDM penyuluh	172%	80,46
	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah produksi Ikan tangkap (ton)	99,75%	138,74
	Program pengelolaan Perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	101,36%	136,53
	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan (Orang)	103%	134,36
	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase peningkatan luas lahan sawah yang beririgasi	145,83%	94,90
Laju Pertumbuh an Pelaku Usaha Mikro			125%	
	Program perencanaan dan pembangunan kawasan industri	Persentase laju jumlah IKM dan nilai produksi	200%	62,5
	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase ketersediaan data industri	552%	22,65

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Tingkat Efektifitas
	Laju Pertumbuhan nilai tambah Produk Usaha Mikro		3.709,5%	
	Program pengawasaan dan pemeriksaa n koperasi	Persentase koperasi sehat	58%	6.395,69
	Program hubungan industrial	Persentase perusahaan yang telah melaksanakan hubungan industrial	95%	3.904,73
	Program pengembangan UMKM	Persentase peningkatan skala usaha kecil	76%	4.880,92
	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar tradisonal yang Memenuhi standar	94%	3.946,27
	Program pengembangan ekspor	Jumlah produk lokal yang menembus pasar ekspor	83%	4.469,28
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	96%	3.864,06
	Program penggunaan dan pemasaran produk Dalam negeri	Persentase barang bersubsidi yang terawasi	83%	4.469,28

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKJIP Tahun 2023

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Berdasarkan skala yang ditetapkan oleh Litbang Depdagri, tingkat efektifitas program, dapat dikelompokkan menjadi :

Skala Capaian Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40 – 59.99	Tidak Efektif
60 – 79.99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk program- program yang mendukung capaian IKU Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian efektifitasnya berada pada skala lebih dari 80%. Dapat dikatakan bahwa kinerja program program tersebut sangat efektif dalam mendukung capaian indikator kinerja dimaksud.

Sedangkan program - program yang mendukung capaian IKU laju pertumbuhan

pelaku usaha mikro kinerjanya terlihat tidak terlalu baik. Satu program yaitu Program perencanaan dan pembangunan kawasan industri dengan nilai efektifitas 62,50, cukup efektif mendukung capaian IKU, sedangkan Program pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan nilai efektifitas 22,65 sangat tidak efektif mendukung capaian kinerja IKU tersebut.

Untuk indikator kinerja laju pertumbuhan nilai tambah produk usaha mikro, tidak dapat dinilai tingkat efektifitasnya karena data tingkat capaian sasaran yang tidak valid karena .

B. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah

Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah” dapat terlihat pada capaian 2 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.43
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	Angka	4,39	8,26	188,15
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Angka	799.000	892.145	111,66%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Untuk menghitung kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah dapat dilakukan melalui pendekatan pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makan minum. Berdasarkan Kabupaten Dalam Angka Tahun 2024, nilai PDRB pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makan minum pada tahun 2023 adalah sebesar 119,14 (milyar) sedangkan pada tahun 2022 sebesar 110,05 (milyar). Dengan begitu, laju pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makan minum (ADHK) adalah 8,26. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 4,39, maka tingkat capaian realisasi adalah sebesar 188,15 % dengan kategori sangat tinggi. Sangat tingginya tingkat capaian tersebut dipengaruhi meningkatnya kunjungan wisata ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Agam.

Indikator lain yang menunjukkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah adalah jumlah kunjungan wisata. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam bahwa jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2023 adalah 892.145 kali, angka ini telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 799.000 kali. Tingkat capaian kinerja indikator ini adalah 111,66%. Beberapa faktor yang mempengaruhi kunjungan wisata tahun ini antara lain :

5. Tahun 2023 ditetapkan sebagai Visit Beautiful West Sumatera Year, dimana perjalanan domestik dan mancanegara dibuka seluas mungkin.
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata dan sarana prasarana pendukung lainnya.
7. Meningkatnya promosi dan publikasi wisata oleh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, nagari wisata beserta pemerintah daerah, dalam bentuk event, pelayanan perjalanan wisata, eksplorasi budaya alam, dll.
8. Beberapa prestasi / penghargaan bidang kepariwisataan yang diperoleh oleh Kabupaten Agam, menyebabkan banyaknya kunjungan wisata maupun studi tiru dari daerah lain ke Kabupaten Agam.
9. Meningkatkan kapasitas pelaku wisata pada berbagai bidang sehingga menciptakan pelaksanaan pariwisata menjadi lebih baik. Pelatihan bagi pelaku wisata dalam rangka meningkatkan kompetensi diantaranya :
 - Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi dan Pengelolaan Sampah di Destinasi Wisata;
 - Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata;
 - Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner;
 - Pelatihan Pemandu Wisata Geowisata;
 - Pelatihan Pemandu Wisata Paralayang;
 - Pelatihan Pengelolaan Usaha Homestay/Pondok Wisata;
 - Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata;
 - Pelatihan Pemasaran Digital;
 - Pertemuan teknis pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi.

Tidak hanya dalam melaksanakan pelatihan bagi pelaku usaha, tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Agam juga melakukan kegiatan Promosi dan Pelaksanaan event pariwisata seperti Pengadaan bahan promosi, Festival Pesona Danau Maninjau, Uda-Uni Duta Wisata, Famtrip, Anugerah Pesona Indonesia,

Branding, Anugrah Desa Wisata Indonesia, APKASI, Kerjasama dengan Asosiasi Homestay, Kerjasama dengan Provinsi sistem kepariwisataan nasional (SISPARNAS) dan Kerjasama lintas Organisasi Perangkat Daerah.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.44
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah Tahun 2023 dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	4,20	16,86	401,43	4,39	8,26	188,15
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	689.977	761.422	111,46	799.000	892.145	111,66

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2022 dengan tahun 2023. Untuk indikator kinerja Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum (ADHK) terlihat penurunan yang cukup signifikan dimana capaian tahun lalu sebesar 16,86% sedangkan tahun 2023 hanya 8,26%. Kondisi tahun 2022 sebenarnya bukanlah kondisi normal karena tahun 2022 merupakan tahun pertama Kabupaten Agam bebas dari pandemi covid-19, sehingga masyarakat kembali giat berusaha setelah hampir 3 tahun usaha yang ada seperti mati suri. Salah satu usaha yang bangkit dan berkembang pesat adalah usaha akomodasi dan makan minum. Hal ini didukung oleh lonjakan kunjungan wisata. Namun tahun 2023 kondisi usaha sudah agak stabil, walau ada peningkatan usaha namun laju pertumbuhannya tidak lagi melonjak tinggi seperti tahun 2022. Kondisi inilah yang menjadi dasar pertimbangan penetapan target tahun 2023 tidak mempedomani hasil evaluasi tahun 2022.

Indikator jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,2 , dimana pada tahun 2023 tingkat capaian kinerja sebesar 111,66% sedangkan

pada tahun 2022 sebesar 111,46%. Ketika disandingkan dengan target 2023 jumlah kunjungan wisatawan juga mengalami peningkatan sebanyak 93.145. Capaian ini tidak lepas dari pengaruh membaiknya perekonomian setelah melandainya kasus covid-19 sejak tahun 2022 serta tidak diberlakukan lagi pembatasan aktivitas masyarakat. Pada tahun 2023 juga ditetapkan sebagai tahun *visit beautiful west sumatera*, dimana perjalanan domestik dan mancanegara sudah dibuka seluas mungkin serta diiringi dengan peningkatan pengelolaan objek wisata, *homestay* dan fasilitas pariwisata ekonomi kreatif lainnya. Diantara faktor pendukung tersebut, ada faktor lain sebagai penunjang peningkatan jumlah wisatawan seperti masifnya promosi dan publikasi wisata oleh pelaku pariwisata dan ekraf, nagari wisata beserta pemerintah daerah dan unsur lainnya dalam bentuk event, pelayanan perjalanan wisata, eksplorasi budaya, alam serta pelaksanaan Studi tiru dari daerah lain baik dalam maupun luar sumatera barat karena prestasi tingkat nasional yang diraih seperti ADWI dan API.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026

Tabel 2.44
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Usaha
Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah dengan Target Akhir RPJM Tahun
2021- 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Tingkat Capaian
		2022	2023		
1.	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	16,86	8,26	4,13	200%
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	761.422	892.145	717.993	124,26%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja indikator Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum (ADHK) dan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 – 2026 telah melampaui target. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap target kinerja, mengingat masa pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 – 2026

masih tersisa 3 tahun lagi.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah pada tahun 2023 :

Tabel 2.45
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran
Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah
Tahun 2023

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.534.022.000	3.647.966.227	80,46%
2.	Program Pemasaran Pariwisata	709.701.000	677.317.100	95,44%
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.271.917.020	1.128.449.500	88,72%
	Total	6.515.640.020	5.453.732.827	83,70%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 3 program yang mendukung capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah Tahun 2023 dengan total anggaran Rp. 6.515.640.020,- realisasi Rp. 5.453.732.827,- dengan tingkat capaian realisasi 83,70%. Dari 3 program di atas, 1 program di antaranya memiliki capaian realisasi anggaran yang sangat tinggi (di atas 90%) yaitu Program Pemasaran Wisata.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.46
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian
Daerah Tahun 2023

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	4,39	8,26	188,15	6.515.640.020	5.453.732.827	83,70%	224,79
Jumlah Kunjungan Wisatawan	799.000	892.145	111,66				133,41

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga, pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum (ADHK) adalah sebesar 224,79% dan Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar 133,41%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dibelanjakan sangat efisien mendukung pencapaian target kinerja sasaran meningkatnya kontribusi usaha pariwisata terhadap perekonomian daerah tahun 2023.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.47
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program
Sasaran Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian
Daerah Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Tingkat Efektifitas
Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)			188,15%	
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi yang terkelola	132%	142,54
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah promosi wisata (%)	333%	56,50
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan pembinaan	147%	127,99
Jumlah Kunjungan Wisatawan			111,66%	
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi yang terkelola	132%	84,59
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah promosi wisata (%)	333%	33,53
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan pembinaan	147%	75,96

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Berdasarkan skala yang ditetapkan oleh Litbang Depdagri, tingkat efektifitas program, dapat dikelompokkan menjadi :

Skala Capaian Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40 – 59.99	Tidak Efektif
60 – 79.99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 3 program yang mendukung

capaian IKU Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum, terdapat 1 program yang nilai efektifitasnya 56,50 (tidak efektif) yaitu Program Pemasaran Pariwisata. efektifitasnya berada pada skala lebih dari 80%. Sedangkan 2 program lainnya nilai efektifitasnya berada pada skala di atas 80 %, sehingga dapat dikatakan sangat efektif dalam mendukung capaian kinerja IKU dimaksud.

Sedangkan untuk program-program yang mendukung capaian kinerja IKU Jumlah Kunjungan wisata, 1 program memiliki nilai 33,53 % (sangat tidak efektif), 1 program memiliki nilai efektifitas 75,96 (cukup efektif) sedangkan 1 program lainnya memiliki nilai efektifitas 84,59 (sangat efektif) dalam mendukung capaian kinerja UKU dimaksud.

C. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Konektifitas Wilayah Dan Kawasan

Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Konektifitas Wilayah Dan Kawasan” dapat terlihat pada capaian 2 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.48
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 Meningkatnya Konektifitas Wilayah Dan Kawasan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
1.	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi (ADHK)	Angka	4,57	5,74	125,60%
2.	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	%	82	74,27	90,57%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Laju pertumbuhan lapangan usaha transportasi (ADHK) merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tentang konektifitas wilayah dan kawasan. Indikator ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, yang terjadwal maupun tidak termasuk jasa kurir. Berdasarkan Kabupaten Agam Dalam Angka Tahun 2024, nilai PDRB lapangan usaha transportasi (ADHK) pada tahun 2023 berdasarkan harga konstan adalah 1.079,13 (milyar), sedangkan pada tahun 2022 sebesar 1.020,51 (milyar). Dengan begitu laju pertumbuhan lapangan usaha transportasi (ADHK) tahun 2023 adalah sekitar 5,74. Jika dibandingkan dengan target kegiatan sebesar 4,57, maka tingkat capaian realisasi pada tahun 2023 adalah

sebesar 125,60% dengan kategori capaian sangat tinggi. Kondisi ini berbanding lurus dengan meningkatnya perkembangan pariwisata di Kabupaten Agam yang juga berdampak kepada sektor transportasi. Di samping itu, dengan adanya kemajuan teknologi mempengaruhi distribusi barang, kalau selama ini jual beli dilakukan secara langsung, maka saat ini proses jual beli dilakukan secara online sehingga perkembangan jasa kurir meningkat.

Meningkatnya konektifitas wilayah dan kawasan juga tergambar pada capaian indikator persentase jalan kabupaten kondisi mantap. Yang dimaksud dengan jalan mantap adalah jalan yang telah diaspal dan dapat dilalui kendaraan roda 4. Sesuai dengan SK Bupati Agam Nomor 406 Tahun 2015 panjang jalan kabupaten adalah 1.694,63 km dengan jumlah ruas jalan sebanyak 699 ruas. Sampai dengan akhir tahun 2023 panjang jalan kondisi mantap di Kabupaten Agam adalah 1.258,63 Km atau 74,27%. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu sepanjang 1.389,59 km atau 82%, maka tingkat capaian realisasi sebesar 90,57%. Walaupun realisasi termasuk dalam kategori sangat tinggi, namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang ada untuk pembangunan dan perbaikan jalan.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Konektifitas Wilayah Dan Kawasan pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.49
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Konektifitas Wilayah Dan Kawasan Tahun 2023 dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi (ADHK)	1,38	3,95	286,23%	4,57	5,74	125,60%
2.	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	80	74,82	93,52%	82	74,27	90,57%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKJIP Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2023 dengan tahun 2022. Untuk indikator kinerja Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi (ADHK), realisasi kinerja tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2022. Namun

tingkat capaian kinerjanya lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan realisasi kinerja disebabkan karena membaiknya kinerja sektor transportasi dengan meningkatnya sektor pariwisata serta berubahnya pola transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet (e-commerce).

Berbeda dengan laju pertumbuhan lapangan usaha transportasi, Indikator persentase jalan kabupaten kondisi mantap justru terlihat mengalami penurunan kinerja dari 74,82 di tahun 2022 menjadi 74,27 di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa laju kerusakan jalan lebih besar dibandingkan upaya untuk melakukan pemeliharaan jalan tersebut. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang tersedia untuk pembangunan dan perbaikan jalan. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk menurunkan laju kerusakan jalan, antara lain : meningkatkan anggaran pemeliharaan jalan, mengawasi pemanfaatan jalan sesuai dengan kelas jalan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan jalan.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu disandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Konektifitas Wilayah Dan Kawasan dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.50
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Sasaran Meningkatnya
Konektifitas Wilayah Dan Kawasan dengan Target Akhir RPJMD Tahun
2021- 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		2022	2023		
1.	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi (ADHK)	3,95	5,74	4,26	134,74 %
2.	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	74,82	74,27	88	84,39%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja indikator Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi (ADHK) tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 telah mencapai 134,74%. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pentapan target pada tahun selanjutnya. Sedangkan untuk indikator kinerja Persentase jalan kabupaten kondisi mantap terlihat tingkat kemajuan sebesar 84,39% jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 – 2026. Terdapat selisih sebesar 13,73 poin selama kurun waktu 3

tahun tersisa sehingga target tahun 2026 dapat tercapai.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Konektifitas Wilayah Dan Kawasan pada tahun 2022 :

Tabel 2.51
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya Konektifitas Wilayah Dan Kawasan Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian
Laju Pertumbuhan PDRB lapangan usaha transportasi (ADHK)				
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	21.134.799.213	20.698.989.390	98%
Persentase jalan kabupaten kondisi mantap				
2.	Program Penyelenggaraan Jalan	78.531.130.886	69.021.796.874	88%
Total		99.665.930.099	89.720.786.264	90,02%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program yang mendukung capaian kinerja indikator Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi (ADHK) yaitu program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan realisasi anggaran mencapai 98%. Sedangkan program yang mendukung Persentase jalan kabupaten kondisi mantap adalah program penyelenggaraan jalan dengan realisasi anggaran yang mencapai 88%.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran Meningkatkan Konektifitas Wilayah Dan Kawasan. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.52
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran Meningkatnya Konektifitas Wilayah Dan Kawasan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi (ADHK)	4,57	5,74	125,60%	21.134.799.213	20.698.989.390	98%	128,16
Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	82	74,27	90,57%	78.531.130.886	69.021.796.874	88%	102,92

Sumber : Hasil Pengolahan data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga, pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian kinerja sasaran dengan capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi (ADHK) adalah sebesar 128,16% dan untuk indikator kinerja Persentase jalan kabupaten kondisi mantap tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 102,92%. Dari 2 indikator kinerja sasaran di atas, tingkat efisien penggunaan anggaran yang paling besar adalah indikator kinerja Lapangan Usaha Transportasi (ADHK) dimana capaian realisasi kinerja lebih besar dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran yang disediakan. Dapat dikatakan kedua program tersebut efisien dalam mendukung capaian kinerja indikator sasaran.

Di samping menganalisa tingkat efisiensi penggunaan anggaran, sumber daya lainnya yang perlu dianalisa adalah kinerja program yang mendukung capaian indikator kinerja sasaran. Hal ini berguna untuk mengetahui sejauh mana program yang dilaksanakan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran.

Tabel berikut memberikan gambaran efisiensi kinerja program terhadap capaian indikator kinerja sasaran :

Tabel 2.53
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatnya Konektifitas Wilayah Dan Kawasan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Tingkat Efektifitas
Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi (ADHK)			125,60%	
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rasio kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	97,94%	128,24
Persentase jalan kabupaten kondisi mantap			90,57%	
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten (%)	90,57%	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Berdasarkan skala yang ditetapkan oleh Litbang Depdagri, tingkat efektifitas program, dapat dikelompokkan menjadi :

Skala Capaian Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40 – 59.99	Tidak Efektif
60 – 79.99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masing – masing IKU memiliki 1 program yang mendukung capaian kinerjanya. Berdasarkan hasil pengolahan data, terlihat bahwa nilai efektifitas kedua program tersebut berada pada skal lebih dari 80, artinya kinerja 2 program dimaksud sangat efektif dalam mendukung capaian kinerja IKU pada sasaran meningkatnya konektifitas wilayah dan kawasan.

D. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi

Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi” dapat terlihat pada capaian 1 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.54
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi	Persen	15	41,42	276,16

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Persentase peningkatan nilai realisasi investasi adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan besar modal yang masuk dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Indikator ini dihitung dengan membandingkan selisih antara realisasi investasi pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. Total nilai investasi di Kabupaten Agam pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 291.542.500.985,-. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 120.766.785.270,-, sehingga nilai realisasi investasi menjadi Rp. 412.309.286.255,- sehingga realisasi peningkatan nilai investasi tahun 2023 adalah sebesar 41,42%. Jika dibandingkan dengan target, maka tingkat capaiannya adalah sebesar 276,16%.

Peningkatan realisasi investasi tahun 2023 didukung dan dilaporkan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di aplikasi Online Single Submission (OSS) serta kondisi perekonomian yang mulai stabil. Namun yang menjadi kendala adalah tidak semua perusahaan yang memiliki kesadaran untuk melaporkan nilai investasinya secara berkala. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya realisasi investasi yang tinggi juga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Agam, diantaranya melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk pelaku usaha mengenai penyampaian LKPM sebanyak 412 pelaku usaha dan melaksanakan pembinaan serta pengawasan ke perusahaan khususnya bagi perusahaan yang belum melaporkan LKPM.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.55
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi	10	37,22	372,2%	15	41,42	276,13%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2022 dengan tahun 2023. Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 41,42% meningkat dari tahun 2022 yang hanya sebesar 37,22% dengan selisih 4,2%. Namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam PK, terlihat adanya penurunan kinerja dari 372,2% menjadi 276,13%.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.56
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi dengan Target Akhir RPJM Tahun 2021- 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target 2026	Tingkat Kemajuan
		2022	2023		
1.	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi	37,22 (Rp.291,54)	41,42 (Rp412,30)	22 (Rp. 353,38)	188,27%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026, target kinerja untuk persentase peningkatan nilai realisasi investasi pada akhir periode (tahun 2026) adalah 22% dari total nilai investasi tahun sebelumnya (2025). Hal ini berarti terjadi peningkatan realisasi investasi sebesar 135% dari tahun 2020 selama 5 tahun pelaksanaan RPJMD 2021 – 2026, sehingga realisasi investasi di tahun 2026 menjadi Rp. 353.380.000.000,-.

Berdasarkan data yang ada, nilai investasi tahun 2023 adalah Rp. 412.309.286.255 atau meningkat sebesar 41,42% dari tahun 2022. Kalau dibandingkan dengan target nilai investasi pada tahun 2026 di RPJMD 2021 – 2026, maka realisasi

tahun ini telah melebihi target 2022 yang ditetapkan sebesar Rp. 353,38 M. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap penetapan target tahunan dan akhir periode tahun 2026 agar kinerja peningkatan nilai investasi dapat terus meningkat.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi pada tahun 2023 :

Tabel 2.57

Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Program Promosi Penanaman Modal	24.065.000	22.704.800	94,35%
2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	171.803.000	155.284.667	90,39%
3.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	448.700.000	246.029.680	54,83%
	Total	644.568.000	424.019.147	65,78%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Terdapat 3 program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Tahun 2023, dengan total anggaran Rp. 644.568.000,- dengan realisasi Rp. 424.019.147,- dengan rata – rata tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 65,78%. Dari 3 program tersebut, 1 program diantaranya memiliki tingkat capaian realisasi anggaran sangat rendah, sedangkan 2 lainnya capaian realisasi anggarannya sangat tinggi. Adapun Program dengan realisasi anggarannya sangat rendah yaitu Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dengan capaian realisasi 54,83%.

Tabel 2.58
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi	15	41,42	276,13%	644.568.000	424.019.147	65,78	419,78

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga, pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi adalah sebesar 419,78. Walaupun dapat dikatakan anggaran ini sangat efisien karena capaian kinerja IKU lebih besar daripada capaian realisasi anggaran, hal ini bisa juga diasumsikan bahwa anggaran yang dibelanjakan tidak berkorelasi dengan capaian kinerja sasaran.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program/ kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.59
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian
Program Sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Tingkat Efektifitas
Persentase peningkatan nilai realisasi investasi			276,13%	
1.	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Kemitraan Pengusaha besar dan UMKM	94%	293,76
2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Dokumen perizinan yang terbit tepat waktu (%)	90%	306,81

3.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMN / PMDA yang Mematuhi Peraturan Perundang – undangan Penanaman Modal	55%	502,05
----	--	--	-----	--------

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Berdasarkan skala yang ditetapkan oleh Litbang Depdagri, tingkat efektifitas program, dapat dikelompokkan menjadi :

Skala Capaian Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40 – 59.99	Tidak Efektif
60 – 79.99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh program yang mendukung capaian IKU, nilai efektifitasnya melebihi 100%. Dapat dikatakan bahwa program – program tersebut sangat efektif dalam mendukung capaian kinerja sasaran. Walaupun begitu nilai efektifitas yang sangat tinggi menunjukkan juga ada kekeliruan yang dilaksanakan pada penetapan target kinerja sasaran maupun program pada tahap perencanaan. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan penetapan target kinerja baik pada sasaran maupun program sehingga terlihat korelasi antara program dan sasaran strategis.

2.3.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran pada Misi III (Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan, Keterpaduan Tata Ruang Wilayah Dan Mitigasi Bencana)

Misi III pada RPJMD Tahun 2021-2026 memiliki tujuan “Mewujudkan pembangunan dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, tata ruang dan mitigasi bencana”. Tujuan ini memiliki 1 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.60
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi III Tahun 2023
Mewujudkan Pembangunan Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup,
Tata Ruang Dan Mitigasi Bencana

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Tingkat Kapasitas Ketahanan Daerah	Angka	Sedang	sedang	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Tingkat kapasitas ketahanan daerah menunjukkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Untuk menentukan tingkat kapasitas ketahanan daerah dilakukan dengan mengukur indeks ketahanan daerah melalui 7 kriteria dan 71 indikator. Adapun 7 kriteria tersebut adalah : perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistic, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta pengembangan system pemulihan bencana. Tingkat kapasitas ketahanan daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 berada pada posisi sedang dan ini sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian tujuan pada Misi III ini, didukung melalui 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang dapat dijelaskan per sasaran sebagai berikut:

A. Pengukuran Kinerja Sasaran Berkurangnya Pengrusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam

Kinerja sasaran strategis “Berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam”, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.61
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2023
Berkurangnya Pengrusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Sumber
Daya Alam

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target PK	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	70,39	72,61	103,15 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja

pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup. Nilai IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut, Penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diselenggarakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pengukuran IKLH Tahun 2023, kualitas lingkungan hidup Kabupaten Agam berada pada kategori baik dengan nilai IKLH 72,61, dengan rincian : indeks kualitas air 65,00 (sedang), indeks kualitas udara 91,40 (sangat baik) dan indeks tutupan lahan 50,93 (sedang). Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 70,39 tingkat capaian kinerja tahun ini sebesar 103,15%. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kabupaten Agam tahun 2023 lebih dipengaruhi oleh nilai Indeks Kualitas Udara yang mencapai 91,40. Ini berarti kualitas udara secara umum di Kabupaten Agam berada pada kategori sangat baik , masih bersih dan belum tercemar oleh polutan.

Beberapa faktor pendukung yang menyebabkan terjadinya perbaikan kualitas lingkungan hidup tahun 2023 antara lain :

- b. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair untuk melakukan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum dialirkan pada badan air.
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya penyelamatan lingkungan yang berkelanjutan dan berdampak terhadap adaptasi dan mitigasi lingkungan seperti pengelolaan limbah domestik dengan tidak membuangnya ke dalam air.
- d. Meningkatnya pengelolaan sampah
- e. Meningkatnya pengawasan rutin pada usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan emisi, limbah cair dan limbah B3.
- f. Melakukan kerjasama dan kolaborasi bersama stakeholder dalam pengolahan data terkait tutupan lahan.

Walaupun kualitas lingkungan hidup berada pada kategori baik, masih ditemukan beberapa kendala, antara lain :

- a. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan sehingga kegiatan yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan tidak tertangani dengan baik.
- b. Rentang kendali yang sangat luas dalam menjaga kualitas lingkungan hidup,

karena melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan hampir seluruhnya mempengaruhi kualitas lingkungan. Hal ini menjadi kekuatan sekaligus kelemahan dalam pengelolaan lingkungan hidup, sangat sulit melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam menjalankan berbagai program pengelolaan lingkungan hidup. Tak jarang kebijakan teknis antar instansi/ lembaga bertolak belakang dan tidak sinkron.

- c. Rendahnya cakupan pelayanan persampahan, mengakibatkan potensi pencemaran air permukaan dan air tanah semakin meningkat serta mengakibatkan dampak meningkatnya potensi penyakit berbasis lingkungan dan secara estetika menimbulkan ketidaknyamanan. Sementara itu timbulan sampah di Kabupaten Agam meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini terjadi bukan saja akibat pertambahan jumlah penduduk namun juga diakibatkan terjadinya pergeseran gaya/ pola hidup modern.
- d. Masih rendahnya penerapan regulasi terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi antara lain:

- 1. Melakukan kegiatan pembersihan air Danau Maninjau dari gulma dan sampah
- 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan seperti pendampingan program kampung iklim, pembinaan sekolah adiwiyata, pendampingan pengolahan sampah organik, dll.
- 3. Menfasilitasi program penghijauan yang dilakukan oleh lembaga / instansi / masyarakat dengan penyediaan bibit tanaman.
- 4. Melakukan pengujian sampel kualitas lingkungan
- 5. Melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan
- 6. Memproses perizinan lingkungan, monitoring dan evaluasi perizinan

Di samping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.62
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Berkurangnya
Pengrusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam
Tahun 2022 dengan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,80	70.39	103, 82	70,39	72,61	103,15

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat adanya peningkatan kinerja tahun 2023 dibandingkan tahun 2021 sebesar 2,22 poin. Pada tahun 2022 tingkat capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup sebesar 103,82%, sedangkan tingkat capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2023 sebesar 103,15%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan hidup, yang didukung oleh beberapa program/kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022, antara lain :

1. Melakukan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan melalui kegiatan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup.
2. Melakukan kegiatan inventarisasi mangrove yang ada di Kabupaten Agam sebagai langkah awal melakukan perlindungan terhadap mangrove.
3. Melakukan pemantauan terhadap kualitas lingkungan hidup melalui pengujian kualitas lingkungan di laboratorium pada titik pantau yang telah ditetapkan.
4. Melakukan kegiatan pemulihan Danau Maninjau melalui upaya pembersihan permukaan danau dari sampah, KJA yang tidak terpakai serta eceng gondok.
5. Melakukan pemeliharaan ruang terbuka hijau.
6. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang merupakan sumber pencemar.
7. Melakukan fasilitasi terhadap proses perizinan di bidang lingkungan hidup.
8. Melakukan fasilitasi penerapan reward terhadap masyarakat baik perorangan maupun kelompok dalam pengelolaan lingkungan hidup.
9. Meningkatkan pelayanan persampahan di Kabupaten Agam.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.63
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Berkurangnya Pengrusakan Dan
Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam dengan Target Akhir
RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		2022	2023		
1.	Indeks kualitas lingkungan hidup	70,39	72,61	69,5	104,47%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja indikator Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2023 telah melebihi target akhir periode RPJMD tahun 2021 – 2026 dan mencapai 104,47%. Dengan waktu yang masih tersisa kurang lebih 3 taahun lagi, peru menyesuaikan target tahunan sampai dengan tahun 2026. Dengan begitu diharapkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup tetap dapat dimaksimalkan dan kualitas lingkungan hidup tahun 2026 menjadi lebih baik.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia pada 2023 mencapai 72,54 dari skala 100 poin, meningkat tipis dibanding 2022 sebesar 72,42. Berikut rincian nilai IKLH Indonesia pada 2023 berdasarkan komponen dan kategori kualitasnya:

- Indeks kualitas air: 54,59 (kualitas sedang)
- Indeks kualitas udara: 88,67 (kualitas baik)
- Indeks kualitas tutupan lahan: 61,79 (kualitas sedang)
- Indeks kualitas air laut: 78,84 (kualitas baik)

Dari data nasional tersebut di atas, terlihat bahwa untuk indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Agam sedikit di atas IKLH nasional, hal ini menunjukkan kualitas lingkungan hidup secara umum di Kabupaten Agam melebihi rata – rata nasional. Jika dilihat perkomponen maka kualitas air dan udara lebih baik dai nasional, namun kualitas tutupan lahan lebih rendah.

Jika dibandingkan dengan IKLH Propinsi Sumatera Barat, kualitas lingkungan hidup Kabupaten Agam lebih rendah dibanding propinsi, dimana IKLH Propinsi Sumatera Barat adalah 75,85, dengan rincian sebagai berikut :

- Indeks Kualitas Air 57,05
- Indeks kualitas udara 90,53
- Indeks kualitas lahan 68,98
- Indeks kualitas air laut 86,19

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang

disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam pada tahun 2023 :

Tabel 2.64
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Berkurangnya
Pengrusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam
Tahun 2023

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Indeks kualitas lingkungan hidup				
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.041.400.000	1.652.542.886	80,95
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	5.707.430.661	4.109.395.104	72
3.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	479.532.150	475.314.420	99,12
4.	Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.314.344.042	1.091.229.223	83,02
5.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	754.051.205	748.168.420	99,22
6.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	12.107.000	12.106.000	99,99
7.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	102.022.350	98.080.000	96,14
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	32.883.900	32.220.000	97,98
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	11.739.100	11.512.400	98,07
10.	Program Pengelolaan Persampahan	9.478.246.061	8.539.354.693	90,09
Total		19.933.756.469	16.769.923.146	84,13

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 10 program yang mendukung capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan total anggaran Rp. 19.933.756.469,- dengan realisasi Rp. 16.769.923.146,- dengan persentase capaian realisasi 84,13%. Dari 10 program tersebut, 1 diantaranya yaitu Program

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase realisasi anggarannya dalam kategori sedang (72%), sedangkan 9 program lainnya dengan realisasi tinggi dan sangat tinggi.

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran indeks kualitas lingkungan hidup dapat digambarkan pada pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.65
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,80	70.39	103, 82	23.225.623.944	20.432.233.771	89,95	115,42

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga, pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebesar 115,42%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dibelanjakan sangat efisien mendukung pencapaian target kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.66
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program
Sasaran Berkurangnya Pengrusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Dan
Sumber Daya Alam

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Tingkat Efektifitas
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			103.82	
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	97,86	106,09
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase penduduk berakses air minum laya	109,11	95,15
3.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	100	103,82
4.	Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kualitas air dan revitalisasi danau maninjau	103,06	100,74
5.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase keanekaragaman hayati yang dikelola	100	103,82
6.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	66,67	155,72
7.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan terhadap izin PPLH dan PUU LH yang ditebitkan	100	103,82
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah penghargaan lingkungan yang diterima masyarakat dan pemerintah daerah	100	103,82
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	103,82
10.	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah kabupaten	84,86	122,34

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan

antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Berdasarkan skala yang ditetapkan oleh Litbang Depdagri, tingkat efektifitas program, dapat dikelompokkan menjadi :

Skala Capaian Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40 – 59.99	Tidak Efektif
60 – 79.99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa IKU Indeks Kualitas Lingkungan didukung oleh 10 program. Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai efektifitas seluruh program tersebut berada pada skala di atas 80, artinya kinerja seluruh program yang ada sangat efektif mendukung capaian IKU dimaksud.

Kalau dilihat kinerja per program, dari 10 program dimaksud 8 diantaranya memiliki persentase capaian kinerja sangat tinggi, 1 program dengan persentase capaian kinerja tinggi dan 1 program dengan persentase capaian kinerja sedang. Secara umum, seluruh program dinilai efisien dalam mendukung capaian kinerja sasaran, hal ini terlihat dari nilai tingkat capaian realisasi kinerja sasaran yang lebih besar daripada tingkat caaian kinerja program.

Adapun beberapa kendala/ permasalahan tetap ditemui dalam melaksanakan program antara lain :

- Pencemaran Danau Maninjau yang sampai saat ini belum terselesaikan, karena berkaitan dengan ekonomi masyarakat sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga / instansi pemerintah bai di tingkat vertical maupun horizontal.
- Ketersediaan tenaga PPLHD (Pejabat pengawas lingkungan hidup) yang belum memenuhi kebutuhan beban kerja OPD, sehingga menyebabkan rendahnya jangkauan dan kualitas pengawasan. Sampai dengan saat ini jumlah PPLHD yang ada hanya 1 orang, sedangkan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin yang perlu diawasi adalah 91 buah. Sehingga pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan diprioritaskan terhadap usaha dan/atau kegiatan yag beresiko tinggi terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dari 91 usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin PPLH, terdapat 26 yang menjadi prioritas dan dilakukan pengawasan pada tahun 2023.

- Keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran untuk pengelolaan lingkungan terutama pengelolaan sampah. Tahun 2023 ini target pengelolaan sampah dibagi atas dua indikator yaitu Pengurangan sampah dengan target 17% dan realisasi 12,85% serta Penanganan sampah dengan target 41% dan terealisasi 30,19% dengan total pengelolaan sampah Kabupaten Agam sebesar 43,28%.
- Penutupan sementara TPA Regional Payakumbuh karena adanya longsor pada Bulan Desember 2023, menjadi persoalan tersendiri bagi pengelolaan sampah di Kabupaten Agam. Sampah yang berasal dari Agam Wilayah Timur termasuk dari Kota Bukittinggi yang biasanya diangkut ke TPA Regional Payakumbuh, sejak kejadian longsor tersebut terpaksa dibawa ke TPA Sungai Jariang yang ada di Agam Wilayah Barat. Hal ini tentu berpengaruh kepada kinerja dan umur TPA Sungai Jariang itu sendiri.

Sehubungan dengan kendala dan permasalahan di atas, beberapa rekomendasi tindak lanjut yang dapat dilaksanakan antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi terkait upaya pemulihan Danau Maninjau dengan seluruh stakeholder termasuk masyarakat
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat di sekitar Danau maninjau dalam menyusun program pemulihan Danau Maninjau.
3. Menghitung kembali kebutuhan JF PPLH sesuai dengan beban kerja Perangkat Daerah dan mengusulkan kekurangannya dalam rencana pengadaan ASN.
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN, meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
5. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup.
6. Melakukan edukasi pengelolaan lingkungan hidup terutama terkait pengelolaan sampah kepada masyarakat sehingga minimalisasi sampah pada sumber penghasil sampah dapat dilaksanakan.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketaatan Terhadap Tata Ruang

Kinerja sasaran strategis “Meningkatkan Ketaatan Terhadap Tata Ruang”, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.67
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2023
Meningkatnya Ketaatan Terhadap Tata Ruang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target PK	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Indeks Ketaatan Terhadap Tata Ruang	Indeks	98,65	99,98	101,35

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Indeks ketaatan terhadap tata ruang menunjukkan tingkat ketaatan/kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2022, Indeks ketaatan terhadap tata ruang ini didapat dengan membandingkan luas kawasan yang sesuai dengan luas Kabupaten Agam seluruhnya. Dari data yang ada luas wilayah yang sesuai dengan RTRW adalah 222.556,68 km dari 222.589 km total wilayah Kabupaten Agam. Dengan begitu total wilayah yang memiliki ketaatan terhadap tata ruang adalah 99,98%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 98,65% maka tingkat capaian kinerja adalah sebesar 101,35% (sangat tinggi). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa secara umum pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Agam telah sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan. Walaupun begitu masih ditemukan beberapa kendala/ permasalahan yang ditemui dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang antara lain :

1. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami dan mau mematuhi ketentuan penataan ruang. Hal ini disebabkan salah satunya karena keterbatasan lahan yang dimiliki.
2. Belum tersedianya petugas / pejabat pengawas tata ruang di Kabupaten Agam.
3. Ketersediaan regulasi terkait rencana detail tata ruang yang masih sedikit. Sampai saat ini jumlah dokumen RDTR yang dimiliki baru 4 dokumen dari 12 RDTR yang wajib disusun sebagaimana amanat Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam atau 33,33%.
4. Dokumen penataan ruang yang ada saat ini belum berbasiskan OSS

Sehubungan dengan permasalahan di atas, beberapa rekomendasi tindak lanjut yang harus dilaksanakan antara lain :

1. Melakukan sosialisasi tentang penataan ruang kepada masyarakat
2. Mengintensifkan kegiatan pengawasan, menegakkan aturan penataan ruang dan memberikan punish dan reward dalam pelaksanaan tata ruang.
3. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga / instansi terkait dalam penataan ruang

4. Menghitung beban kerja perangkat daerah dalam penataan ruang dan mensulkan dalam rencana pengadaan ASN
5. Melakukan percepatan penyusunan dokumen rencana detail tata ruang
6. Memperkuat sistem penyelenggaraan penataan ruang berbasis IT.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatkan Ketaatan Terhadap Tata Ruang pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.68
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketaatan Terhadap Tata Ruang Tahun 2023 dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Indeks Ketaatan Terhadap Tata Ruang	98,60	98,55	99,95%	98,65	99,98	101,35

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2022 dengan tahun 2023. Realisasi capaian kinerja tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan capaian 2022 sebesar 1,4 poin. Peningkatan kinerja ini didukung dengan adanya aplikasi SIMTARU (Sistem Informasi Tata Ruang) sehingga memudahkan kerja Dinas PUTR dalam menyelenggarakan penataan ruang. Walaupun begitu terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam menjaga ketaatan terhadap tata ruang, antara lain :

- Keterbatasan SDM pengelola tata ruang
- Belum tersedianya regulasi penataan ruang yang berbasis OSS
- Regulasi dari pusat yang sering berubah
- Masih terdapat kelompok masyarakat yang tidak patuh terhadap penataan ruang

Untuk mengetahui cakupan pencapaian target akhir RPJMD 2021 – 2026, serta untuk menyusun strategi pencapaiannya dapat dilihat persandingan data berikut ini :

Tabel 2.69
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketaatan Terhadap
Tata Ruang dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		2022	2023		
1.	Indeks ketaatan terhadap tata ruang	98,55	99,98	98,70	101,30 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian realisasi indikator Indeks Ketaatan Terhadap Tata Ruang tahun 2023 telah melebihi target akhir periode RPJMD periode 2021 – 2026, yaitu sebesar 101,30%. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk Perjanjian Kinerja tahun berikutnya penetapan target perlu disesuaikan dengan capaian realisasi tahun 2023.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Ketaatan Terhadap Tata Ruang pada tahun 2023 :

Tabel 2.70
Program dan Anggaran yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya
Ketaatan Terhadap Tata Ruang Tahun 2023

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	persentase Capaian
1.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.275.704.000	1.093.815.875	85,74
Total		1.275.704.000	1.093.815.875	85,74

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 1 program yang mendukung capaian kinerja indikator Indeks ketaatan terhadap tata ruang dengan total anggaran Rp. 1.275.704.000,- realisasi Rp. 1.093.815.875,- dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 85,74%, dengan kategori realisasi tinggi. Secara umum kegiatan dapat terselenggara dengan baik.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran meningkatkan ketaatan terhadap tata ruang. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.71
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran Meningkatkan Ketaatan Terhadap Tata Ruang Tahun 2023

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Indeks Ketaatan terhadap tata ruang	98,65	99,98	101,35	1.275.704.000	1.093.815.875	85,74	118,21

Sumber : Pengolahan Data LKjIP Kab. Agam Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga, pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator Indeks Ketaatan Terhadap Tata Ruang adalah sebesar 118,21. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dibelanjakan sangat efisien mendukung pencapaian target kinerja Indeks Ketaatan terhadap tata ruang.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program/ kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.72
Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran
Meningkatkan Ketaatan Terhadap Tata Ruang

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Tingkat Efektifitas
Indeks Ketatan terhadap tata ruang			101.35	
1.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan Terhadap RTRW	101,35	1

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas

sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Berdasarkan skala yang ditetapkan oleh Litbang Depdagri, tingkat efektifitas program, dapat dikelompokkan menjadi :

Skala Capaian Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40 – 59.99	Tidak Efektif
60 – 79.99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa IKU Indeks Ketaatan Terhadap Tata Ruang didukung oleh 1 program yaitu Program Penyelenggaraan Tata Ruang. Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai efektifitas program tersebut berada pada skala di atas 80, artinya kinerja program tersebut sangat efektif dalam mendukung capaian kinerja IKU dimaksud.

Dari capaian indikator kinerja program penyelenggaraan penataan ruang sebesar 101,35%, terlihat adanya korelasi program dengan pencapaian sasaran meningkatkan ketaatan terhadap tata ruang. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain :

- Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten melalui pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) secara manual dan melalui aplikasi OSS, melakukan pengawasan terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041, meningkatkan kompetensi SDM serta perkuatan regulasi untuk pengawasan.
- Penyusunan dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Banuhampu dan fasilitasi RDTR WP Palembang melalui bantuan teknis Kementerian ATR / BPN
- Pengembangan sistem informasi tata ruang (SIMTARU)

C. Berkurangnya Resiko Bencana Terhadap Manusia Dan Lingkungan

Kinerja sasaran strategis “meningkatnya bencana terhadap manusia dan lingkungan”, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.73
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2023 Berkurangnya Resiko Bencana Terhadap Manusia Dan Lingkungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target PK	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi	Indeks	79	79	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah di Propinsi Sumatera Barat yang sangat rentan terhadap bencana. Hampir seluruh jenis bencana ada di Kabupaten Agam sehingga Kabupaten Agam sering disebut juga dengan “etalase bencana”. Pada tahun 2023, jumlah bencana yang terjadi terhitung sebanyak 264 kali dengan jenis bencana antara lain banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, abrasi pantai, letusan gunung api, angin kencang, angin puting beliung, dll. Dan seluruh kejadian bencana dimaksud dapat ditangani dengan baik dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan seluruh stake holder yang ada.

Merujuk kepada definisi operasional indikator kinerja pada RPJMD, indikator persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi dihitung berdasarkan komulatif dari persentase penanganan pra bencana, persentase penanganan tanggap darurat bencana, persentase penanganan pasca bencana serta persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan ditetapkannya dokumen dimaksud. Dari 4 indikator tersebut yang belum terpenuhi adalah penetapan dokumen kebencanaan, dengan begitu integrasi penanggulangan bencana baru terpenuhi 79%. Dengan begitu tingkat capaian target kinerja adalah 100%.

Walaupun tingkat capaian kinerja sangat tinggi, namun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan, antara lain :

- Belum terbangunnya system informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi dari tingkat bawah (nagari) sampai ke kabupaten.
- Ketersediaan anggaran yang kurang memadai termasuk untuk pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
- Ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas
- Masih kurangnya kualitas manajemen data serta akurasi penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel

berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya bencana terhadap manusia dan lingkungan pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.74
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Berkurangnya Resiko Bencana Terhadap Manusia Dan Lingkungan Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penanggulangan Bencana Yang Terintegrasi	82,53	100%	121,17%	79	79%	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2022 dengan tahun 2023. Capaian indikator kinerja persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya terlihat adanya penurunan kinerja. Tahun sebelumnya realisasi kinerja adalah 100% sedangkan tahun ini hanya sebesar 79%. Penurunan kinerja ini disebabkan karena persepsi terhadap indikator kinerja yang tidak sama sehingga menyebabkan adanya perubahan angka capaian kinerja. Tapi walaupun ada penurunan capaian kinerja, namun penanggulangan bencana yang terjadi dapat terlaksana seluruhnya (100%).

Beberapa upaya yang dilakukan untuk melakukan penanganan bencana terintegrasi, antara lain :

- Meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholder dalam penanganan bencana terintegrasi.
- Melakukan edukasi penanggulangan kebencanaan kepada masyarakat atau lembaga seperti sekolah.
- Memaksimalkan program desa tangguh bencana
- Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
- Menyusun dan mensosialisasikan regulasi terkait kebijakan induk penanggulangan bencana.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran meningkatnya bencana terhadap manusia dan lingkungan dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.75
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Berkurangnya Pengrusakan
Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam dengan
Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		2022	2023		
1.	Persentase Penanggulangan Bencana Yang Terintegrasi	100	79	91	86,81%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi kinerja indikator persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi tahun 2023 memenuhi target kinerja akhir RPJMD periode 2021 – 2026 sebesar 86,81%. Masih terdapat selisih sebesar 12 poin untuk mencapai target di tahun 2026. Dengan sisa waktu 3 tahun, maka minimal harus ada peningkatan kinerja sebesar 4 poin.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya bencana terhadap manusia dan lingkungan pada tahun 2022 :

Tabel 2.76
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran
Berkurangnya Resiko Bencana Terhadap Manusia Dan Lingkungan
Tahun 2023

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	Program Penanggulangan Bencana	1.617.093.050	1.492.911.691	92,32
2.	Program Penanganan Bencana	381.159.541	295.207.500	77,45
3.	Program Pengembangan Permukiman	498.571.810	397.030.000	79,63
4.	Program Pengembangan Perumahan	338.352.150	273.278.684	80,77
5.	Program Kawasan Permukiman	506.423.750	500.800.400	98,89
6.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.115.774.300	2.113.390.500	99,89

7.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	628.779.863	622.108.249	98,94
Total		6.086.154.464	5.694.727.024	93,57%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab.Agam Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 7 program yang mendukung capaian kinerja indikator persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan total anggaran Rp. 6.086.154.464,- realisasi Rp. 5.694.727.024,- dengan persentase realisasi 93,57. Dari 7 program yang dilaksanakan 4 diantaranya memiliki tingkat realisasi anggaran sangat tinggi dan 2 program lainnya dengan tingkat realisasi anggaran tinggi.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran berkurangnya resiko bencana terhadap manusia dan lingkungan. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.77
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Berkurangnya
Resiko Bencana Terhadap Manusia Dan Lingkungan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Persentase Penanggulangan Bencana Yang Terintegrasi	79	79	100%	6.086.154.464	5.694.727.024	93,57%	1,07

Sumber : Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga, pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator Persentase Penanggulangan Bencana yang Terintegrasi adalah sebesar 1,07, dimana tingkat capaian kinerja sasaran lebih besar daripada tingkat capaian kinerja program. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dibelanjakan sangat efisien mendukung pencapaian target kinerja Persentase Penanggulangan Bencana Yang Terintegrasi.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya anggaran, analisa

terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.78
Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran
Berkurangnya Resiko Bencana Terhadap Manusia Dan Lingkungan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Tingkat Efektifitas
Persentase Penanggulangan Bencana Yang Terintegrasi			100	
1.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	91,95	108,75
2.	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	100	100
3.	Program Pengembangan Permukiman	Persentase jalan lingkungan permukiman kondisi baik	102,50	97,56
4.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	175,14	57,14
5.	Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya jumlah unit Rumat tidak layak huni (RTLH)	100	100
6.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kab/kota yang ditangani	100	100
7.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100	100

Sumber : Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Tabel di atas menggambarkan tingkat capaian kinerja program-program yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran berkurangnya Resiko Bencana Terhadap Manusia Dan Lingkungan. Dari 7 program yang dilaksanakan, 6 diantaranya memiliki tingkat capaian kinerja sangat tinggi dan 1 program dengan kinerja tinggi.

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Berdasarkan skala yang ditetapkan oleh Litbang Depdagri, tingkat

efektifitas program, dapat dikelompokkan menjadi :

Skala Capaian Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40 – 59.99	Tidak Efektif
60 – 79.99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 7 program yang mendukung capain kinerja IKU Persentase Penanggulangan Bencana Yang Terintegrasi, terdapat 1 program dengan nilai efektifitas 57,15 (tidak efektif) yaitu Program Pengembangan Perumahan, sedangkan 6 program lainnya berada pada skala di atas 80, sehingga dapat dikatakan efektif mendukung capaian kinerja dimaksud.

2.3.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Pada Misi IV (Membangun Masyarakat Yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkualitas Dan Berkarakter)

Terdapat 3 tujuan yang akan dicapai pada misi “ membangun masyarakat yangmandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter” yaitu :

- Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter
- Terwujudnya sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing
- Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan sosial

Adapun setiap tujuan didukung oleh beberapa sasaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.3.3.4.1 Tujuan 1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berkarakter

Tabel berikut menggambarkan tentang tujuan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter.

Tabel. 2.79
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi IV Tahun 2023
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berkarakter

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,84	73,98	100,19

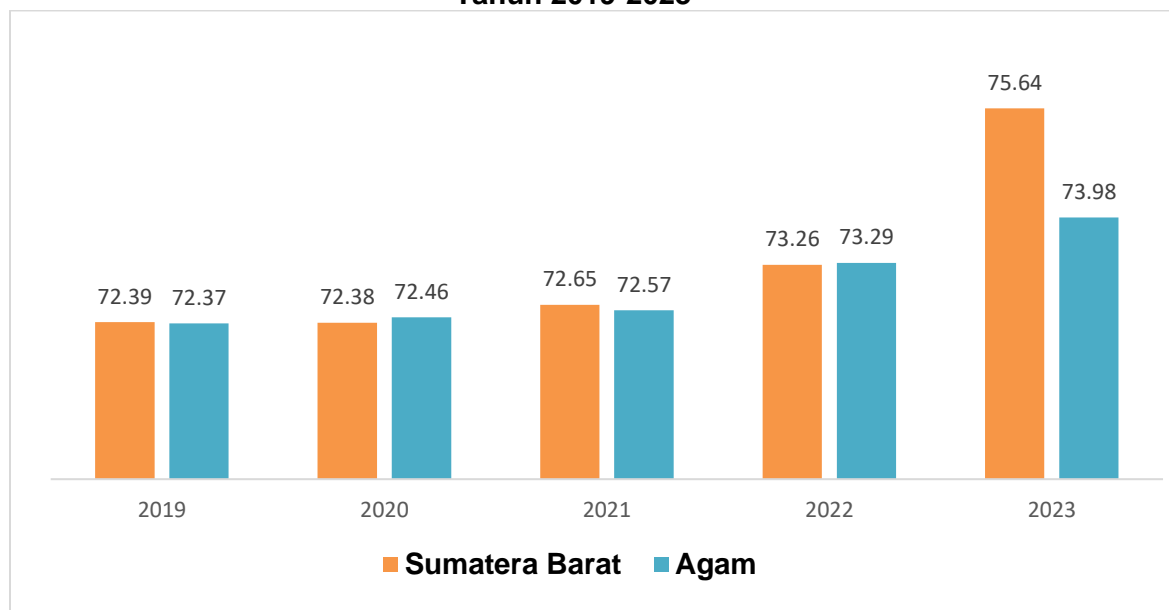
Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk

mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi utama yaitu : 1) umur panjang dan hidup sehat, 2) pengetahuan dan 3) standar hidup layak. Dalam Perjanjian Kinerja Bupati Agam Tahun 2023 ditargetkan IPM sebesar 73,84 capaian 73,98 dengan tingkat capaian 100,19%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 mencapai 75,64 persen. Dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, Kota Padang merupakan Kota dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi pada tahun 2023 (83,29) diikuti Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota Solok. IPM Kabupaten Agam pada tahun 2023 sebesar 73,29, ini merupakan IPM tertinggi bersama IPM Kabupaten Tanah Datar jika dibandingkan dengan 12 kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Sedangkan IPM terendah di Provinsi Sumatera Barat berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai (62,19)

IPM Kabupaten Agam menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Tahun 2019, IPM Kabupaten Agam mencapai 72,37 hingga tahun 2023 mencapai 73,98. Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan terkait pembangunan manusia yang telah diambil pemerintah daerah memiliki dampak positif terhadap kualitas pembangunan manusia. Berdasarkan angka capaian IPM dapat dilihat bahwa level pencapaian pembangunan manusia selama periode lima tahun terakhir ini berada di kelompok tinggi, karena IPM berada pada rentang 70 – 80. Untuk lebih jelasnya perkembangan dan pertumbuhan IPM Kabupaten Agam dapat dilihat pada Grafik berikut ini.

Grafik 2.1
Nilai dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Tahun 2023

Pencapaian tujuan pada Misi IV didukung melalui 2 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan per sasaran sebagai berikut :

2.3.3.4.1.1 Meningkatkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkarakter

Kinerja sasaran strategis “meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter” dapat terlihat pada capaian 2 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.80
Realisasi Indikator Sasaran Meningkatkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkarakter

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target PK	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	14,53	13,89	95,6%
2.	Rata-rata lama sekolah	Angka	9,3	9,22	99,13%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Angka harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun keatas di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Agam pada tahun 2023 adalah sebesar 13,89 tahun dengan tingkat capaian 95,6% jika dibandingkan dengan target sebesar 14,53. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan diikuti oleh anak pada

umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 13,89 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan Diploma II. Harapan lama sekolah Kabupaten Agam masih berada di bawah Propinsi Sumatera Barat yang mencapai 14,11. Untuk Kabupaten / Kota lain di Propinsi Sumatera Barat, harapan lama sekolah yang paling tinggi adalah Kota Padang (16,56) yang terendah adalah Kabupaten Dharmasraya (12,68), sedangkan Kabupaten Agam berada pada urutan ke-10. Adapun Faktor faktor yang mempengaruhi harapan lama sekolah meliputi berbagai sektor, baik kondisi ekonomi masyarakat, akses dan kualitas layanan pendidikan, maupun dukungan kesehatan masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu upaya peningkatan harapan lama sekolah seiring sejalan dengan upaya peningkatan perekonomian, pendidikan dan juga kesehatan.

Rata-rata lama sekolah atau *years of schooling* digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Angka rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal pada usia 25 tahun ke atas. Capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Agam pada kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung meningkat setiap tahun, namun demikian masih dibawah rata rata lama sekolah propinsi. Pada tahun 2023 rata-rata lama sekolah kabupaten Agam mencapai 9,22. Walaupun tidak memenuhi target yang ditetapkan namun masuk dalam kategori sangat tinggi dengan tingkat capaian 99,13%. Capaian Kabupaten Agam tahun ini sedikit lebih rendah dari rata – rata lama sekolah di Propinsi Sumatera Barat yang mencapai 9,28, namun lebih tinggi dari capaian nasional dengan angka 8,77. Rata- rata lama sekolah tertinggi di Propinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang Panjang dengan nilai 11,94 dan yang terendah adalah Kabupaten Mentawai dengan angka 7,76.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu :

Tabel 2.81
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkarakter Tahun 2023 dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Angka Harapan Lama Sekolah	14,31	13,88	97.00%	14,53	13,89	95,6%
2.	Rata-rata lama sekolah	9,16	8,98	98.03%	9,3	9,22	99,13%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2022 dengan tahun 2023. Data di atas menunjukkan bahwa angka harapan lama sekolah tahun 2023 meningkat sedikit dibanding tahun 2022 dengan selisih 0,01. Walaupun begitu pertumbuhan peningkatannya mengalami penurunan, hal ini terlihat dari turunnya tingkat capaian tahun 2023 dibanding tahun 2022 sebesar 1,4 poin. Sedangkan rata – rata lama sekolah juga mengalami peningkatan tahun ini jika dibanding dengan tahun lalu, dengan peningkatan sebesar 0,24 poin. Pertumbuhan peningkatannya juga mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun lalu sebesar 1,1 poin.

Adapun faktor yang mempengaruhi angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah adalah :

- Pemerataan akses pendidikan sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan.
- Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas
- Pemerataan mutu pendidikan melalui pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
- Peningkatan ekonomi masyarakat.

Beberapa kendala yang ditemui dalam dalam pemenuhan target harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah , antara lain :

- Sebagian kecil wilayah di Kabupaten Agam masih ada yang kesulitan dalam mengakses sarana pendidikan karena lokasi tempat tinggal yang cukup jauh dari lokasi sekolah, seperti pada beberapa wilayah di Kecamatan Malalak, Kecamatan Palupuh dan Kecamatan Palembayan.
- Faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu sehingga masih ada beberapa anak yang putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

- Pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, beberapa upaya yang dilakukan antara lain :

- Meningkatkan koordinasi antar stakeholder terkait dalam memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas pendidikan.
- Mendorong partisipasi masyarakat / swasta dalam meningkatkan akses masyarakat ke fasilitas pendidikan
- Melalui APBD Kabupaten Agam setiap tahunnya, menyediakan beasiswa dan bantuan biaya hidup untuk anak-anak dari keluarga kurang sejahtera yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Melakukan peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Melalui bimbingan teknis, workshop dan rapat koordinasi lainnya.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.82
Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkarakter dalam Pembangunan Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Capaian		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		2022	2023		
1.	Angka Harapan Lama Sekolah	13.88	13,89	15,2	91,4%
2.	Rata-rata lama sekolah	8.98	9,22	9,7	95,05%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja indikator Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2023 telah memenuhi target akhir periode RJMD Tahun 2021 – 2026 sebesar 91,4% . Selisih capaian tahun 2023 dengan target tahun 2026 adalah 1,31. Jika dibandingkan dengan waktu yang tersisa 3 tahun lagi, maka paling tidak setiap tahunnya angka harapan lama sekolah harus meningkat sebanyak 0,44 poin. Sedangkan untuk indikator kinerja rata-rata lama sekolah terlihat pemenuhan target akhir periode RPJMD sebesar 95,05 % dengan selisih capaian sebesar 0,48. Jika dibandingkan dengan waktu yang tersisa 3 tahun lagi, maka harus ada peningkatan rata – rata lama sekolah 0,16 poin setiap tahunnya.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter pada tahun 2023 :

Tabel 2.83
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkarakter Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	103.666.753.178	99.092.588.533	95,59%
2.	Program Pengembangan Kurikulum	252.296.790	238.010.948	94,34%
3.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	24.843.850	20.517.000	82,58%
4.	Program Pembinaan Perpustakaan	412.464.680	266.294.050	64,56 %
	Total	104.356.358.498	99.617.410.531	95,45%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKJP Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 4 program yang mendukung capaian kinerja indikator Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama sekolah dengan total anggaranRp. 104.356.358.498,- dengan realisasi Rp. 99.617.410.531,- dengan tingkat capaian realisasi sebesar 95,45%.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapatdiketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.84
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatkan PendidikanYang Berkualitas Dan Berkarakter Tahun 2023

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Angka Harapan Lama Sekolah	14,53	13,89	95,60 %	104.356.358.498	99.617.410.531	95,45%	100,16

Rata-rata lama sekolah	9,3	9,22	99,13 %				103,86
------------------------	-----	------	---------	--	--	--	--------

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan AnggaranKementerian / Lembaga, pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian kinerja sasaran dengan capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai efisiensi anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja Angka Harapan Lama Sekolah adalah 100,16%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan efisien dalam mendukung capaian kinerja sasaran. Hal ini juga terlihat dari besarnya nilai tingkat capaian kinerja sasaran dibandingkan capaian realisasi anggaran. Sama halnya dengan rata-rata lama sekolah, anggaran yang tersedia dapat dikatakan efisien dalam mendukung capaian kinerja sasaran dengan nilai efisien 103,86%, dimana tingkat capaian kinerja sasaran lebih besar dibandingkan capaian realisasi anggaran.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program/ kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis programdan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.85
Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran
Meningkatkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkarakter

No	Program/Kegiatan	IndikatorKinerja	Persentase Capaian	Tingkat Efektifitas
Angka Harapan Lama Sekolah			95,6%	
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	124	77,10
2.	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase tahapan penyusunan silabus Muatan lokal	100	95,60
3.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah sekolah yang telah memiliki pendidik dan tenaga Kependidikan sesuai standar (unit)	100	95,60

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Tingkat Efektifitas
4.	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	100	95,60
Rata-rata lama sekolah			99,13%	
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	124	79,94
2.	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase tahapan penyusunan silabus Muatan lokal	100	99,13
3.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah sekolah yang telah memiliki pendidik dan tenaga Kependidikan sesuai standar (unit)	100	99,13
4.	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	100	99,13

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Berdasarkan skala yang ditetapkan oleh Litbang Depdagri, tingkat efektifitas program, dapat dikelompokkan menjadi :

Skala Capaian Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40 – 59.99	Tidak Efektif
60 – 79.99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel 2.86 dapat dilihat bahwa capaian kinerja IKU Angka harapan lama sekolah didukung oleh 4 program,. Dari 4 program dimaksud, 1 di antaranya yaitu Program Pengelolaan Pendidikan memiliki nilai efisiensi 77,10 (cukup efektif), sedangkan 3 lainnya memiliki nilai efektifitas di atas 80 sehingga sangat efektif dalam mendukung capaian kinerja IKU dimaksud. Rata-rata lama sekolah juga didukung dengan 4 program. Satu program di antaranya memiliki nilai efektifitas 79,94 (cukup efektif) sedangkan 3 program lainnya memiliki efektifitas di atas 80 sehingga sangat efektif dalam mendukung capaian IKU dimaksud.

2.3.3.4.1.2 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas

Sasaran strategis kedua pada Tujuan 1, Misi IV adalah meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kinerja sasaran tersebut tergambar pada capaian indikator Angka Harapan Hidup. Tabel berikut menggambarkan capaian kinerja indikator angka harapan hidup sesuai dengan Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2023 :

Tabel 2.86
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2023 Meningkatkan Pelayanan
Kesehatan Yang Berkualitas

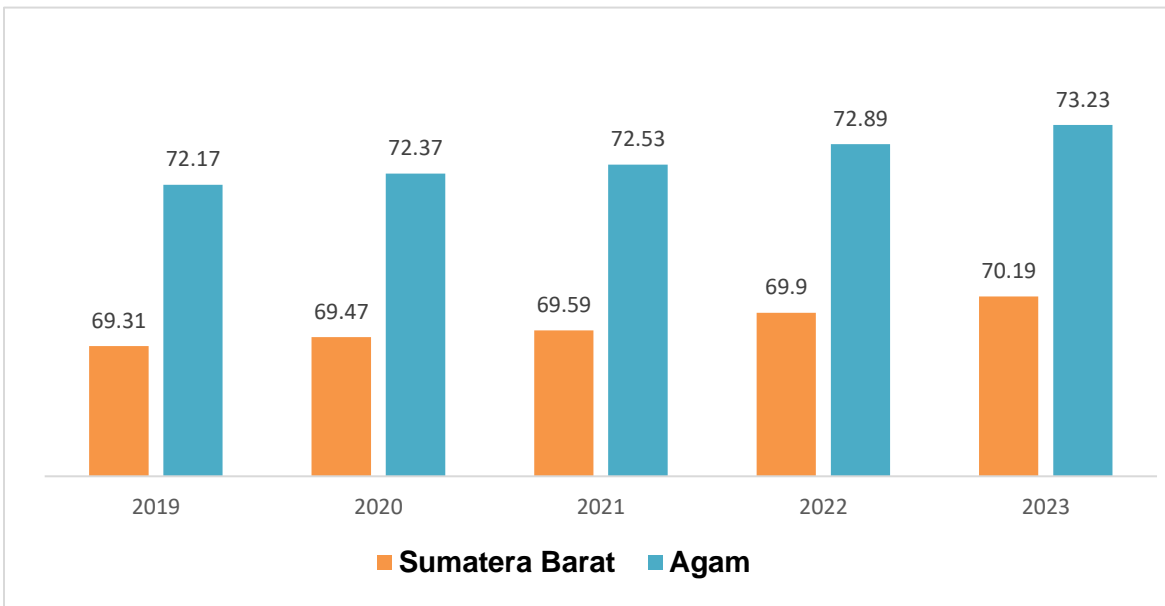
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target PK	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Angka Harapan Hidup	Angka	72,92	73,23	100,43

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator makro yang menggambarkan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka harapan hidup Kabupaten Agam pada tahun 2023 73,23, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 72,92, dengan tingkat capaian 100,43% (kategori sangat tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Agam secara umum dapat dikatakan baik. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Propinsi Sumatera Barat, angka harapan hidup Kabupaten Agam merupakan yang tertinggi, bahkan lebih tinggi dari angka harapan hidup Propinsi yang mencapai 70,19. Namun capaian angka harapan hidup Kabupaten Agam tahun 2023 masih di bawah nasional yang mencapai 73,93.

Grafik 2.2
Perbandingan Angka Harapan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 - 2023



Sumber : Agam Dalam Angka, Tahun 2023

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.87
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Tahun 2023 dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Angka Harapan Hidup	72,74	72.89	100,21%	72,92	73,23	100,43%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2022 dengan tahun 2023. Berdasarkan data di atas, terlihat adanya peningkatan realisasi kinerja jika dibandingkan tahun lalu sebesar 0,34 poin. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja di bidang pelayanan kesehatan yang berkualitas. Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut antara lain meningkatnya perekonomian masyarakat, ketersediaan pangan dan gizi yang cukup, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan serta meningkatnya kualitas layanan kesehatan. Berdasarkan data Agam Dalam Angka Tahun 2023, selama lima tahun terakhir terlihat adanya peningkatan angka harapan hidup setiap tahunnya. Grafik berikut menggambarkan perkembangan peningkatan angka harapan hidup tahun 2019 – 2013 :

Untuk mengetahui kemajuan capaian target pada akhir RPJMD periode 2021 – 2026, dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.88
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dengan Target Akhir
RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		2022	2023		
1.	Angka Harapan Hidup	72,89	73,23	73,47	99,67

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja indikator Angka Harapan Hidup tahun 2023 telah memenuhi target kinerja tahun akhir RPJMD 2021 – 2026 sebesar 99,67%. Masih ada selisih sebesar 0,24 poin lagi agar target akhir RPJMD dapat terpenuhi. Kalau kita lihat pertumbuhan peningkatan tahun 2022 dan 2023 yang mencapai 0,34, dapat diperkirakan target akhir periode RPJMD dapat dicapai pada tahun 2024. Dengan begitu perlu adanya penyesuaian penetapan target pada Perjanjian Kinerja Bupati untuk tahun – tahun berikutnya sehingga kinerja Pemda Kabupaten Agam bidang kesehatan tetap dapat ditingkatkan.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada tahun 2023 :

Tabel 2.89
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatkan
Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	88.633.221.470	54.327.298.374	61,29 %
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	149.657.059	121.962.550	81,49 %
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	461.402.000	335.380.700	72,69 %
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	594.567.000	507.531.800	85,36 %
5.	Program Pengembangan Perumahan	338.352.150	273.278.684	80,77%
6.	Program Kawasan Permukiman	506.423.750	500.800.400	98,98%
7.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.032.658.700	4.486.101.191	74,36%
8.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.041.400.000	1.656.899.250	81,16%
9.	Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	2.115.774.300	2.113.390.500	99,89%
Total		100.873.456.429	64.322.643.449	63,77%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Berdasarkan data di atas terdapat 9 program yang mendukung capaian kinerja indikator Angka Harapan Hidup dengan total anggaran Rp. 100.873.456.429,- dengan realisasi anggaran Rp. 64.322.643.449,- dengan rata-rata tingkat capaian realisasi sebesar 63,77%. Dari 9 program yang ada hanya 2 program yang memiliki realisasi anggaran sangat tinggi (di atas 90%), 4 dengan realisasi tinggi (76 – 90%) dan 3 lainnya dengan realisasi sedang (66 – 75%). Dengan begitu rata – rata realisasi anggaran program yang mendukung sasaran meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah 63,77% dengan kategori sedang. Realisasi anggaran ini mengindikasikan adanya beberapa kegiatan yang mendukung capaian program tidak terlaksana dengan baik

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas,

dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut :

Tabel 2.90
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Tahun 2023

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Angka Harapan Hidup	72,92	73,23	100,43	100.873.456.429	64.322.643.449	157,49	63,77

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga, pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian kinerja sasaran dengan capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai efisiensi anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja Angka Harapan Hidup adalah 63,77%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan kurang efisien dalam mendukung capaian kinerja sasaran. Hal ini terlihat dari kecilnya nilai tingkat capaian kinerja sasaran dibandingkan capaian realisasi anggaran.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.91
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Tingkat Efisiensi
Angka Harapan Hidup			100,43	
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah puskesmas dengan grade utama	460	21,83
2.	Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar	91,30	110,00
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase fasilitas kefarmasian (apotik) dan toko obat yang memenuhi standar Kesehatan dan perizinan	94,29	106,51
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Kebijakan Germas dan Kebijakan Berwawasan Kesehatan yang diterbitkan	100	100,43
5.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	100	100,43
6.	Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	100	100,43
7.	Program Pengelola an Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum layak	100	100,43
8.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah Tangga memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	97,86	102,63
9.	Program perumahan dan permukiman kumuh	Persentas e kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/kota yang ditangani (%)	100	100,43

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung

capaian sasaran. Berdasarkan skala yang ditetapkan oleh Litbang Depdagri, tingkat efektifitas program, dapat dikelompokkan menjadi :

Skala Capaian Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40 – 59.99	Tidak Efektif
60 – 79.99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel 2.92 dapat dilihat bahwa capaian kinerja IKU Angka harapan hidup didukung oleh 9 program,. Dari 9 program dimaksud, 1 di antaranya yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat memiliki nilai efisiensi 22,83 (sangat tidak efektif), sedangkan 8 lainnya memiliki nilai efektifitas di atas 80 sehingga sangat efektif dalam mendukung capaian kinerja IKU dimaksud.

Walaupun capaian kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat sangat tinggi, namun termasuk dalam kategori sangat tidak efektif. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan dalam penetapan target di awal tahun. Pada dokumen perencanaan, jumlah puskesmas dengan grade utama ditetapkan sebanyak 5 unit. Namun setelah dilakukan penilaian oleh Tim Akreditasi ternyata semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Agam telah terakreditasi utama bahkan 22 diantaranya berakreditasi paripurna. Artinya capaian / realisasi indikator kinerja tersebut telah melebihi target yang ditetapkan, sehingga tingkat capaiannya menjadi sangat tinggi (460%).

2.3.3.4.2 Tujuan 2 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan BerdayaSaing

Misi IV dengan Tujuan 2 “terwujudnya sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing”, memiliki 1 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.92
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi IV Tahun 2023 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Mandiri Dan Berdaya Saing

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Nilai Produktivitas Total Daerah	Juta rupiah	60	88,52	147,5

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Nilai produktivitas total daerah merupakan indikator yang mencerminkan rata rata nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap angkatan kerja yang bekerja. Nilai ini

didapat dari total nilai PDRB dibagi dengan angkatan kerja yang bekerja. Realisasi nilai produktivitas total daerah pada tahun 2023 adalah sebesar 88,52 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 60 juta rupiah, maka tingkat capaian tersebut adalah sebesar 147,5% dengan kategori sangat tinggi. Capaian nilai produktivitas total daerah ini didukung oleh peningkatan daya saing angkatan tenaga kerja dan pemuda. Disamping itu kecukupan pangan dan gizi akan mendorong kapasitas fisik dan mental seseorang untuk meningkatkan produktivitasnya.

Pencapaian tujuan pada misi IV ini, didukung melalui 3 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan per sasaran sebagai berikut :

2.3.3.4.2.1 Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat

Kinerja sasaran strategis “meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat” dapat terlihat pada capaian 1 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

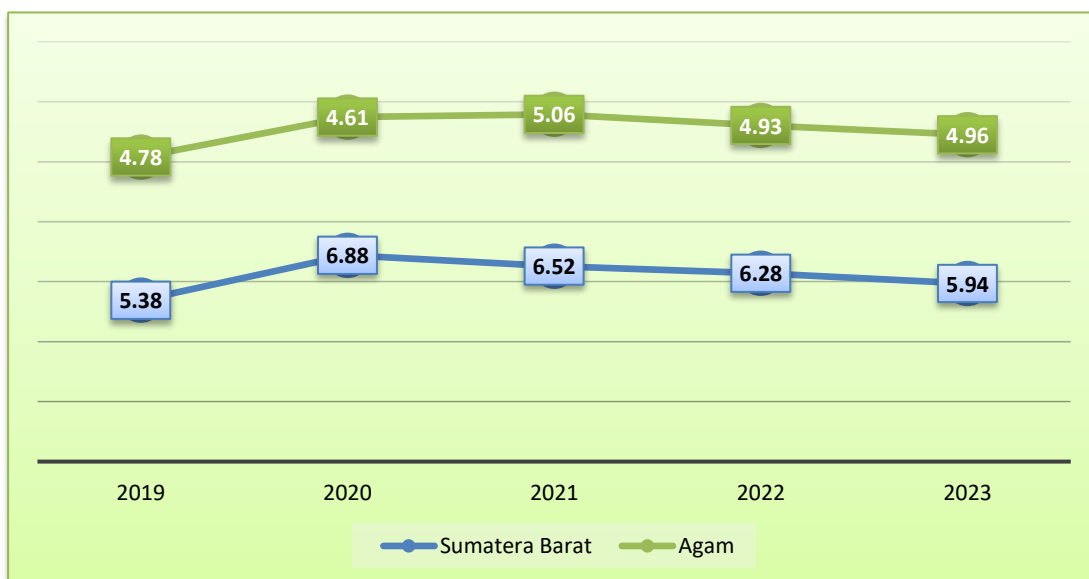
Tabel 2.93
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target PK	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	4,15	4,96	80,48

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator makro daerah. Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator yang targetnya harus turun, semakin kecil realisasinya akan semakin baik. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Agam pada tahun 2023 adalah sebesar 4,96%, lebih tinggi daripada target yang telah ditetapkan sebesar 4,15%, dengan tingkat capaian sebesar 80,48% dengan kategori tinggi. Capaian ini dipengaruhi oleh struktur penduduk agam yang sifatnya ekspansif (besar di usia muda) dimana penduduk yang memasuki usia angkatan kerja (15 – 65 Tahun) jumlahnya sangat besar. Inilah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan angka pengangguran terbuka meningkat. Namun tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Agam Tahun 2023 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Propinsi Sumatera Barat (5,94) dan tingkat pengangguran terbuka nasional (5,32).

Grafik 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Agam dan Propinsi Sumatera Barat
Tahun 2018 - 2022



Sumber : BPS Kabupaten Agam

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.94
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Tahun 2023 dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,3	4,93	85,35	4,15	4,96	80,48

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2022 dengan tahun 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, terlihat adanya peningkatan 0,03 poin. Walaupun kenaikannya tidak signifikan namun hal ini menunjukkan adanya penurunan kinerja jika dibandingkan dengan tahun lalu. Adapun beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :

1. Struktur penduduk Kabupaten Agam yang sifatnya ekspansif (besar di usia

muda) dimana penduduk yang memasuki usia angkatan kerja (15 – 65 Tahun) jumlahnya sangat besar mencapai 69,16% dari total penduduk. Di samping itu ketersediaan lapang

2. Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas
3. Ketidaksiesuaian pendidikan dan keterampilan angkatan kerja dengan kebutuhan lapangan kerja yang tersedia

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menekan angka pengangguran terbuka dan meningkatkan daya saing tenaga kerja yang ada, beberapa upaya yang harus dilakukan antara lain :

1. Membuka dan memperluas lapangan kerja melalui penyediaan program padat karya infrastruktur, menciptakan tenaga kerja trampil, serta memberikan bantuan permodalan berupa peralatan yang dibutuhkan
2. Meningkatkan kapasitas dan daya saing tenaga kerja melalui bimbingan dan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja
3. Memfasilitasi pemberdayaan dan penyebaran tenaga kerja

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.95
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		2022	2023		
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,93	4,96	3,67	64,85

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 baru memenuhi sebesar 64,85%. Ada selisih sekitar 1,29 atau 35,15% lagi yang harus diupayakan penurunannya dari capaian tahun ini selama 3 tahun mendatang. Dengan begitu ada sekitar 0,43 poin tingkat pengangguran terbuka yang harus kita kurangi sehingga target akhir RPJMD periode 2021 - 2026 dapat tercapai.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat pada tahun 2022:

Tabel 2.96
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	569.108.381	505.543.598	88,83%
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	87.390.834	85.952.400	98,35%
3.	Program Hubungan Industrial	70.769.925	66.882.610	94,51%
Total		727.269.140	658.378.608	90,53%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Terdapat 3 program yang mendukung capaian kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dengan total anggaran Rp. 727,269.140,- realisasi Rp. 658.378.608,- dengan tingkat capaian realisasi 90,53%. Dari 3 rogram tersebut , 2 program memiliki capaian realisasi sangat tinggi (di atas 90%) sedangkan 1 program dengan capaian realisasi di bawah 90%.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.97
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Tahun 2023

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,15	4,96	80,48	727.269.140	658.378.608	90,53%	88,90

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan AnggaranKementerian / Lembaga, pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian kinerja sasaran dengan capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai efisiensi anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 88,90%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang telah direalisasikan kurang efisien dalam mendukung capaian kinerja sasaran. Hal ini juga terlihat dari tingkat capaian realisasi kinerja sasaran yang lebih kecil dibandingkan capaian realisasi anggaran.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program / kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program/ kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.98
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran
Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	IndikatorKinerja	Persentase Capaian	Tingkat Efektifitas
Tingkat Pengangguran Terbuka			80,48%	
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mempunyai kompetensi dan produktivitas	124	64,90
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	150,35	53,53
3.	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang telah melaksanakan hubungan industrial	67,66	118,95

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Berdasarkan skala yang ditetapkan oleh Litbang Depdagri, tingkat efektifitas program, dapat dikelompokkan menjadi :

Skala Capaian Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40 – 59.99	Tidak Efektif
60 – 79.99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel 2.99 dapat dilihat bahwa capaian kinerja IKU Tingkat Pengangguran Terbuka didukung oleh 3 program,. Dari 3 program dimaksud, hanya 1 program yang terlihat sangat efektif 1 dalam mendukung capaian kinerja sasaran dengan nilai efektifitas 118,95%. Satu program dengan nilai efektifitas 53,53 (tidak efektif) Program Penempatan Tenaga Kerja, dan 1 program dengan nilai efektifitas 64,90 (cukup efektif) dalam mendukung capaian kinerja IKU dimaksud.

2.3.3.4.2.2 Meningkatkan Daya Saing Pemuda

Kinerja sasaran strategis “Meningkatkan Daya Saing Pemuda” dapat terlihat pada capaian 2 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.99
Realisasi Indikator Sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target PK	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	persen	92	91	98,91%
2.	Jumlah cabang olahraga berprestasi yang dibina	angka	38	46	121,05%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Meningkatnya daya saing pemuda ditandai dengan keaktifan organisasi pemuda serta prestasi cabang olahraga. Organisasi kepemudaan merupakan kelompok yang terdiri dari individu muda yang memiliki tujuan, visi dan misi tertentu untuk memajukan kepentingan dan kesejahteraan pemuda di suatu wilayah tertentu. Keaktifan organisasi dimaksud dapat dilihat dari aktifitasnya sesuai dengan fokus organisasi masing-masing. Adapun beberapa kegiatan organisasi kepemudaan antara lain :

- a. Organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang social, seperti penggalangan dana, bakti social, dan aksi social lainnya.
- b. Organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang pendidikan seperti bimbingan belajar, pelatihan ketrampilan atau seminar yang bertujuan untuk meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan anggotanya.

- c. Organisasi yang bergerak di bidang kesehatan seperti kampanye kesehatan, donor darah, atau aktifitas lain yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan
- d. Organisasi yang bergereak dibidang lingkungan seperti kegiatan penanaman pohon, pengelolaan sampah, dan kegiatan lain yang menunjang kelestarian lingkungan.
- e. Organisasi yang bergerak di bidang seni budaya dan olahraga, antara lain kegiatan pertunjukan seni dan budaya, olah raga serta kegiatan yang bertujuan untuk mempromisikan seni dan budaya serta olahraga.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, jumlah organisasi kepemudaan pada tahun 2023 adalah sebanyak 1076 organisasi, dan yang aktif sebanyak 980 organisasi atau sebanyak 91%. Jika dibandingkan dengan target PK yang telah ditetapkan sebesar 92%, maka tingkat capaian realisasi tahun ini adalah sebesar 98,91% dengan kategori sangat tinggi. Kendala yang ditemui dalam melakukan pembinaan organisasi kepemudaan antara lain :

- 1. Keterbatasan sumber daya dalam melakukan pembinaan organisasi kepemudaan
- 2. Kurangnya minat dan partisipasi pemuda dalam berorganisasi, sebagai akibat dari dampak kemajuan teknologi (*gadget*)

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keaktifan organisasi kepemudaan antara lain dengan melakukan fasilitasi pertemuan organisasi secara berkala serta pemberian bantuan hibah dana untuk operasional organisasi.

Indikator lain yang menggambarkan daya saing kepemudaan adalah jumlah cabang olah raga yang berprestasi yang dibina. Indikator ini menggambarkan prestasi yang diperoleh oleh cabang olahraga yang dibina oleh Dinas Pariwisata. Jumlah cabang olahraga yang dibina saat ini adalah sebanyak 46 cabang. Namun yang mengikuti perlombaan pada tahun ini hanya 6 cabang yaitu : pencak silat, catur, tarung derajat, renang, tari kreasi nusantara dan taekwondo sesuai dengan jumlah even yang dibuka oleh pihak Pemerintah provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2022 cabang olah raga yang ikut dalam even perlombaan tingkat provinsi sebanyak 6 cabang, dan seluruh cabang yang ikut mendapatkan prestasi di tingkat provinsi.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.100
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda Tahun 2022 dengan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	91	91	100%	92	91	98,91%
2.	Jumlah cabang olahraga berprestasi yang dibina	44	46	104,55%	38	46	121,05 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2022 dengan tahun 2023. Untuk indikator kinerja Persentase organisasi kepemudaan yang aktif terlihat realisasi kinerja tahun 2023 sama dengan tahun 2022 yaitu 91%. Namun karena adanya peningkatan target di tahun 2023 menjadi 92%, maka tingkat capaian kinerja tahun 2023 sedikit rendah dibandingkan tahun 2022 dengan selisih 1,09. Sama halnya dengan indikator jumlah cabang olahraga berprestasi yang dibina, realisasi kinerja antara tahun 2023 dengan 2022 sama yaitu 46 cabang olahraga. Namun karena ada penurunan target di tahun 2023, tingkat capaian kinerjanya meningkat mencapai 121,05%.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.101
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatkan Daya Saing Pemuda dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Capaian		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		2022	2023		
1.	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	91	91	95	95,79%
2.	Jumlah cabang olahraga berprestasi yang dibina	46	46	38	121,05%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja indikator Persentase organisasi kepemudaan yang aktif tahun 2023 telah memenuhi 95,79%

target akhir RPJMD Periode 2021 – 2026. Masih ada selisih 4 % lagi yang harus dicapai selama 3 tahun lagi atau minimal 1,33% setiap tahunnya agar pada tahun 2026 capaian organisasi kepemudaan yang aktif menjadi 95% dari total organisasi yang ada dan dibina. Sedangkan untuk indikator kinerja jumlah cabang olahraga berprestasi yang dibina, tingkat kemajuan tahun 2023 telah melebihi target tahun 2026, dimana tingkat kemajuan mencapai 121,05%. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap target untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 sehingga indikator ini dapat menunjukkan peningkatan kinerja.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda pada tahun 2023 :

Tabel 2.102
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatkan
Daya Saing Pemuda Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	811.378.350	754.401.935	92,98 %
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	10.833.965.290	5.412.686.555	49,96 %
3.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000	299.946.226	99,98 %
	Total	11.945.343.640	6.467.034.716	54,14 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 3 program yang mendukung capaian kinerja indikator Persentase organisasi kepemudaan yang aktif dan Jumlah cabang olahraga berprestasi yang dibina dengan total anggaran Rp. 11.945.343.640,- realisasi Rp. 6.467.034.716,- dengan tingkat capaian realisasi 54,14 % (rendah). Rendahnya rata-rata realisasi anggaran tersebut disebabkan karena Program Pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan yang juga rendah realisasi anggarannya, hanya 49,96%, padahal pagu anggarannya paling besar, hal ini disebabkan karena salah satu even yaitu Pekan Olahraga Provinsi Sumatera barat yang batal dilaksanakan tahun 2023.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja

pada sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.103
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda Tahun 2023

Indikator kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	92	91	98,91 %	11.945.343.640	6.467.034.716	54,14 %	183,69
Jumlah cabang olahraga berprestasi yang dibina	38	46	121,05 %				223,59

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga, pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian kinerja sasaran dengan capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai efisiensi anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase organisasi kepemudaan yang aktif dan Jumlah cabang olahraga berprestasi yang dibina berada di atas 100%, artinya anggaran yang disediakan dan dibelanjakan dapat dikatakan efisien dalam mendukung capaian kinerja sasaran. Namun karena selisihnya yang terlalu besar, hal ini juga bisa mengindikasikan bahwa anggaran yang direalisasikan kurang berkorelasi dengan kinerja indikator sasaran.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program/ kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.104
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran
Sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Tingkat Efektifitas
Persentase organisasi kepemudaan yang aktif			98,91%	
	Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif dan Wirausaha Muda	67%	147,63
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah even olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	80%	123,64
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	100%	98,91
Jumlah cabang olahraga berprestasi yang dibina			121,05%	
	Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif dan Wirausaha Muda	67%	180,67
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah even olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	80%	151,31

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Berdasarkan skala yang ditetapkan oleh Litbang Depdagri, tingkat efektifitas program, dapat dikelompokkan menjadi :

Skala Capaian Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40 – 59.99	Tidak Efektif
60 – 79.99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel 2.106 dapat dilihat bahwa capaian kinerja IKU Persentase organisasi kepemudaan yang aktif didukung oleh 3 program, dan seluruhnya memiliki

nilai efektifitas di atas 80%, dengan begitu dapat dikatakan sangat efektif dalam mendukung capaian kinerja IKU dimaksud. Sama halnya untuk program yang mendukung IKU jumlah cabang olahraga berprestasi yang dibina, seluruh programnya sangat efektif mendukung capaian kinerja IKU dengan nilai efektif di atas 80%.

2.3.3.4.2.2 Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

Kinerja sasaran strategis “Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah” dapat terlihat pada capaian 1 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.105
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target PK	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Indeks	90	86,40	96%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Indeks ketahanan pangan daerah merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat ketahanan pangan di suatu wilayah atau daerah tertentu. Indeks ini melibatkan faktor-faktor seperti ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Ketahanan pangan bersifat multi dimensi sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan melibatkan serangkaian indikator. Indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan yang selanjutnya dijadikan sebagai indeks ketahanan pangan daerah. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023, indeks ketahanan pangan daerah Kabupaten Agam mencapai 86,40, lebih rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 90. Walaupun target tidak terpenuhi tingkat capaian kinerja ini berada dalam kategori sangat tinggi (96%).

Merujuk kepada pengelompokkan Indeks Ketahanan Pangan Daerah, capaian tahun 2023 masuk dalam kelompok kondisi ketahanan pangan yang sangat baik (zona hijau). Berikut disampaikan data pengelompokkan Indeks Ketahanan Pangan Daerah berdasarkan *cut off point*.

Tabel 2.106
Cut Off Point Indeks Ketahanan Pangan Daerah

Kelompok IKP Daerah	Kabupaten	Kota
1	$\leq 41,52$	$\leq 28,84$
2	$>41,52 - 51,42$	$>28,84 - 41,44$
3	$>51,51 - 59,58$	$>41,44 - 51,29$
4	$>59,58 - 67,75$	$>51,29 - 61,13$
5	$>67,75 - 75,68$	$>61,13 - 70,64$
6	$>75,68$	$>70,64$

Kelompok IKP 1 merupakan kelompok daerah yang memiliki tingkat kerentanan yang paling tinggi dengan ketahanan pangan yang sangat rendah, sedangkan kelompok 6 merupakan kelompok daerah dengan tingkat kerentanan paling rendah sehingga ketahanannya sangat baik. Dengan begitu Kabupaten Agam termasuk ke dalam kelompok daerah yang memiliki tingkat kerentanan paling rendah dan ketahanan pangan yang sangat baik. Saat ini Kabupaten Agam menempati peringkat 31 dari 416 kabupaten yang dilakukan pengukuran.

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian indikator antara lain :

- Rasio konsumsi normative per kapita terhadap ketersediaan bersih
- Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
- Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran
- Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
- Rata rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun
- Persentase rumah tangga tanpa akses air bersih
- Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
- Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)
- Angka harapan hidup pada saat lahir.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.107
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2023 dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	88	85,34	96,98%	90	86,40	96%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat adanya peningkatan realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja urusan pangan pada tahun 2023. Walaupun adanya perbaikan kinerja, tetap ditemukan beberapa kendala dalam mencapai ketahanan pangan daerah, antara lain :

- Dalam hal ketersediaan pangan pokok berupa beras, Kabupaten Agam surplus namun mengalami kekurangan produksi bahan pangan umbi-umbian.
- Belum terlaksananya pencatatan pola distribusi bahan pangan
- Ketersediaan cadangan pangan belum memenuhi ketentuan, saat ini cadangan pangan yang tersedia adalah 10,758 ton dari seharusnya 216,23 ton (hanya 4,97%). Untuk itu disarankan perlu adanya penguatan cadangan pangan masyarakat melalui program lumbung pangan nagari
- Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk pendukung kemandirian pangan seperti infrastruktur lumbung pangan, rantai emur, dll)
- Kurangnya koordinasi antar dinas terkait mengenai roadmap ketahanan pangan yang mempengaruhi capaian indeks ketahanan pangan daerah.
- Belum maksimalnya penanganan pangan dan gizi pada nagari rawan pangan sehingga rentan mengakibatkan terjadinya stunting.
- Belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat seperti kurangnya konsumsi sayuran dan buah buahan serta protein hewani.
- Sulitnya mengubah budaya masyarakat dalam pola konsumsi terutama sumber pangan karbohidrat. Beras masih menjadi sumber utama karbohidrat bagi sebagian besar masyarakat.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal mengkonsumsi pangan aman
- Kurangnya penerapan teknologi pengolahan pangan local dan promosi B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman)
- Masih maraknya pemakaian bahan berbahaya untuk pangan segar asal tumbuhan
- Kurangnya fasilitasi dan anggaran untuk pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala di atas antara lain :

- Perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal keberagaman konsumsi pangan serta mengkonsumsi pangan yang aman.
- Perlu adanya dukungan terhadap penguatan infrastruktur pendukung kemandirian pangan
- Perlu peningkatan koordinasi antar lembag/instansi yang berwenang dalam penyediaan pangan.
- Perlu peningkatan pengawasan keamanan pangan serta pemakaian bahan berbahaya untuk pangan segar.
- Menggiatkan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait ketahanan pangan

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.108
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		2022	2023		
1.	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	85,34	86,40	96	90%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja indikator Indeks Ketahanan Pangan Daerah tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 – 2026 terlihat tingkat kemajuan sebesar 90%. Masih ada selisih sekitar 9,6 poin lagi yang harus dicapai selama kurun waktu 3 tahun lagi menjelang periode RPJMD 2021 - 2026 berakhir.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah pada tahun 2022 :

Tabel 2.109
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	653.925.925	610.235.708	93,32%
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	104.730.910	101.540.600	96,95%
	Total	758.656.835	711.776.308	93,82%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Terdapat 2 program utama yang mendukung capaian kinerja indikator Indeks Ketahanan Pangan Daerah dengan total anggaran Rp. 758.656.835,- realisasi Rp. 711.776.308,- dengan tingkat capaian realisasi 93,82%.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.110
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Meningkatkan Ketahanan
Pangan Daerah Tahun 2023

Indikator kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
Indeks Ketahanan Pangan Daerah	90	86,40	96%	758.656.835	711.776.308	93,82%	102,32

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, total anggaran yang digunakan untuk mendukung capaian kinerja Indeks Ketahanan Pangan Daerah adalah sebesar Rp. 758.656.835,- realisasi Rp. 711.776.308,- dengan tingkat capaian realisasi 93,82%, dengan tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk capaian output program sebesar 102,32%. Berdasarkan angka tersebut dapat dikatakan bahwa anggaran yang direalisasikan efisien dalam mendukung capaian indikator indeks ketahanan pangan daerah.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program / kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan

informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.111
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Tingkat Efektifitas
Indeks Ketahanan Pangan Daerah			96%	
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Penurunan jumlah konsumsi beras (kg/ perkapita/tahun)	109,46%	87,70
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan Nagari Rawan Pangan	84%	114,29

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Berdasarkan skala yang ditetapkan oleh Litbang Depdagri, tingkat efektifitas program, dapat dikelompokkan menjadi :

Skala Capaian Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40 – 59.99	Tidak Efektif
60 – 79.99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel 2.112 dapat dilihat bahwa capaian kinerja IKU Indeks Ketahanan Pangan Daerah didukung oleh 2 program, dan seluruhnya memiliki nilai efektifitas di atas 80%, dengan begitu dapat dikatakan sangat efektif dalam mendukung capaian kinerja IKU dimaksud.

2.3.3.4.2 Tujuan 3 Terwujudnya Perlindungan Dan Kesejahteraan Sosial

Misi IV pada RPJMD Tahun 2021 – 2026 memiliki tujuan “Terwujudnya Perlindungan Dan Kesejahteraan Sosial”. Tujuan ini memiliki 1 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.112
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi IV Tahun 2023
Terwujudnya Perlindungan Dan Kesejahteraan Sosial

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Indeks Kesejahteraan Rakyat	Indeks	75,47	76,68	101,60

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026 indeks kesejahteraan rakyat merupakan indikator yang dihitung dari rata – rata capaian Indeks Desa Membangun (status mandiri), persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan social, indeks pembangunan gender, indeks perlindungan anak dan laju pertumbuhan penduduk, dengan satuan persentase. Sesuai dengan defenisi operasional tersebut maka Indeks Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023 adalah 76,68. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan maka tingkat capaiannya adalah 101,60% atau kategori sangat tinggi.

Pencapaian tujuan pada misi IV ini, didukung melalui 2 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan per sasaran sebagai berikut:

2.3.3.4.2.1 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Kinerja sasaran strategis “meningkatkan pemberdayaan masyarakat” dapat terlihat pada capaian 4 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.113
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target PK	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Jumlah Nagari dengan status IDM				
	Mandiri	Jumlah	20	30	150 %
	Maju	Jumlah	59	47	79,66%
	Berkembang	Jumlah	13	15	84,62%
2	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	Angka	88,68	90,25	101,77%

3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		97,10	97%	99,90%
4	Indeks perlindungan anak		63	70,70	112,22%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026 misi IV, peningkatan pemberdayaan masyarakat tergambar pada capaian 4 indikator kinerja yaitu status Indeks Desa Membangun (IDM) nagari, persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan social, indeks pembangunan gender (IPG) serta indeks perlindungan anak (IPA).

Indeks desa membangun (IDM) merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai status perkembangan suatu desa/nagari sehingga rekomendasi yang dikeluarkan untuk pembangunan desa/nagari lebih tepat sasaran. Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial (IKS), indeks ketahanan ekonomi (IKE), dan indeks ketahanan lingkungan / ekologi desa (IKL).

Indeks Desa Membangun akan menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian Desa, yang disebut dengan Klasifikasi Status Desa, yaitu :

1. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155.
2. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
3. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.

4. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
5. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907.

Berdasarkan hasil penilaian tahun 2023, di Kabupaten Agam sudah tidak ada lagi nagari dengan kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Dari 92 nagari yang ada 30 nagari termasuk kelompok nagari mandiri (32,61%), 47 nagari dengan kategori nagari maju (51,09) dan 15 nagari berada pada kelompok nagari berkembang (16,30%). Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan 20 nagari mandiri, maka realisasi kinerja tahun ini sudah melebihi target, dimana jumlah nagari mandiri saat ini adalah 30 nagari dengan tingkat capaian kinerja 150%. Data ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja perkembangan nagari di Kabupaten Agam.

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun social. Berdasarkan data yang ada pada Dinas Sosial jumlah PPKS yang ada di Kabupaten Agam tahun 2023 sebanyak 109,587 orang, sedangkan yang memperoleh layanan dan pemberdayaan social sebanyak 98,902 orang (90,25%). Realisasi ini lebih besar daripada target yang ditetapkan sebesar 88,68%, dengan begitu tingkat capaian kinerja adalah sebesar 101,77%. Pelayanan dan pemberdayaan diberikan dalam bentuk pemberian bantuan maupun pembinaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya capaian indikator ini antara lain:

- Tambahan bantuan dari Kementerian Sosial RI yang terdiri dari PKH dan BPNT sebanyak 102.924 paket, atensi balai handayani sebanyak 570 paket.
- Tingginya peran dan kepedulian pilar pilar social dalam penanganan masalah social

- Terjalannya kerjasama yang baik antar pilar – pilar
- Tingginya motivasi dan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan pemberdayaan social

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator yang lebih menekankan kepada status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. IPG memberikan sebagian penjelasan mengenai program – program pembangunan yang sudah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender. IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan capaian antara IPM perempuan dan IPM laki – laki. Apabila IPG mendekati angka 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun sebaliknya, jika menjauhi angka 100 maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai IPG Kabupaten Agam tahun 2023 adalah 97 %, dengan tingkat capaian realisasi 99,90%. Capaian IPG yang dimaksud merupakan penilaian yang dilaksanakan tahun 2023 dengan data tahun 2022. Walaupun tidak memenuhi target, realisasi kinerja indikator ini termasuk kategori sangat tinggi. Adapun beberapa kendala yang ditemukan dalam capaian kinerja ini adalah :

- Adanya anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lainnya
- Masih adanya budaya patriarki yang berkembang di masyarakat
- Masih berkembangnya cap – cap negative untuk jenis kelamin tertentu jika beraktifitas di luar kebiasaan
- Kekerasan berbasis kodrat perempuan
- Marginalisasi / peminggiran ekonomi

Indeks perlindungan anak adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan nilai atau bobot atas penyelenggaraan perlindungan anak. Nilai ini dilihat dari evaluasi atas seluruh dokumen (tersediaan dokumen) yang diintervensi, yakni klaster – klaster dalam konvensi hak anak. Ada lima klaster Konvensi Hak Anak yaitu : hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kebebasan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan perlindungan khusus anak. IPA menggambarkan tingkat capaian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan anak (pemenuhan hak dan perlindungan anak).

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, indeks perlindungan anak

Kabupaten Agam tahun 2023 adalah 70,7. Angka ini diperoleh dari capaian penilaian Kabupaten Layak Anak yang merupakan akumulasi capaian indikator kelembagaan dan 5 kluster yang mengacu pada Konvensi Hak Anak dengan mengaplikasikan 4 kluster Indeks Pemenuhan Hak Anak dan 1 kluster pembentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak. Adapun 5 kluster dimaksud adalah : kluster I (hak sipil dan kebebasan), kluster II (lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif), kluster III (kesehatan dasar dan kebebasan), kluster IV (pendidikan dan pemanfaatan waktu luang) dan kluster V (perlindungan khusus). Nilai IPA tahun ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 63, sehingga tingkat capaian realisasi kinerja adalah sebesar 112,22%. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian ini adalah :

1. Adanya kebijakan perlindungan anak pada setiap kluster
2. Adanya kelembagaan Kabupaten Layak Anak
3. Adanya partisipasi dunia usaha, media massa, lembaga masyarakat dan forum anak
4. Capaian pemenuhan hak anak pada setiap kluster
5. Capaian kluster perlindungan khusus anak yang meliputi 15 kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Walaupun capaian telah melebihi target yang ditetapkan, beberapa kendala yang ditemukan antara lain :

- Sulitnya mendapatkan data / dokumen pendukung yang dimiliki oleh lintas sektor
- Belum adanya kerjasama dengan BPS di tingkat kabupaten/kota dalam penghitungan IPA
- Tatacara penilaian IPA masih dalam tahap sosialisasi oleh provinsi ke kabupaten/kota

Sehubungan dengan kendala di atas, beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan IPA :

1. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholder dalam menyelaraskan program dan data terkait perlindungan anak
2. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
3. Meningkatkan sosialisasi Konvensi Hak Anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak
4. Memfasilitasi kegiatan Forum Anak Daerah
5. Mengkoordinasikan pengembangan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha

6. Menyediakan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
7. Memperkuat dan mengembangkan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.114
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Jumlah Nagari dengan status IDM						
	Mandiri	16	20	125 %	20	30	150 %
	Maju	48	54	112,5%	59	47	79,66%
	Berkembang	18	8	44,44%	13	15	84,62%
2	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	68,56	88,68	129,35%	88,68	90,25	101,77%
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,41	96,95	99,53%	97,10	97 %	99,90%
4	Indeks perlindungan anak(IPA)	63	70	111,11%	63	70,70	112,22%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2022 dengan tahun 2023. Untuk indikator kinerja jumlah nagari dengan status IDM Mandiri terlihat ada peningkatan kinerja yang cukup signifikan, dimana jumlah nagari dengan status IDM mandiri tahun ini adalah 30 nagari, bertambah 10 nagari dari tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa adanya peningkatan kinerja baik dari indeks ketahanan sosial, ekonomi maupun lingkungan.

Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial juga mengalami peningkatan kinerja sebesar 1,57% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh adanya tambahan bantuan dari Kementerian Sosial berupa PKH dan BPNTserta adanya CSR dari perusahaan yang ada di Kabupaten Agam. Adapun bentuk layanan dan pemberdayaan yang diberikan antara lain : KUBE, WRSE,

permakanan, lansia tunggal, sandang, alat bantu jalan, alat bantu dengar, atensi handayani bantuan pemenuhan hidup layak, bantuan dari BBPPKS, layanan rujukan, PKH, BPNT, korban bencana dan bimbingan sosial kepada keluarga.

Indeks pembangunan gender (IPG) mengalami sedikit penurunan kinerja dibandingkan tahun 2022, dimana pada tahun 2023 tingkat capaian kinerja adalah sebesar 99,09% sedangkan pada tahun 2022 sebesar 99,53%. Sedangkan Indeks Perlindungan Anak (IPA) mengalami peningkatan kinerja pada tahun 2023 walau tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 0,7 poin. Demikian juga halnya dengan tingkat capaian kinerja, dimana tahun 2022 tingkat capaian kinerja sebesar 111,11% sedangkan pada tahun 2023 mencapai 112,22%. Pencapaian ini menunjukkan adanya upaya dalam memenuhi hak anak dan perlindungan anak.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.115
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		2022	2023		
1.	Jumlah Nagari dengan status IDM				
	Mandiri	20	30	28	107,14%
	Maju	54	47	52	90,38%
	Berkembang	8	15	2	
2	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	88,68	90,25	73,02	123,60%
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,95	97%	97,19	99,80%
4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70	70,70	75	94,27%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Tabel di atas menggambarkan tingkat kemajuan capaian indikator kinerja tahun 2023 dibanding target yang harus dicapai sampai akhir RPJMD Periode 2021 – 2026. Untuk indikator kinerja jumlah nagari dengan status IDM Mandiri, realisasi tahun 2023

telah melebihi target tahun 2026 dengan tingkat capaian 107,14%. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi dalam penetapan target kinerja pada tahun berikutnya agar kinerja pembinaan nagari dapat ditingkatkan.

Sama halnya dengan status IDM nagari madani, indikator persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial juga telah melebihi target akhir RJMD pada tahun 2026 dengan tingkat kemajuan 123,60%. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi dalam penetapan target kinerja untuk tahun – tahun berikutnya.

Untuk indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG), tingkat kemajuan capaian tahun 2023 telah mencapai 99,80% dibanding target yang harus dicapai tahun 2026, dengan selisih 0,19. Jika merujuk kepada penetapan target setiap tahunnya pada Dokumen RPJMD Tahun 2021 - 2026, kecenderungan selisih target setiap tahun adalah 0,03. Artinya setiap tahun peningkatan IPG yang bisa dicapai adalah sebesar 0,03 poin. Dengan adanya selisih capaian tahun 2023 dengan target 2026 sebesar 0,19.

Untuk Indeks Perlindungan Anak (IPA) tingkat kemajuan capaian tahun 2023 mencapai 94,27% dari target tahun 2026. Masih terdapat selisih sebesar 4,3 poin lagi yang harus dicapai selama kurun waktu 3 tahun menjelang RPJMD 2021 – 2026 berakhir.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2022 :

Tabel 2.116
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatkan
Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian %
Jumlah Nagari dengan status IDM Mandiri, Maju, Berkembang				
1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.746.774.302	1.587.877.556	90,90%
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	19.425.842.010	17.923.535.186	92,27 %
	Jumlah	21.172.616.312	19.511.412.742	92,154%
Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial				
3.	Program Pemberdayaan Sosial	656.398.063	629.876.476	95,96%

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian %
4.	Program Rehabilitasi Sosial	578.266.385	494.286.735	85,48%
5.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.384.861.003	1.282.569.278	92,61%
6.	Program Penanganan Bencana	381.159.541	295.207.500	77,45%
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	19.998.000	19.373.700	96,88%
	Jumlah	3.020.682.992	2.721.313.689	90,09%
Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
8.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	466.547.650	443.022.711	94,96%
9.	Program Perlindungan Perempuan	200.000.000	183.995.723	91,99%
10.	Program Pengelolaan Data Gender Dan Anak	16.540.000	15.929.300	96,31%
	Jumlah	683.087.650	642.947.734	94,12%
Indeks perlindungan anak				
12.	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	136.411.190	124.469.721	91,25%
13.	Program Perlindungan Khusus Anak	648.000.000	608.565.019	93,91%
	Jumlah	784.411.190	733.034.740	93,45%
	Total	25.660.798.144	23.608.708.905	92,003%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 13 program yang mendukung capaian kinerjasasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat, dengan rata – rata capaian realisasi adalah 92% (kategori sangat tinggi).

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapatdiketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.117
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Meningkatkan Pemberdayaan
Masyarakat Tahun 2023

Indikator kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
Jumlah Nagari dengan status IDM				21.172.616.312	19.511.412.742	92,15%	
Mandiri	20	30	150 %				162,78
Maju	59	47	79,66%				
Berkembang	13	15	84,62%				
Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	88,68	90,25	101,77%	3.020.682.992	2.721.313.689	90,09%	112,96
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,10	97%	99,90%	683.087.650	642.947.734	94,12%	106,14
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	63	70,70	112,22%	784.411.190	733.034.740	93,45%	120,09

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Untuk menghitung efisiensi sumber daya anggaran dalam rangka mendukung capaian kinerja indikator sasaran, dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian indikator sasaran dengan capaian realisasi belanja program yang mendukung sasaran tersebut. Jika nilai perbandingan tersebut besar atau sama dengan 100, dapat dianggap bahwa anggaran yang digunakan efisien dalam mencapai indikator sasaran. Namun jika kurang dari 100 berarti anggaran yang dibelanjakan tidak efektif dalam mendukung capaian kinerja sasaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai efisiensi anggaran yang mendukung capaian IKU pada sasaran meningkatkan pemberdayaan masyarakat lebih besar dari 100. Artinya anggaran yang dibelanjakan sangat efisien dalam mendukung capaian kinerja IKU dimaksud.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan

informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.118
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program
Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Tingkat Efisiensi
Jumlah Nagari dengan status IDM			150%	
1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Komponen pada Kelembagaan Nagari yang Ditata Sesuai Standar	100%	150
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	100%	150
Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial			101,77%	
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang dilakukan Pembinaan dan Pemberdayaan	100%	101,77
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	101,77
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase data Terpadu penanggulangan Kemiskinan yang dimutakhirkan	100%	101,77
	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan	100%	101,77

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Tingkat Efesiensi
		Sosial		
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100%	101,77
Indeks Pembangunan Gender (IPG)			99,90%	
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	369,51%	21,03
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidanan Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan	100%	99,90
	Program Pengelolaan Data Gender Dan Anak	Persentase peningkatan skala usaha kecil	100%	99,90
Indeks Perlindungan Anak (IPA)			112,22%	
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	107,69%	104,21
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	112,22

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Berdasarkan skala yang ditetapkan oleh Litbang Depdagri, tingkat efektifitas program, dapat dikelompokkan menjadi :

Skala Capaian Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40 – 59.99	Tidak Efektif
60 – 79.99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel 2.118 dapat dilihat bahwa capaian kinerja IKU Jumlah nagari dengan status IDM didukung oleh 2 program dengan nilai efektifitas di atas 80%, sehingga dapat dikatakan bahwa program-program tersebut sangat efektif mendukung capaian IKU dimaksud. IKU Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial didukung oleh 5 program dengan nilai efektifitas di atas 80%, sehingga dapat dikatakan bahwa semua prrogram sangat efektif mendukung capaian IKU dimaksud. IKU Indeks pembangunan gender didukung oleh 3 program, yang salah satunya yaitu Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan memiliki nilai efektifitas 21,03 (sangat tidak efektif) sedangkan 2 program lainnya memiliki nilai efektifitas di atas 80 dan sangat efektif dalam mendukung capaian IKU. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan nilai efisiensinya rendah lebih disebabkan karena kesalahan dalam penetapan target dan tingginya gap antara capaian program dan capaian IKU. Hal ini menunjukkan seolah – olah program yang dilaksanakan kurang berkorelasi dengan sasaran. IKU Indeks Perlindungan Anak didukung oleh 2 program dengan nilai efektifitas di atas 80, sehingga sangat efektif dalam mendukung capaian kinerja IKU.

2.3.3.4.2.2 Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang

Kinerja sasaran strategis “Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang” dapat terlihat pada capaian 1 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.119
Realisasi Indikator Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target PK	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Total Fertility Rate	Angka	2,43	2,55	95,06%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Total fertility rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang

wanita selama masa usia subur / reproduksi. Hal ini menunjukkan angka kelahiran total yang sangat memengaruhi laju pertumbuhan penduduk dan secara umum berkorelasi positif terhadap laju pertumbuhan penduduk. TFR merupakan indikator demografi yang harus dicapai untuk menyeimbangkan jumlah penduduk dan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Angka TFR yang tinggi mencerminkan rata-rata usia kawin yang rendah, jadi semakin tinggi TFR maka semakin tinggi pula laju pertumbuhan penduduk. Indikator TFR ini merupakan indikator menurun, artinya semakin rendah TFR menunjukkan kinerja yang semakin baik. TFR Kabupaten Agam pada tahun 2023 adalah sebesar 2,55 lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 2,43, dengan begitu tingkat capaian realisasi kinerja adalah sebesar 95,06. Walaupun target tidak terpenuhi namun masih dalam kategori sangat tinggi. Banyak faktor yang mempengaruhi angka TFR ini, antara lain : faktor pendidikan masyarakat, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan serta penggunaan alat kontrasepsi. Beberapa kendala yang ditemui dalam upaya mencapai indikator ini antara lain :

1. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang keluarga berencana
2. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai
3. Kondisi geografis yang sulit dan beragam sehingga menyulitkan jangkauan petugas dalam pelayanan KB
4. Masih adanya kepercayaan masyarakat tentang larangan ber KB
5. Keterbatasan anggaran.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.120
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang Tahun 2023 dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Total Fertility Rate	2,51	3,00	80,48%	2,43	2,55	95,06%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2022

dengan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022, TFR tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,45 poin. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pencapaian TFR dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target setiap tahunnya, terlihat adanya peningkatan tingkat capaian realisasi kinerja sebesar 14,58%.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.121
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang dalam Pembangunan Jangka Menengah dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		2022	2023		
1.	Total Fertility Rate	3,00	2,55	2,2	84,09%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja indikator Total FertilityRate tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir periode RJMD Tahun 2021 – 2026, tingkat kemajuan sebesar 84,09%, dengan selisih sebesar 0,35 poin. Dengan begitu, perlu adanya peningkatan kinerja sebesar 0,35 poin selama kurun waktu 3 tahun menjelang akhir RPJMD periode 2021 – 2026 agar target kinerja tahun 2026 tercapai.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang pada tahun 2022 :

Tabel 2.122
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pengendalian Penduduk	160.200.000	151.152.773	94,35%

2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	4.106.415.600	3.149.191.125	76,69%
3.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.888.285.949	2.825.045.650	97,81%
Total		7.154.901.549	6.125.389.548	85,61%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 3 program yang mendukung capaian kinerja indikator Total Fertility Rate dengan total anggaran Rp. 7.154.901.549,- realisasi Rp. 6.125.389.548,- dengan tingkat capaian realisasi 85,61%. Di antara 3 program di atas, capaian realisasi anggaran terendah adalah Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) sebesar 76,69, padahal program tersebut memiliki anggaran yang paling besar, sehingga mempengaruhi rata – rata realisasi anggaran.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.123
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terkendalnya Laju
Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang Tahun 2023

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Total Fertility Rate	2,43	2,55	95,06%	7.154.901.549	6.125.389.548	85,61%	111,04

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Untuk menghitung efisiensi sumber daya anggaran dalam rangka mendukung capaian kinerja indikator sasaran, dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian indikator sasaran dengan capaian realisasi belanja program yang mendukung sasaran tersebut. Jika nilai perbandingan tersebut besar atau sama dengan 100%, dapat dianggap bahwa anggaran yang digunakan efisien dalam mencapai indikator sasaran. Namun jika kurang dari 100 berarti anggaran yang dibelanjakan tidak efektif dalam mendukung capaian kinerja sasaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai efisiensi anggaran yang mendukung capaian 3 indikator pada sasaran meningkatkan pemberdayaan masyarakat lebih besar dari 100%. Artinya anggaran yang dibelanjakan efisien dalam mendukung capaian kinerja sasaran.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.124
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Terkendalanya Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Tingkat Efektifitas
Total Fertility Rate			95,06%	
1.	Program Pengendalian Penduduk	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern Contraceptive (mCPR)	75,34%	126,17
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmet Need)	3,75%	2534,93
3.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembanguan Keluarga (iBangga)	106,86%	89,89

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Berdasarkan skala yang ditetapkan oleh Litbang Depdagri, tingkat efektifitas program, dapat dikelompokkan menjadi :

Skala Capaian Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40 – 59.99	Tidak Efektif
60 – 79.99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel 2.124 dapat dilihat bahwa capaian kinerja IKU Total fertility rate didukung oleh 3 program dengan nilai efektifitas di atas 80%, sehingga dapat dikatakan bahwa program-program tersebut sangat efektif mendukung capaian IKU dimaksud. Terdapat 1 program yang tingkat capaian kinerja programnya sangat rendah (3,75%) sehingga jika dibandingkan dengan capaian IKU mempunyai nilai efektifitas yang sangat tinggi sehingga data ini menjadi tidak logis. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja program sangat rendah dan kinerjanya tidak berkorelasi dengan capaian indikator sasaran. Sangat rendahnya capaian kinerja program disebabkan oleh :

1. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan alat KB
2. Terbatasnya ketersediaan sumber daya dalam meningkatkan pelayanan KB ke masyarakat terutama untuk masyarakat – masyarakat di daerah terpencil

Untuk selanjutnya, program ini perlu dievaluasi lebih lanjut terkait indikator kinerja dan target yang ditetapkan.

2.3.3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Pada Misi V (Meningkatkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Madani, Berlandaskan ABS – SBK)

Misi V pada RPJMD Tahun 2021 – 2026 memiliki tujuan “Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya”. Tujuan ini memiliki 2 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.125
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi V Tahun
2023

Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Indeks Keamanan Masyarakat	Angka	90,04	91,30	101,40
2.	Persentase nagari Madani pada Level V	%	17,07	10,87	63,68

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Indeks keamanan masyarakat merupakan indikator yang menunjukkan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Indeks ini merupakan agregat dari capaian indikator angka kriminalitas per 10.000 penduduk (bobot 40%), persentase korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif (30%) serta capaian layanan waktu tanggap kebakaran (30%). Berdasarkan hasil pengukuran, Indeks Keamanan Masyarakat tahun 2023 mencapai 101,40. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 90,04, maka tingkat realisasinya mencapai 101,40%

dengan kategori capaian sangat tinggi. Tingkat capaian tersebut didukung oleh :

1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga / instansi pemerintah yang menangani keamanan dan ketertiban (kepolisian)
2. Meningkatnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya.
3. Meningkatnya intensitas pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan.
4. Meningkatnya koordinasi antar wilayah dalam penanggulangan kebakaran

Persentase nagari madani level V menunjukkan jumlah nagari yang telah menerapkan kehidupan yang madani berlandaskan ABS SBK sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani. Berdasarkan hasil penilaian Tahun 2023, dari 92 nagari yang ada di Kabupaten Agam, 10 di antaranya sudah masuk dalam kategori nagari madani level V, 49 nagari dengan kategori nagari madani level IV, 28 nagari dengan kategori nagari madani level III dan 4 nagari dengan kategori nagari madani level II. Dengan begitu realisasi persentase nagari madani level V adalah sebesar 10,7% dari total nagari yang ada. Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, sebenarnya ada peningkatan jumlah nagari madani level V namun mengalami penurunan besaran persentase. Hal ini karena adanya perubahan jumlah nagari di Kabupaten Agam dari 82 menjadi 92 nagari setelah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Salareh Aia Timur, Pemerintahan Nagari Salareh Aia Utara, Pemerintahan Nagari Salareh Aia Barat, Pemerintahan Nagari Sungai Cubadak, Pemerintahan Nagari Koto Gadang, Pemerintahan Nagari Dalko, Pemerintahan Nagari Nan Limo, Pemerintahan Nagari Kamang Tengah Anam Suku, Pemerintahan Nagari Pauh Kamang Mudiak, dan Pemerintahan Nagari Durian Kapeh Darussalam. Dengan begitu persentase capaian realisasi hanya sebesar 10,87%. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian nagari madani level V yang ditemui hampir pada seluruh nagari adalah :

1. Penetapan Perda Nomor 11 Tahun 2022 menyebabkan jumlah nagari di Kabupaten Agam bertambah menjadi 92 nagari, sehingga mempengaruhi capaian persentase nagari madani level V.
2. Ketersediaan kader nagari madani yang kurang memadai, sehingga upaya peningkatan level nagari madani tidak maksimal.
3. Kurangnya dukungan dan partisipasi lembaga nagari dalam upaya peningkatan level nagari madani.
4. Masih terdapat KAN yang belum memiliki ninik mamak sehingga fungsi KAN tidak optimal dalam internalisasi adat dan budaya sesuai dengan indikator

nagari madani.

Pencapaian tujuan pada Misi V ini, didukung melalui 2 (dua) sasaran strategis dengan

6 (enam) indikator kinerja yang dapat dijelaskan per sasaran sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja Sasaran Berkurangnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Kinerja sasaran strategis “Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum” dapat terlihat pada capaian 3 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.126
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023
Berkurangnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target PK	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	Angka	5,02	3,19	136,25 %
2.	Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan	%	100	86	86%
3.	Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran	%	100	85	85%

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD-P Kab.Agam Tahun 2022

Angka kriminalitas merupakan suatu cara untuk mengukur tingkat keamanan suatu wilayah. Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia serta norma – norma sosial dan agama. Dapat digambarkan apabila angka kriminalitas per 10.000 penduduk pada suatu daerah memiliki nilai 5, artinya terdapat 5 orang penduduk yang beresiko mengalami tindak kejahatan dalam 1 tahun. Berdasarkan data dari Polres Agam dan Polres Bukittinggi, total jumlah kejadian kriminalitas pada tahun 2023 adalah 169. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Agam sebanyak 530.123 orang (data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2023) maka angka kriminalitas Kabupaten Agam tahun 2023 adalah sebesar 3,2. Artinya pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Agam yang beresiko mengalami tindak kejahatan adalah 3,2 orang. Angka kriminalitas per 10.000 penduduk merupakan indikator dengan kinerja menurun, artinya semakin rendah angka capaian maka

hasilnya akan semakin baik. Angka kriminalitas pada tahun 2023 adalah sebesar 3,2. Angka capaian ini lebih baik dari target yang ditetapkan sebesar 5,02, capaian realisasi sebesar 136,25%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sangat tinggi, yang tentu didukung oleh partisipasi dan kepedulian masyarakat yang tinggi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Sama halnya dengan angka kriminalitas, indikator persentase penurunan kasus kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada perempuan juga dihitung berdasarkan jumlah kejadian kekerasan dan TPPO pada perempuan per 10.000 penduduk perempuan. Pada tahun 2023, jumlah kejadian kekerasan dan TPPO pada perempuan sebanyak 14 kali. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 264.321, maka angka kekerasan pada perempuan di Kabupaten Agam tahun 2023 adalah 5,34. Artinya pada tahun 2023, penduduk perempuan di kabupaten Agam yang beresiko mengalami tindak kekerasan dan TPPO adalah sebanyak 5,34 orang.

Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, target penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan tidak tercapai. Dari target 100% yang ditetapkan, yang terealisasi hanya 86%. Kalau dilihat dari jumlah kasus yang terjadi, terdapat peningkatan jumlah kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan dari 12 kasus pada tahun 2022 menjadi 14 kasus pada tahun 2023. Walaupun datanya menunjukkan negatif, namun sesungguhnya kenaikan ini juga mengindikasikan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian – kejadian kekerasan dan TPPO perempuan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Dari 14 kasus yang dilaporkan semuanya dapat difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemda kab. Agam.

Beberapa kendala yang ditemui dalam menangani kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan, antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian kekerasan pada perempuan baik yang dialami sendiri maupun yang dialami oleh perempuan di lingkungannya.
2. Pelaku tindak kekerasan kepada perempuan lebih banyak dilakukan oleh orang terdekat / keluarga.
3. Faktor – faktor eksternal lainnya antara lain persoalan ekonomi keluarga, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, derajat pendidikan orang tua, keterbukaan informasi serta rendahnya penegakan hukum.

4. Koordinasi antar stakeholder yang kurang optimal
5. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia untuk mensupport penanganan kasus kekerasan pada perempuan

Sehubungan dengan kendala tersebut dilakukan upaya sebagai berikut :

Sehubungan dengan kendala – kendala yang dihadapi sebagaimana disampaikan di atas, beberapa upaya yang dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait perlindungan perempuan dari kekerasan dan TPPO melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis sehingga kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian kekerasan meningkat.
2. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait melalui rapat – rapat koordinasi dan kerjasama, sehingga pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan dan TPPO pada perempuan dapat dilaksanakan.
3. Melakukan pendampingan bagi korban dan keluarga yang mengalami kekerasan dan TPPO pada perempuan
4. Melaksanakan kegiatan peningkatan ekonomi perempuan

Waktu tanggap pelayanan pemadam kebakaran atau yang lebih dikenal dengan *response time* adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (ditandai dengan keluarnya air pertama / penyemprotan pertama). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/kota, bahwa waktu tanggap (*response time*) adalah 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi untuk melakukan pelayanan pemadaman. Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator, bahwa persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadam kebakaran mencapai 85%, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Artinya dari 15 menit waktu tanggap yang ditetapkan dalam SPM urusan kebakaran, yang terpenuhi baru 17,725 menit (85%). Masih ada selisih sekitar 2,25 menit lagi. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Kondisi geografis dan luas wilayah Kabupaten Agam menyulitkan pemenuhan respon time, karena jarak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai standar yang belum memadai
3. Pemenuhan kebutuhan SDM yang berkompeten yang belum memadai
4. Belum terbentuknya kelompok –kelompok relawan pemadam kebakaran

Sehubungan dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi, dalam rangka

pemenuhan response time / waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran, beberapa upaya yang dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan kompetensi aparaturnya dalam memberikan pelayanan
2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standar secara berkala
3. Meningkatkan kesiapan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran melalui pembentukan kelompok relawan kebakaran.
4. Meningkatkan pemahaman / kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan kebakaran melalui kegiatan sosialisasi – sosialisasi .

Untuk melihat kemajuan capaian sasaran berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ini dapat diketahui dengan membandingkan capaian indikatornya dengan capaian tahun sebelumnya. Berikut disajikan data perbandingan capaian indikator sasaran berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun 2023 dengan tahun 2022 pada tabel berikut :

Tabel 2.127
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Berkurangnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	5,36	3,83	128,54%	5,02	3,19	136,25 %
2.	Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan	85	88	103,53%	100	86	86%
3.	Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran	100	85	85%	100	85	85%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Indikator kinerja Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk pada tahun 2023 terlihat adanya peningkatan kinerja sebesar 7,71 poin dibandingkan tahun 2022, dimana tingkat capaian tahun 2022 sebesar 128,54% sedangkan di tahun 2023 sebesar 136,25%. Sama dengan tahun lalu, capaian tahun ini juga melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja indikator ini jauh melampaui target yang ditetapkan yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja dalam menurunkan angka kriminalitas.

Untuk indikator kinerja Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan terlihat adanya penurunan capaian kinerja yang cukup banyak pada tahun

2023 yaitu 17,53 poin. Bahkan realisasi tahun 2023 juga lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan dan TPPO yang terjadi di tahun 2023 sebanyak 14 kasus, sedangkan pada tahun 2022 hanya 12 kasus.

Sedangkan indikator kinerja Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran capaian kinerjanya sama dengan tahun 2022, dengan tingkat capaian 85%. Hal ini berarti waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran mencapai 17,2 menit dari 15 menit yang ditetapkan.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.128
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Berkurangnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		2022	2023		
1.	Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	3,83	3,19	4,02	120,40 %
2.	Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan	88	86	100	86 %
3.	Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran	85	85	100	85 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi kinerja indikator Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk pada tahun 2023 telah melebihi target akhir periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 , dengan tingkat kemajuannya mencapai 120,40%. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi penetapan target tahun 2024 sampai tahun 2026 sehingga peningkatan kinerja terus dilakukan.

Kinerja persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan tahun 2023 mengalami penurunan jika dibanding realisasi tahun 2022.Tahun 2023 realisasi persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada peerempuan sebesar 86%, sedangkan pada tahun 2022 hanya 88%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 20026 sebesar 100%, maka kemajuan capaian tahun 2023 baru

mencapai 86%. Dengan begitu terdapat selisih 14% atau 4,7% pertahun penurunannya agar target akhir periode pada tahun 2026 dapat terpenuhi.

Capaian kinerja Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran pada tahun 2023 dan tahun 2023 sama yaitu sebesar 85%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 sebesar 100%, maka tingkat kemajuannya adalah 85%. Untuk itu diperlukan upaya dan strategi sehingga waktu tanggap pelayanan pemadam kebakaran dapat dipenuhi dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2022 :

Tabel 2.129
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Berkurangnya
Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk				
1.	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2.956.496.000	2.579.908.792	87,26 %
2.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (kecamatan)	196.661.950	158.334.500	80,56 %
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	15.787.000.139	1.444.028.619	9,15%
4.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	64.347.500	43.148.400	67,06 %
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.220.612.000	924.698.412	75,76 %
Jumlah		20.225.117.589	5.150.118.723	25,46 %
Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan				
6.	Program Perlindungan Perempuan	200.000.000	183.995.723	92,00 %
7.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan	466.547.650	443.022.711	94,96%

	Perempuan			
Jumlah		666.547.650	627.018434	94,07 %
Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran				
8.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.046.749.980	2.684.325.340	88,10 %
	Jumlah	3.046.749.980	2.684.325.340	88,10%
	Total	23.938.415.219	8.461.462.497	35,35%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab. Agam Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk didukung oleh 5 program dengan rata – rata realisasi anggaran sebesar 25,46%. Rendahnya rata – rata realisasi anggaran program- program tersebut dipengaruhi oleh realisasi anggaran salah satu program yang hanya mencapai 9,15%, padahal total pagunya sangat besar (Rp. 15.787.000.139,-) yaitu Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Rendahnya realisasi anggaran program ini disebabkan karena adanya kewajiban daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilu 2024 sebanyak 40% dari total anggaran berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 perihal Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Sementara pengalokasian anggaran sebesar 40% tersebut tidak sesuai dengan tahapan kegiatan Pemilu yang dilaksanakan di tahun 2023 yang hanya kegiatan sosialisasi yang kebutuhan anggarannya tidak sampai 40%. Inilah yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran.

Indikator Persentase Penurunan Kekerasan dan TPPO pada Perempuan didukung oleh 2 Program dengan realisasi anggaran sebesar 94,07 %. Sedangkan untuk mendukung indikator Persentase Pemenuhan Waktu Tanggap Pelayanan Pemadaman Kebakaran juga didukung oleh 1 program dengan capaian realisasi adalah 88,10%.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.130
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran Berkurangnya Gangguan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum Tahun
2023

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu	Realisasi	Persentase Capaian	
Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	5,02	3,19	136,25 %	20.225.117.589	5.150.118.723	25,46 %	535,15
Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan	100	86	86 %	666.547.650	627.018.434	94,07 %	91,42
Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran	100	85	85 %	3.046.749.980	2.684.325.340	88,10%	96,48

Sumber : Pengolahan Data LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga, pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk adalah mencapai sebesar 535,15%. Walau masuk dalam skala sangat efektif, namun angka ini sedikit tidak logis dan menggambarkan tidak adanya hubungan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja indikator yang dihitung, karena capaian realisasi indikator kinerja sangat tinggi bahkan lebih dari 100% namun capaian realisasi anggaran sangat rendah hanya 25,46%. Walaupun realisasi anggaran sangat rendah namun capaian kinerja sangat tinggi. hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran tidak berkorelasi dengan realisasi target kinerja IKU.

Efisien penggunaan anggaran untuk capaian kinerja persentase penurunan kekerasan dan TPPO pada perempuan adalah sebesar 91,42%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang direalisasikan kurang efisien dalam mendukung capaian realisasi kinerja, karena realisasi capaian kinerja lebih rendah dari capaian realisasi anggaran. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran untuk capaian kinerja persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran adalah 96,48%. Angka ini juga menunjukkan anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja juga kurang efisien, karena capaian kinerja lebih rendah dari capaian realisasi anggaran.

Untuk mengetahui dukungan program / kegiatan yang dilakukan terhadap pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.131
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Berkurangnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Tingkat Efektifitas
Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk			136,25	
1.	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100	136,25
2.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (kecamatan)	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100	136,25
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100	136,25
4.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah pembinaan dan pengembangan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang difasilitasi	100	136,25
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase cakupan pencegahan / tangkal dini konflik	100	136,25
Persentase penurunan kekerasan dan TPPO pada perempuan			86	
1.	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100	86

2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	369,51	23,27
Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran			85	
1.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan sesuai standar	96	88,54

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Berdasarkan skala yang ditetapkan oleh Litbang Depdagri, tingkat efektifitas program, dapat dikelompokkan menjadi :

Skala Capaian Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40 – 59.99	Tidak Efektif
60 – 79.99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel 2.131 dapat dilihat bahwa capaian kinerja IKU Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk didukung oleh 5 program dengan nilai efektifitas di atas 80%, sehingga dapat dikatakan bahwa program-program tersebut sangat efektif mendukung capaian IKU dimaksud. Untuk IKU Persentase penurunan kekerasan dan TPPO pada perempuan didukung oleh 2 program, satu diantaranya yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan memiliki nilai efektifitas yang sangat tidak efektif (23,27). hal ini terjadi karena tingkat capaian IKU jauh lebih rendah dari tingkat capaian program. Kondisi ini menggambarkan adanya ketidakrelevanan antara capaian program dengan capaian IKU yang mungkin disebabkan oleh indikator kinerja program yang tidak relevan atau penetapan target yang terlalu rendah. Sedangkan untuk IKU Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran, nilai efektifitas adalah 88,54% sehingga sangat efektif dalam mendukung capaian kinerja IKU dimaksud.

2. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya

Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya” dapat terlihat pada capaian 3

indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.132
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib Berlandaskan Nilai- Nilai Agama, Adat Dan Budaya Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target PK	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Jumlah nagari Madani pada level:)				
	Level V	Jumlah	14	10	71,43
	Level IV	Jumlah	23	49	213,04
	Level III	Jumlah	39	28	128,20
	Level II	Jumlah	6	4	133,33
	Level I	jumlah	0	1	0
2.	Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	%	75	100	133,33
3.	Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan	%	55	100	181,82

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab. Agam Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Nagari Madani, Nagari Madani di Kabupaten Agam dikelompokkan menjadi 5 tingkatan, yaitu :

1. Nagari Madani level I, jika akumulasi skor indicator mulai dari 0 - 85.
2. Nagari Madani level II, jika akumulasi skor indicator mulai 86 - 110.
3. Nagari Madani level III, jika akumulasi skor indicator mulai 111 - 130.
4. Nagari Madani level IV, jika akumulasi skor indicator mulai dari 131 - 170.
5. Nagari Madani level V, jika akumulasi skor indicator mulai dari 171 - 215.

Penilaian nagari madani pada tahun 2023 mengalami penambahan objek jika dibanding tahun 2022, hal ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah nagari di Kabupaten Agam dari 82 nagari menjadi 92 nagari, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Salareh Aia Timur, Pemerintahan Nagari Salareh Aia Utara, Pemerintahan Nagari Salareh Aia Barat, Pemerintahan Nagari Sungai Cubadak, Pemerintahan Nagari Koto Gadang, Pemerintahan Nagari Dalko, Pemerintahan Nagari Nan Limo, Pemerintahan Nagari

Kamang Tengah Anam Suku, Pemerintahan Nagari Pauh Kamang Mudiak, dan Pemerintahan Nagari Durian Kapeh Darussalam. Dengan begitu juga terjadi pergeseran capaian kinerja sebagaimana ditetapkan oleh RPJMD. Adapun jumlah nagari berdasarkan level nagari madani sesuai hasil penilaian tim adalah sebagai berikut :

- a. Nagari madani level V sebanyak 10 nagari atau 10,87% dari total nagari
- b. Nagari madani level IV sebanyak 49 nagari atau 53,26% dari total nagari
- c. Nagari madani level III sebanyak 28 nagari atau 30,43 dari total nagari
- d. Nagari madani level II sebanyak 4 nagari atau 4,35% dari total nagari
- e. Nagari madani level 1, sebanyak 1 nagari atau 1,09% dari total nagari

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada PK Bupati Agam tahun 2023, capaian indikator kinerja nagari madani pada level V tidak memenuhi target, dari 14 yang ditargetkan tercapai hanya 10 nagari dengan capaian realisasi sebesar 71,43%. Di samping itu, terdapat 1 nagari yang masuk kategori nagari madani level 1. Adapun nagari yang masih dalam kategori nagari madani level 1 tersebut adalah Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso, yang merupakan salah satu nagari defenitif yang baru ditetapkan dengan Perda Nomor 11 Tahun 2022. Rendahnya capaian realisasi nagari madani pada tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Kurangnya pemahaman nagari terhadap gerakan nagari madani, sehingga pemenuhan data dukung terkait indikator – indikator penilaian tidak maksimal.
2. Ketersediaan kader nagari madani yang kurang memadai, sehingga upaya peningkatan level nagari madani tidak maksimal.
3. Kurangnya dukungan dan partisipasi lembaga nagari dalam upaya peningkatan level nagari madani.
4. Masih terdapat KAN yang belum memiliki ninik mamak sehingga fungsi KAN tidak optimal dalam internalisasi adat dan budaya sesuai dengan indikator nagari madani.

Terkait permasalahan tersebut, beberapa hal yang dilakukan sebagai upaya mengatasinya adalah :

- Peningkatan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pemenuhan indikator Nagari madani sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.
 - Mendorong nagari untuk merencanakan dan menganggarkan kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapainya nagari madani.
 - Meningkatkan pemberdayaan lembaga nagari serta partisipasi masyarakat dalam melaksanakan gerakan nagari madani
 - Mendorong peningkatan kinerja KAN di nagari
- Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan adat salangka nagari

merupakan salah satu indikator kinerja sasaran meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai – nilai agama, adat dan budaya. Pencapaian indikator ini dapat diketahui melalui penilaian terhadap seluruh lembaga adat yang ada di Kabupaten Agam. Berdasarkan data yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023, jumlah lembaga adat yang ada saat ini adalah sebanyak 198 lembaga, yang terdiri dari :

- Lembaga adat tingkat kabupaten 2 buah (LKAAM dan Bundo Kandung)
- Lembaga adat tingkat kecamatan 32 buah (LKAAM dan Bundo Kandung)
- Lembaga adat tingkat nagari 164 buah (KAN dan Bundo Kandung)

Berdasarkan penilaian dan pemantauan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, seluruh lembaga adat yang ada dapat dinyatakan aktif dalam menegakkan adat salingka nagari, realisasi 100%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 75%, maka tingkat capaian realisasi sebesar 133,33%.

Terkait indikator persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan, saat ini terdapat 51 cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya yang wajib dilestarikan melalui Keputusan Bupati Agam Nomor 604 Tahun 2012 tentang Penetapan Cagar Budaya. Dan saat ini sedang berlangsung proses penetapan 1 cagar budaya lagi untuk ditetapkan sebagai cagar budaya yang wajib dilestarikan yaitu Stasiun Kereta Api Padang Lua. Dengan begitu jumlah cagar budaya seluruhnya yang telah dilestarikan adalah 52 buah atau 100% dari cagar budaya yang ada. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka tingkat capaian kinerja indikator ini adalah 181,82 %.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.133
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya Tahun 2023 dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah nagari Madani pada level:	100					
	Level V	11	9	81,82%	14	10	71,43
	Level IV	22	57	259,09%	23	49	213,04
	Level III	38	15	39,47%	39	28	128,21
	Level II	11	1	1%	6	4	133,33
	Level I	0	0		0	1	
2.	Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	71,72	75	103%	75	100	133,33
3.	Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan	52	52	100%	55	100	181,82

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2022 dengan tahun 2023. Untuk indikator kinerja Jumlah Nagari Madani pada level V terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 10,39 poin. Besarnya gap antara capaian tahun lalu dengan tahun ini di samping disebabkan oleh beberapa faktor yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, juga disebabkan karena jumlah nagari yang dinilai mengalami penambahan dari 82 nagari pada tahun 2022 menjadi 92 nagari pada tahun 2023. Sama halnya dengan Nagari Madani Level IV, juga mengalami penurunan kinerja, sebesar 46,05. Di samping itu, nagari madani level I yang pada tahun lalu sudah tidak ada lagi sekarang berjumlah 1 nagari. Hal ini menjadi beban kerja tersendiri bagi dinas terkait agar tahun depan tidak ada lagi nagari madani level I di Kabupaten Agam.

Indikator kinerja Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari terlihat adanya peningkatan kinerja sebesar 30,33 poin. Peningkatan kinerja ini sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kegiatan – kegiatan lembaga adat yang ada seperti LKAAM dan Bundo Kandung Kabupaten yang giat dalam melakukan pembinaan terhadap Lembaga Kerapatan Adat Nagari dan Bundo kandung ke setiap nagari yang ada di Kabupaten

Agam. Saat ini setiap lembaga adat juga dilengkapi dengan kepengurusan dan program kerjanya.

Indikator Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan juga mengalami peningkatan kinerja yang sangat signifikan. Pada tahun 2022, tingkat capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Namun tahun 2023, tingkat capaian kinerjanya adalah 181,82% atau meningkat sebesar 81,82 poin. Hal ini menggambarkan bahwa dari target yang ditetapkan bahwa hanya 55% dari cagar budaya yang dilestarikan. Namun realisasinya mencapai 100%, artinya seluruh cagar budaya yang ada saat ini telah dilestarikan. Adapun faktor yang mempengaruhi, antara lain :

1. Tingginya perhatian masyarakat terhadap pengembangan kesenian tradisional dan pelestarian cagar budaya.
2. Adanya bantuan sarana dan prasarana untuk sanggar seni dan pemeliharaan cagar budaya walaupun belum maksimal.
3. Pembinaan secara berkala terhadap sanggar dan grup kesenian tradisional

Walaupun begitu, juga ditemukan beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Penyediaan sarana dan prasarana kelompok kesenian dan pemeliharaan cagar budaya yang belum merata sebarannya.
2. Masih kurangnya SDM dalam pembinaan sanggar seni dan pelestarian cagar budaya.
3. Masih kurangnya tenaga ahli dalam pelestarian cagar budaya.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.134
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Capaian		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		2022	2023		
1.	Jumlah nagari Madani pada level:				
	Level V	9	10	20	50%

	Level IV	57	49	25	196%
	Level III	15	28	37	124,32%
	Level II	1	4	0	
2.	Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	75	100	81,82	122,22
3.	Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan	52	100	70	142,86

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD-P Kab.Agam Tahun 2022

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja sasaran meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 – 2026. Untuk indikator kinerja jumlah nagari madani, level V dan level IV merupakan target dengan indikator bermakna positif, dimana semakin besar realisasi maka akan semakin baik kinerjanya, sedangkan level III, II, dan I merupakan indikator kinerja bermakna positif dimana semakin kecil angkanya maka akan semakin baik kinerjanya. Untuk indikator kinerja ini, yang menjadi focus adalah bagaimana menjadikan 20 nagari di Kabupaten Agam menjadi nagari madani level V pada tahun 2026. Artinya dengan capaian sebanyak 10 pada tahun 2022, masih tersisa 10 nagari lagi yang harus dijadikan nagari madani level V pada tahun 2026. Dengan sisa waktu kurang lebih 3tahun lagi, maka paling tidak setiap tahun harus ada 3 atau 4 nagari yang meningkat level madaninya menjadi level V. Hal ini cukup berat mengingat tahun ini penambahan nagari madani level V hanya 1 nagari. Untuk itu perlu menyusun strategi khusus agar target tersebut dapat diwujudkan. Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain :

- Meningkatkan koordinasi antara OPD di Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap nagari-nagari dalam mencapai indikator penilaian.
- Memaksimalkan pemberdayaan nagari dalam pencapaian level V nagari madani.
- Meningkatkan peran serta / partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk lembaga masyarakat maupun perorangan.
- Melakukan pendampingan kepada seluruh nagari terutama kepada nagari yang baru defenitif dalam pemenuhan kriteria dan indikator penilaian nagari madani.

Capaian Indikator Kinerja Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari pada tahun 2023 telah melebihi target akhir periode RPJMD pada tahun 2026, bahkan mencapai 122,22% jika dibanding target tahun 2026. Kondisi ini perlu dipertahankan agar tidak ada penurunan kinerja pada tahun tahun selanjutnya. Sama

halnya dengan indikator kinerja persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan, capaian kinerjanya tahun ini telah melebihi target tahun 2026 atau mencapai 142,86%. Kondisi ini harus dipertahankan agar kinerja pelestarian kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah tetap dapat ditingkatkan.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya pada tahun 2022 :

Tabel 2.135
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya
kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai
agama, adat dan budaya Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Jumlah nagari Madani pada level V, IV, III dan II				
1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.746.774.302	1.587.877.556	90,90%
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	19.425.842.010	17.923.535.186	92,27%
Jumlah		21.172.616.312	19.511.412.742	92,15%
Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari				
3.	Program Pengembangan Kebudayaan Daerah	574.991.500	508.439.451	88,45%
4.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	2.140.000.000	1.917.685.830	89,61%
Jumlah		2.714.991.500	2.426.125.281	89,26%
Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan				
5.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	222.917.000	184.329.521	82,69%
6.	Program Pengelolaan Permuseuman	699.999.807	655.476.970	93,64%
Jumlah		922.916.807	839.806.491	90,99%
Total		24.810.524.619	22.777.344.514	91,81%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab. Agam Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa setiap indikator kinerja pada sasaran

meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai – nilai agama, adat dan budaya didukung oleh 2 program. Untuk jumlah nagari madani, rata – rata capaian realisasi anggaran adalah 92,15%, persentase lembaga adat yang aktif menegakkan adat salingka nagari rata – rata capaian realisasi anggarannya adalah 89,26% sedangkan persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan rata-rata realisasi anggarannya adalah 90,99%. Dapat dikatakan realisasi anggaran pada masing-masing program termasuk kategori sangat tinggi.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.136
Perbandingan Pencapaian Kinerja Dan Anggaran
Sasaran Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib
Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya Tahun 2023

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% capaian	
Jumlah nagari Madani pada level:	100			21.172.616.312	19.511.412.742	92,15%	77,51
Level V	14	10	71,43				
Level IV	23	49	213,04				
Level III	39	28	128,21				
Level II	6	4	133,33				
Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	75	100	133,33	2.714.991.500	2.426.125.281	89,26%	149,37
Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan	55	100	181,82	922.916.807	839.806.491	90,99%	199,82

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga, pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja Jumlah Nagari madani level V lebih kecil dari pada realisasi anggaran dengan nilai efisien sebesar 77,51. Hal ini menunjukkan penggunaan anggaran kurang efisien dalam mendukung realisasi kinerja IKU.

Berbeda halnya dengan indikator kinerja persentase lembaga adat yang menegakkan adat salingka nagari, dimana capaian realisasi kinerja lebih besar dari pada capaian realisasi anggaran, dengan nilai efisien sebesar 149,37%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk program yang mendukung kinerja indikator ini sangat efisien dalam mencapai target yang ditetapkan. Indikator persentase kesenian tradisional, cagar budaya, dan peninggalan sejarah yang dilestarikan capaian realisasinya juga melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 181,82%. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran, maka nilai efisiennya sebesar 199,82%, sehingga dapat dikatakan sangat efisien dalam mendukung capaian indikator kinerja sasaran.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program / kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.137
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program
Sasaran Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib
Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Tingkat Efisiensi
	Jumlah nagari madani level V		71,43	
	Jumlah nagari madani level IV			
	Jumlah nagari madani level III			
	Jumlah nagari madani level II			

1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase komponen pada kelembagaan yang ditata sesuai standar	100	71,43
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi serta kerjasama daerah yang terlaksana	100	71,43
Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari			100	
1	Program Pengembangan Kebudayaan Daerah	Persentase lembaga adat yang menerapkan tradisi adat	139	71,94
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah sanggar seni yang aktif	127	78,74
Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan Peninggalan sejarah yang dilestarikan			100	
1	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang ditetapkan	100	100
2	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah kunjungan museum	205	48,78

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2023

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Berdasarkan skala yang ditetapkan oleh Litbang Depdagri, tingkat efektifitas program, dapat dikelompokkan menjadi :

Skala Capaian Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40 – 59.99	Tidak Efektif
60 – 79.99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel 2.137 dapat dilihat bahwa capaian kinerja IKU Jumlah Nagari Madani Level V didukung oleh 2 program dengan nilai efektifitas 71,43 sehingga dapat dikatakan cukup efektif dalam mendukung capaian IKU. Begitu juga halnya dengan IKU Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari, didukung oleh 2 program dengan nilai efektifitas di bawah 80 sehingga dapat dikatakan cukup efektif mendukung capaian IKU. Sedangkan IKU Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan Peninggalan sejarah yang dilestarikan memiliki 2 program, dengan 1

program yaitu Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya nilai efektifitasnya sebesar 100 sehingga sangat efektif dalam mendukung capaian kinerja IKU. Sedangkan Program Pengelolaan Permuseuman memiliki nilai efektifitas 48,78 sehingga tidak efektif dalam mendukung capaian IKU.